



LAPORAN KINERJA TAHUNAN BPSPL PONTIANAK



2025

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Putri Zilfi Hutari, S.Kel.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Januari 2026
Kepala BPSPL Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 terdiri atas **10 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **20 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan IV tahun 2025 yaitu **108,95%** (masuk kategori Hijau = **Baik**).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2025 yaitu:

Tabel 1 Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawaasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55	59,10	107,54%
2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan Kawasan Konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1	1	100%
3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24	24	100%
4.	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1	4	120%
5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi serta Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7	10	120%
6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4	9	100%
7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di	80	100	120%

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
	Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)			
8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1	1	100%
9.	Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)	3	3	100%
10.	Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL Pontianak (nilai)	70	88,25	120%
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	89	95,79	100%
12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5	98,57	120%
13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4	4	100%
14.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	80	86,43	108,04%
15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95	100	105,26%
16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100	100	100%
17.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85	90,81	106,84%
18.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80	99,40	120%
19.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76	100	120%
20.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak	90	100	111%
21.	Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2	2	100%

Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran sebesar **Rp30,545,579,000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak per tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp26,199,742,479** atau **85,77%** dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan yang diukur pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan target telah tercapai.

Meskipun demikian, capaian kinerja tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan guna mendorong peningkatan kinerja BPSPL Pontianak pada tahun berikutnya.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Tahun 2024 yaitu telah dilakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran melalui rapat pembahasan anggaran PNBP secara daring. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBP belum dapat dilaksanakan sehingga tetap perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan anggaran yang bersumber dari PNBP.

Selain itu, juga telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Desember 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Tantangan yg menjadi perhatian:

1. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang memiliki status Pengelolaan Optimum. Pada aspek penilaian Outcome belum dapat dilakukan penilaian karena belum adanya kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi, dalam hal ini berupa belum adanya identifikasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi.
2. Anggaran terkait Konservasi Ekosistem, yang meliputi pengelolaan kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, pada tahun 2026 mengalami blokir anggaran kode 3 pada sumber anggaran RM dan PHLN (LAUTRA).

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Menyampaikan permohonan identifikasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu kepada Direktur Konservasi Ekosistem, DJPK
2. Melakukan koordinasi dengan Eselon I dalam rangka buka blokir pada anggaran Konservasi Ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, dari sumber anggaran RM dan PHLN (LAUTRA).

Daftar Isi

Tim Penyusun	I
Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.2.1. Kedudukan	1
1.2.2. Tugas	1
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Keragaman SDM	6
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	7
1.5.1. Potensi	7
1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis	7
1.6. Dasar Hukum	8
1.7. Sistematika Penyajian	9
Tim Penyusun	I
Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	VI
Daftar Gambar	VIII
Daftar Tabel	X
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	25
3.1.2. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	29
3.1.3. Sasaran Kegiatan 2 Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	36

3.1.4. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	39
3.1.5. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	42
3.1.6. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	45
3.1.7. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	50
3.1.8. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	60
3.1.9. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	72
3.1.10. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	75
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	108
3. 3. Realisasi Anggaran	112
BAB IV PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan.....	114
4.2. Tindak Lanjut.....	114
4.3. Rekomendasi	114
DAFTAR LAMPIRAN.....	115

Daftar Gambar

Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3
Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak.....	5
Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak	6
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku).....	21
Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak	22
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	23
Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	24
Gambar 3.1.1-1. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	27
Gambar 3.1.2-1. Survei Habitat Biota Dilindungi.....	32
Gambar 3.1.2-2. Pengambilan Foto Udara.....	33
Gambar 3.1.2-3. Distribusi dan Evaluasi Pinger Akustik.....	34
Gambar 3.1.2-4. Studi Dampak Lalu Lintas Tongkang.....	34
Gambar 3.1.2-5. Sosialisasi Kawasan Konservasi	35
Gambar 3.1.5-1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	43
Gambar 3.1.6-1. Dokumentasi Penanganan Biota di Wilayah BPSPL Pontianak	47
Gambar 3.1.6-2. Statistik Penanganan Biota Perairan di Wilayah BPSPL Pontianak	47
Gambar 3.1.6-3. Sosialisasi Penangan Biota Terdampar.....	48
Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025	52
Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	53
Gambar 3.1.7-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari <i>Look Alike Species</i>	53
Gambar 3.1.7-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	54
Gambar 3.1.7-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	54
Gambar 3.1.7-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari.....	55
Gambar 3.1.7-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	55
Gambar 3.1.7-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	56
Gambar 3.1.7-9. Statistik Verifikasi SAJI LN	56
Gambar 3.1.7-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat.....	57
Gambar 3.1.7-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	57
Gambar 3.1.7-12. Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Arwana.....	58
Gambar 3.1.7-13. Dokumentasi Pengukuran	59
Gambar 3.1.8-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025	64
Gambar 3.1.8-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	65
Gambar 3.1.8-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari <i>Look Alike Species</i>	65
Gambar 3.1.8-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	66
Gambar 3.1.8-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	66
Gambar 3.1.8-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari.....	67
Gambar 3.1.8-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	67
Gambar 3.1.8-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	68
Gambar 3.1.8-9. Statistik Verifikasi SAJI LN	68
Gambar 3.1.8-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat.....	69
Gambar 3.1.8-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	69
Gambar 3.1.8-12. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	70
Gambar 3.1.9-1. Persebaran Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan.....	73
Gambar 3.1.10-1. Tren Nilai IKPA Tahun 2025.....	80
Gambar 3.1.10-2. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025.....	81
Gambar 3.1.10-3. Tren Realisasi Anggaran per Triwulan.....	83
Gambar 3.1.10-4. Tren IP ASN Tahun 2025.....	92

Gambar 3.1.10-5. Tren Realisasi Anggaran	93
Gambar 3.1.10-6. Tren Realisasi Anggaran	99
Gambar 3.1.10-7. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas.....	101
Gambar 3.1.10-8. Penghargaan Monev KIP	106
Gambar 3.1.10-9. Tren Realisasi Anggaran	107
Gambar 3.2.1-1. Perbandingan Nilai IKPA.....	108
Gambar 3.2.1-2. Nilai IP ASN UPT PSPL.....	109

Daftar Tabel

Tabel 1 Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2025	IV
Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025.....	14
Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025.....	14
Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025.....	16
Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025.....	17
Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak.....	25
Tabel 3.1.1-2. Jumlah Penilaian Teknis Tahun 2025	27
Tabel 3.1.1-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1	27
Tabel 3.1.2-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria.....	29
Tabel 3.1.2-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA.....	29
Tabel 3.1.2-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	30
Tabel 3.1.2-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak.....	31
Tabel 3.1.2-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Tahun 2025	35
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak.....	36
Tabel 3.1.3-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2025	38
Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak.....	39
Tabel 3.1.4-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2025	40
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak.....	42
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2025	44
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Tahun 2025.....	45
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2025	48
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak.....	50
Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan	58
Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Tahun 2025	59
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak.....	63
Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran IKU 7 Tahun 2025	70
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak.....	72
Tabel 3.1.9-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Tahun 2025	74
Tabel 3.1.10-1. Kategori Nilai PM SAKIP	75
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKM 9 Penyardartahuan Jasa Bahari	76
Tabel 3.1.11-1 Capaian IKM 10 BPSPL Pontianak	76
Tabel 3.1.10-3. Realisasi Anggaran IKM 10 Tahun 2025.....	78
Tabel 3.1.10-4. Capaian IKM 11 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	79
Tabel 3.1.10-5. Realisasi Anggaran IKM 11 Tahun 2025.....	82
Tabel 3.1.10-6 Capaian IKM 12 Tahun 2025.....	85
Tabel 3.1.10-7. Realisasi Anggaran IKM 12 Tahun 2025.....	87
Tabel 3.1.10-8. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak	88
Tabel 3.1.10-9. Realisasi Anggaran IKM 13 pada Tahun 2025	89
Tabel 3.1.10-10. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak	91
Tabel 3.1.10-11. Realisasi Anggaran IKM 14.....	93
Tabel 3.1.10-12. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak	94
Tabel 3.1.10-13. Capaian IKM 16 BPSPL Pontianak	96
Tabel 3.1.10-14. Capaian IKM 17 Nilai WBK BPSPL Pontianak	97
Tabel 3.1.10-15. Realisasi Anggaran IKM 17 Tahun 2025.....	99
Tabel 3.1.10-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan	100
Tabel 3.1.10-17. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak	100

Tabel 3.1.10-18. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2025.....	102
Tabel 3.1.10-19. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak	103
Tabel 3.1.10-20. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak	105
Tabel 3.1.10-21. Realisasi Anggaran IKM 20 Tahun 2025.....	107
Tabel 3.2.1-1. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak	110
Tabel 3.2.1-1. Perbandingan Capaian UPT PSPL	110
Tabel 3.3.1-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025.....	112
Tabel 3.3.1-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	113

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPSPL Pontianak berupaya mencapai kinerja terbaik secara transparan dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan pencapaian target dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas kinerja BPSPL Pontianak selama Tahun 2025. Penyusunan LKj ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan hasil capaian target kegiatan BPSPL Pontianak yang mengacu pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas SDM, ketersediaan fasilitas, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPSPL Pontianak berfokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.2.1. Kedudukan

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPSPL Pontianak dipimpin oleh kepala dengan wilayah kerja di seluruh provinsi di Kalimantan.

1.2.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu meliputi:

- a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Melakukan penataan batas;
- d. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- h. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.

1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), Ramsar *Convention on Wetlands of International Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;

- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.3. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.



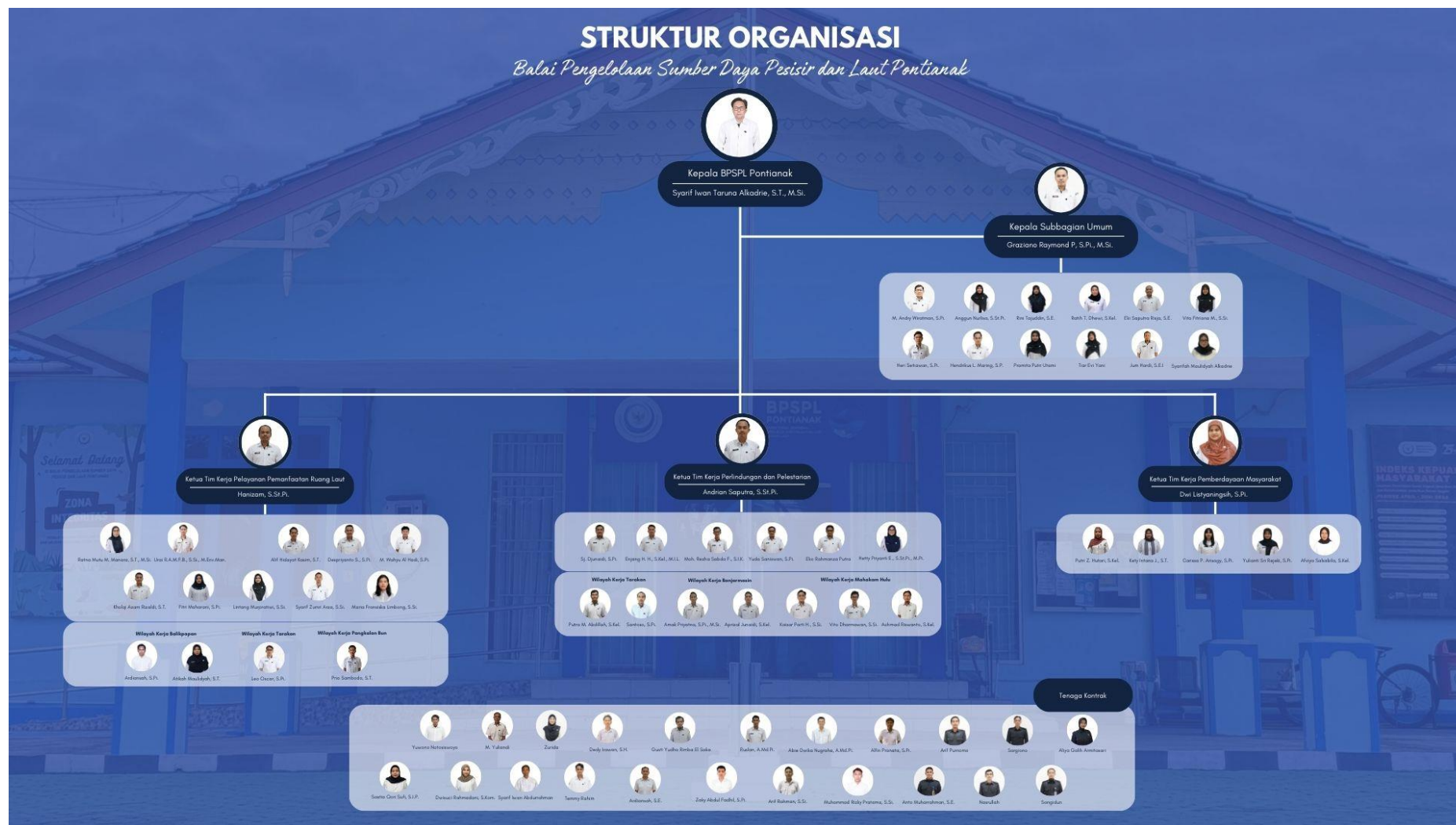
Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional (meliputi Tim Kerja). Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang telah diduduki pemangku jabatan di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Penata Perizinan, Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, dan Arsiparis.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.4. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2025 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 71 orang terdiri dari 50 ASN (41 PNS, 2 CPNS, dan 6 PPPK), dan 23 Tenaga Kontrak. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian jabatan Tenaga Kontrak yang berjumlah 23 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, Petugas Layanan Informasi, Content Creator, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.



Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.5.1. Potensi

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² dan terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota

yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Potensi biofisik pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki hutan mangrove yang luas dan penting sebagai penyangga abrasi, tempat berkembang biak berbagai biota laut, dan penyerap karbon. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi satwa endemik Kalimantan seperti bekantan. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas mangrove eksisting di Wilayah Kalimantan seluas 333.251 hektar dan luas potensi habitat mangrove sebesar 294.770 hektar. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia, Kalimantan memiliki total luas mangrove terbesar ketiga di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Papua.

Perairan Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (seperti di Kepulauan Derawan dan sekitarnya) dan Kalimantan Utara (seperti Pulau Nunukan), memiliki keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, bahkan termasuk dalam kawasan *Coral Triangle*. Berdasarkan data luas terumbu karang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, luas terumbu karang di Perairan Kalimantan sebesar 117.426 hektar. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berpotensi untuk pariwisata. Ekosistem padang lamun juga tersebar di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, duyung, dan biota laut lainnya.

Di wilayah Kalimantan terdapat berbagai keanekaragaman hayati perairan yang menjadi target prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Pari Air Tawar, Hiu, Pari dan mamalia laut serta Karang. Selain itu terdapat keanekaragaman hayati perairan yang endemik ditemukan di wilayah Kalimantan, yaitu Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) yang menjadi komoditas perdagangan hingga skala global.

1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- b. Setelah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus* sp.). Namun, terdapat gugatan pada UU Nomor 32 tahun 2024 tersebut sehingga dalam penanganan beberapa biota, KKP belum sepenuhnya diberikan mandat atas konservasi beberapa biota. Hal ini perlu adanya kepastian hukum agar penanganan konflik biota perairan dapat terlaksana dengan baik.
- c. Tata niaga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pelaku pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu melakukan penguatan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang

Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.

- d. Kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk memantau aktifitas pemanfaatan ruang laut yang sudah memiliki izin agar tetap sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang telah terbit. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk melihat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- e. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang belum teridentifikasi dengan lengkap. Hal ini menyebabkan risiko pemanfaatan pulau – pulau kecil yang melebihi daya dukung menjadi tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- g. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.6. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pengarusutamaan gender;
- x. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Data Dukung Capaian Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan tonggak awal dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden terpilih. Visi Presiden periode 2025 - 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata Kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus dilakukan pengelolaan Kesehatan ekosistem pesisir dan laut (*ocean health*), neraca sumber daya laut

(*ocean accounting*), penerapan *marine nature-based solution*, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup:

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;
2. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;
3. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;
4. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;
5. penguatan industri transportasi laut
6. pengembangan pariwisata bahari dan danau
7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Penyusunan RPJMN sesuai arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 – 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) untuk membangun Kelautan dan Perikanan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. BPSPL Pontianak juga memiliki peran dalam pengelolaan Kelautan dan Perikanan seperti Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penataan Ruang Laut.

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard (BSC)*. Lebih lanjut menindaklanjuti pembahasan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Juni 2025 dan Desember 2025, BPSPL Pontianak melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kinerja pada bulan Juni 2025 dan Perubahan kedua pada bulan Desember 2025. Adapun rincian Perubahan/Revisi Pertama atas PK sebagai berikut.

1. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja (9 IKU dan 11 IKM).
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja (1 IKU).

Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

Sasaran Kegiatan Tahun 2024	Sasaran Kegiatan Tahun 2025
(SK-4) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-2) Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
(SK-8) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-09) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-7) Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-8) Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-9) Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)
(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-10) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-10) Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK- 11) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Tahun 2024	Tahun 2025
penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Tahun 2024	Tahun 2025
(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

IKK	IKK
Tahun 2024	Tahun 2025
(IKU-4) Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	(IKU-1) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-5) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	(IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)
(IKU-9) Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	(IKU-3) Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)
(IKU-6) Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	(IKU-4) Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
(IKU-10) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-11) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-6) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Tidak terdapat IKU	(IKU-7) Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak terdapat IKU	(IKU-8) Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Tidak terdapat IKU	(IKU-9) Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-10) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-11) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-12) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-13) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IKU-14) Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)
(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IKM-15) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)
(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-16) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-17) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-24) Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-18) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak terdapat IKM	(IKM-19) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak terdapat IKM	(IKM-20) Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKU-1) Nilai PNBK BPSPL Pontianak (Rp.000)	Tidak terdapat IKU
(IKU-2) Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak terdapat IKU
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-7) Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak terdapat IKU
(IKU-8) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	Tidak terdapat IKU

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-12) Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-13) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak terdapat IKU
(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Tidak terdapat IKM
(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	Tidak terdapat IKM

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat pengurangan IKK sebanyak 7 (tujuh) IKU dan 2 (dua) IKM, dan penambahan 2 (dua) IKM dan 3 (tiga) IKU. Pengurangan Indikator Kinerja disebabkan berkurangnya pagu anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2025. Selain itu, juga terdapat penyederhanaan indikator kinerja seperti Kemitraan dan Kerja Sama menjadi satu indikator kinerja. Sementara itu, penambahan indikator kinerja dilakukan dalam rangka pengembangan indikator kinerja yang menunjang layanan dukungan manajemen lingkup BPSPL Pontianak. Terdapat penambahan IKU-9 Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) dengan adanya penambahan Top-Up PNPB kegiatan penataan pemanfaatan jasa kelautan.

Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025
(BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-1) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat 1 (satu) IKU antara BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. IKU ini sebelumnya telah ada dalam Perjanjian Kinerja antara BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. IKU ini kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan diturunkan dari Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut ke Kepala BPSPL Pontianak.

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
2.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
7.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	80
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terfasilitasinya Lokasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari	9.	Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)	3
10.		10.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	89
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5
		13.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
		14.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	80
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95
		16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		17.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85
		18.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80
		19.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76
		20.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91

Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.4. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
- b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level III sampai ke level 0); dan
- c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

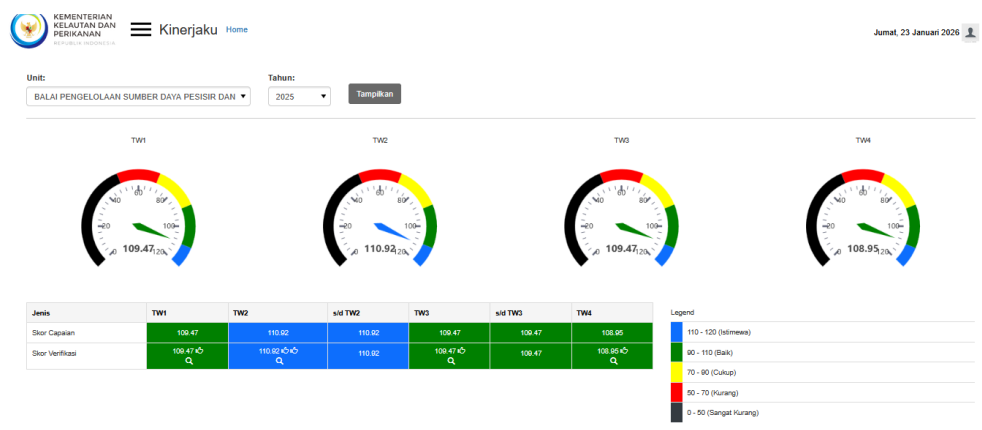
1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja di bawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PK dan Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.



Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara *online* yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 yaitu **108,95%** (masuk kategori Hijau = **Baik**). NKO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2024 (107,50%). Secara umum, seluruh capaian IKU yang ditargetkan pada Tahun 2025 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawaasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 59,10% dari target 55% sehingga persentase capaian sebesar **107,54%**
2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan Kawasan Konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) tercapai 1 provinsi dengan target 1 provinis sehingga persentase capaian sebesar **100%**
3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai sebanyak 24 dengan target 24 orang sehingga persentase sebesar **100%**

4. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 4 kesepakatan dengan target 1 Kesepakatan dengan Persentase **120%**
5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi serta Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak 10 jenis dari target 7 jenis, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak 9 jenis dari target 4 jenis, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**.
7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target 80, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
8. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dengan target 1 dokumen persentase capaian kinerja mencapai **100%**
9. Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) tercapai 3 Lokasi dengan target 3 lokasi persentase mencapai **100%**
10. Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL Pontianak (nilai) tercapai 88,25 dengan target 70 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 95,79 dengan target 89 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **107,63%**.
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 98,57 dengan target 71,5 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
13. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target 4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
14. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai 86,43 dengan target 80 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **108,04%**.
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 100 dari target 95 sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
16. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dengan target 100% sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%**
17. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 90,81 dengan target 85 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **106,84%**
18. Nilai Pengawasan Kearsipan internal BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 99,40 dengan target 80, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**.
19. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 76% sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
20. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target 91, persentase capaian kinerja mencapai **109,89%**.
21. Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) dengan capaian 2 dokumen dengan target 2 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar **100%**

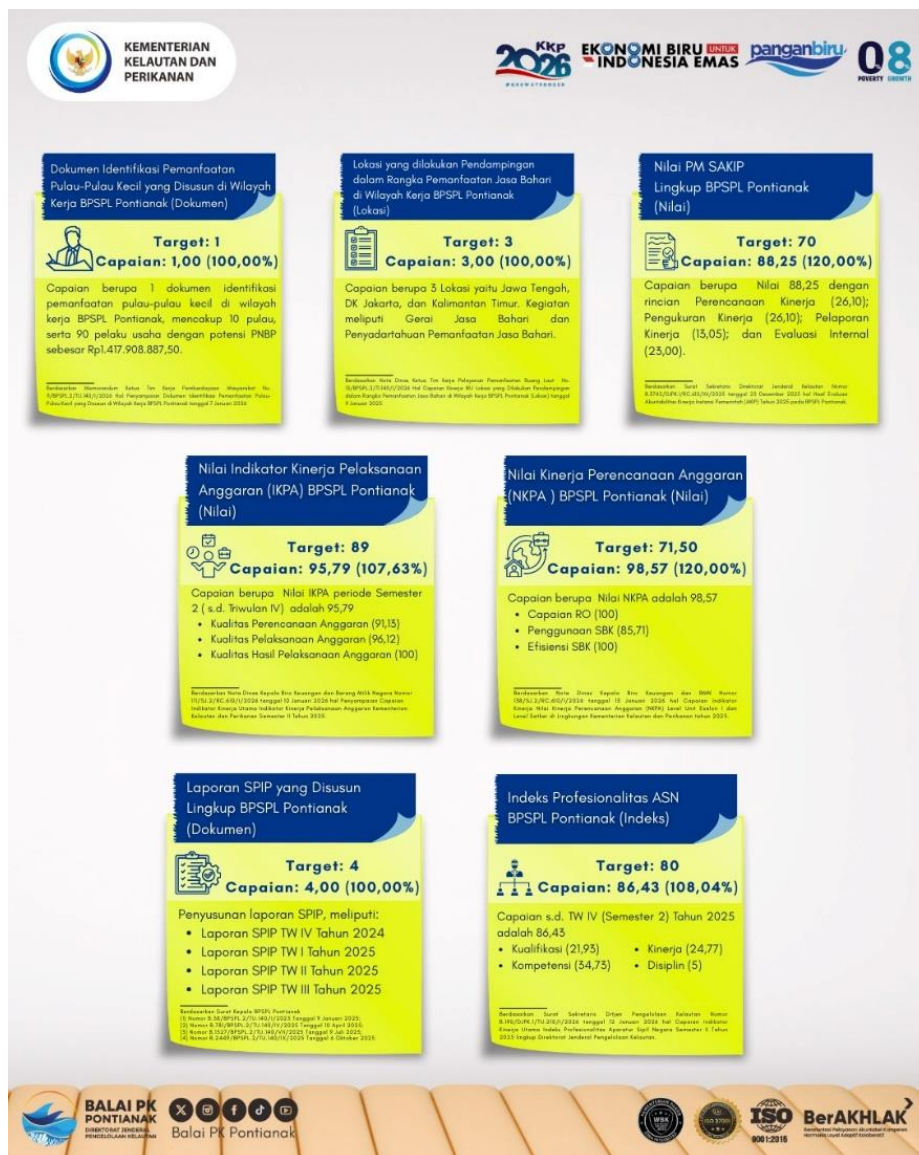


Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak

NKO pada Tahun 2024 sebesar 107,5 dan NKO pada Tahun 2025 sebesar 108,95. Terdapat peningkatan sebesar 1,45. Peningkatan NKO pada Tahun 2025 disebabkan adanya penambahan target pada indikator kinerja yang diukur sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja secara keseluruhan. Secara singkat capaian kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.1-1, kinerja Organisasi BPSPL Pontianak selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai kinerja pada Triwulan I mencapai **109,47%**, Triwulan II sebesar **110,92%**, Triwulan III sebesar **109,47%**, dan Triwulan IV mencapai **108,95%**. Capaian tersebut secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan, dengan kategori **Baik**, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025



Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020). Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengeloalaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penilaian EVIKA terhadap Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah 52,75%. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020.

Aspek penilaian efektivitas pdngelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.

Tabel 3.1.1-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
<i>Output</i>	6	15-20	13
<i>Outcome</i>	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.1-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	N_I	N_{Max}	$N_K (%)$	B_K	$N_{AK} (%)$
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
<i>Output</i>	...	650	...	0,25	...
<i>Outcome</i>	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					$\sum NaK$

Keterangan :

Nilai Indikator (N_I) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator

Nilai Maksimum (N_{Max}) : Total nilai dari seluruh pertanyaan

Nilai Kriteria (N_K) : $(N_I / N_{Max}) \times 100\%$

Bobot Kriteria (B_K) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
 Nilai Akhir Kriteria (N_{AK}) : $N_K \times B_K$
 Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan N_{AK}

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut.

Tabel 3.1.1-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari



Nilai Akhir Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebagai berikut.

$$NET = \frac{Nak1 + Nak2 + \dots + Nakn}{Kn}$$

Keterangan :
 NET : Nilai Rata-Rata Efektifitas Tahun Penilaian
 Nak1 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1
 Nak2 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2
 Nakn : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n
 Kn : Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi

Tabel 3.1.1-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)						
Realisasi 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
52,44	55	59,10	+6,7	55	107,45	58	94,83

1. Capaian IKU Tahun 2025

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan target 55%. Hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi untuk Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 59,10% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian Nomor 5/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%). Rincian hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Skor Penilaian Kriteria Input | : 895 dari total skor 1075 (83%) |
| b. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 295 dari total skor 430 (69%) |
| c. Skor Penilaian Kriteria Output | : 340 dari total skor 650 (52%) |
| d. Skor Penilaian Kriteria Outcome | : 50 dari total skor 625 (8%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 1.580 dari total skor 2.780 (59,10%) |

Adapun komponen kegiatan pendukung sebagai upaya dalam meningkatkan nilai dalam Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi untuk Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilakukan adalah Pendataan Jenis dan Biota Dilindungi di Kawasan Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Monitoring Sosial Ekonomi, Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi, Pendataan Kondisi Ikan Ekonomis Penting, dan Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu serta dilakukan juga Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah Nilai EVIKA 59,10% (107,45%) dari target tahunan 55%. Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah persentase peningkatan nilai EVIKA 16,31% (116,5%) dari target tahunan 14%. Nilai EVIKA Tahun 2024 yaitu 52,75%. Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan output kegiatan. Tetapi hasil penilaian EVIKA mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 yaitu 6,35%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan kawasan konservasi nasional.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indicator ini dengan target nasional, BPSPL Pontianak membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indicator kinerja yang ditargetkan. Capaian Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 59,10, sedangkan pada capaian BPSPL Denpasar tidak ada indikator Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini yaitu adanya SDM yang kompeten, kerja sama yang baik dengan mitra kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan dalam pengukuran efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur secara daring dan luring di Kantor DKP Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan dihadiri oleh rekan NGO.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pelaksanaan kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, akademis, organisasi non profit dan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan dan pencapaian IKU ini.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 - 2029

Target Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029 pada Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2029 adalah 58. Perbandingan capaian Nilai EVIKA tahun 2025 di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu (59,10%) dengan Target Renstra KKP Tahun 2029 (58%) adalah 94,83%

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2025 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Habitat Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu

Kegiatan survei dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi yang ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Menteri Kelautan No 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Mahakam. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juli 15 - 22 2025 dengan melakukan pengambilan data kualitas air di beberapa titik sampel. Pengambilan data yang dilakukan meliputi beberapa parameter yaitu suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus, serta pemantauan sepanjang lokasi menggunakan teropong dan kamera dengan tujuan untuk melihat kondisi perairan dan pesut jika ada yang beraktivitas. Selain itu juga dilakukan pengambilan data pemetaan dari udara dengan drone untuk melihat gambaran secara luas dari wilayah pengambilan data kualitas air dan zona inti.



Gambar 3.1.1-1. Survei Habitat Biota Dilindungi

Berdasarkan hasil pengamatan pesut mahakam kali ini didapatkan yaitu penemuan pesut saat observasi dengan total penemuan pesut yaitu 45 ekor di daerah Muara Pela, Liang Ilir, Kota Bangun Ilir, Muara Muntai Ilir, Batuq dan Loa Deras dengan rentang waktu ditemukan dari Pagi – Sore Hari. Sampling kualitas air dilakukan pada 28 stasiun pengamatan dan 6 stasiun pengamatan pada lokasi kemunculan pesut. Sedangkan pengambilan data yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak dilakukan pada 11 Stasiun di Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas. Adapun rentang nilai hasil pengukuran adalah sebagai berikut untuk Suhu (25,8 C - 33,3 C), pH (5,17 - 8,79), DO (2,4 - 6,0 mg/L), TDS (8 – 53.2 ppm). Berdasarkan nilai dari parameter kualitas air (suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus) yang terdapat di Kawasan Konservasi berada pada kondisi yang kurang baik sesuai dengan baku mutu air PP 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk di 2 titik. Baku mutu yang digunakan adalah lampiran tabel untuk air sungai dan air danau. Kelas yang digunakan adalah kelas 2, yaitu peruntukan air untuk keperluan prasarana dan/atau rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi. Kemudian standar tersebut juga tidak masuk nilai minimum untuk baku mutu air sungai kelas 3, yaitu air dengan peruntukan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi, dan peruntukan lain dengan syarat yang sama.

b. Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam di Wilayah Hulu dilakukan pada Tahun 2025 adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* di lokasi Desa Pela, Desa Muara Wis, Desa Muara Muntai Ilir dan Desa Muara Kaman Ulu pada tanggal 14-20 Juli 2025. Kegiatan Monitoring tersebut dilakukan dengan pemaparan hasil dari data tahun 2024 - 2025 untuk mendapatkan gambaran informasi dan identifikasi hasil yang diberikan oleh masyarakat yang dilanjutkan pelaksanaan wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner pada September 2025 dan metode pengambilan data *purposive sampling* dengan masyarakat yang diwawancarai berada di desa pada administrasi sekitar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu secara, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi.

Berdasarkan hasil kegiatan Monitoring didapatkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi rencana pengelolaan dengan konten paparan yaitu regulasi, jenis ikan dilindungi, zonasi di kawasan, lokasi zona inti, pemanfaatan yang diperbolehkan, dan statistik sosial ekonomi dari kegiatan monitoring yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jumlah seluruh tamu undangan pada kegiatan adalah 30 orang pada tiap desa (total 120 orang).

Kegiatan pendataan sosial ekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemanfaat di sekitar kawasan, meliputi nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan pelaku usaha

pariwisata. Tim juga telah melakukan pembelian jenis ikan yang menjadi target pendataan (lepok dan puyau), kemudian dilakukan pendataan berdasarkan morfologi dan meristik jenis ikan. Total jumlah ikan yang telah disurvei pada kegiatan ini adalah 30,16 Kg.



Gambar 3.1.1-2. Dokumentasi pelaksanaan Monitoring sosial ekonomi dan Pendataan Ikan Ekonomis

c. **Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu.**

Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak di dalam Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam triwulan 3 (ketiga) yakni dari bulan Juli hingga September 2025. Dalam triwulan kali ini, kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 36 kali bersama Yayasan Konservasi Rasi dan 2 kali bersama personel dari Stasiun PSDKP Tarakan serta DKP Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan monitoring dilakukan di wilayah Kecamatan Kota Bangun melalui transportasi air atau kapal dengan rute pengawasan melalui Desa Liang Ulu – Liang Ilir – Murunan – Kampung Baru – Muhuran – Sebelimbingan – Sangkuliman – Pela – Kota Bangun Ulu – Kota Bangun Seberang – Kedang Murung – dan Rimba Ayu. Selain itu pengawasan juga dilakukan di sebagian zona inti yang berada di Danau Semayang – Desa Pela – Sangkuliman - Danau Kedang Murung

Berdasarkan hasil Monitoring didapatkan hasil dimana Pada bulan Juli hingga September 2025 aktivitas penyetruman terus terjadi di Kecamatan Kota Bangun dengan jumlah kejadian sebanyak (39 kali) dengan rincian kejadian (16 kali) pada pagi hingga siang hari, kemudian malam hari sebanyak (26 kali) dan subuh/dini hari (23 kali). Di triwulan ini frekuensi kegiatan *Illegal fishing* rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan bulan Juli adalah bulan paling banyak kejadian dengan (19 kali) dan paling rendah pada bulan Agustus sebanyak (3 kali).



Gambar 3.1.1-3. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

d. Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi.

Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam aspek pemantauan ekosistem perairan dan satwa endemik melalui penerapan teknologi survei udara yang efektif, efisien, dan akurat. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5–10 Agustus 2025 dengan Seluruh rangkaian kegiatan terselenggara dalam kurun waktu 6 (enam) hari (termasuk sesi daring, ujian teori, simulasi, dan ujian lapangan) dan diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari Pengelola Kawasan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP dan Universitas Mulawarman. Pemilihan lokasi di Kota Balikpapan, khususnya di lingkungan Kodam VI/Mulawarman, didasarkan pada pertimbangan keamanan, ketersediaan fasilitas memadai, serta aksesibilitas peserta dan instruktur. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemberian materi secara daring dengan 13 modul pembelajaran yang disusun secara sistematis. Melalui sesi teori ini, peserta dibekali pengetahuan penting sebagai landasan sebelum melaksanakan simulasi dan praktik lapangan, sehingga diharapkan mampu menguasai aspek teknis maupun non-teknis yang berhubungan dengan operasional drone. Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi teori selesai;
- Tahap evaluasi yang terdiri dari ujian teori dan simulasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 bertempat di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan. Tahapan ini menjadi momen penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai pemahaman peserta serta kesiapan mereka sebelum terjun ke praktik lapangan secara langsung;
- Tahap akhir dari rangkaian pelatihan adalah ujian praktik lapangan dan sertifikasi, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan. Ujian ini menjadi puncak dari seluruh proses pembelajaran, di mana setiap peserta

diuji secara langsung mengenai keterampilan mengoperasikan drone sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).

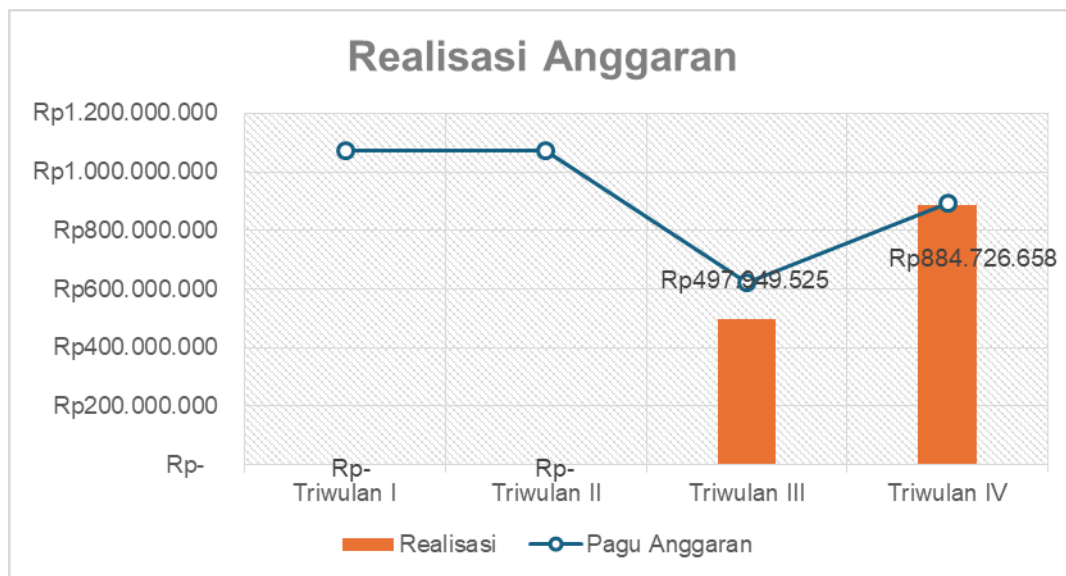
Ujian lapangan dan sertifikasi membuktikan kesiapan peserta dalam menerapkan teori ke praktik langsung. Seluruh 15 peserta mampu menyelesaikan rangkaian manuver yang telah ditetapkan, termasuk manuver navigasi, pengendalian kamera, Point of Interest, hingga pendaratan dengan tingkat ketepatan yang memadai. Tingkat kelulusan mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas metode pembelajaran dan pelatihan yang diterapkan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem; [2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; [2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi dengan total anggaran sebesar Rp1.074.718.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB. Rincian Realisasi anggaran IKU 1 tahun 2025 berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi
1.	[2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K	Rp. 32.708.000	Rp 32.708.000 (100%)
3.	[2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	Rp 779,984,000	Rp 771,918,658 (98.97%)
4.	[2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Rp0	Rp 0 (0%)
5.	[2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi	Rp80.100.000	Rp 80.100.000 (100%)
TOTAL		Rp892.792.000	Rp 884.726.658 (99,10%)



Gambar 3.1.2-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 hingga Tahun 2025

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Tahun 2025 yaitu Rp884.726.658 atau 99,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 892.792.000 Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 dapat dilihat dari keterlibatan laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Penilaian EVIKA Tahun 2026 difokuskan pada penguatan koordinasi dengan pengelola kawasan, pemenuhan dan pemutakhiran data dukung penilaian, serta pendampingan pelaksanaan EVIKA secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Dasar hukum indikator kinerja ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Teknik menghitung indikator kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-2	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	1	1	-	1	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) dengan target 1 Provinsi dan tercapai 1 Provinsi. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 6/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi).

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kawasan Konservasi Daerah dalam rangka Pembahasan Pra Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir Pontianak, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait telah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme, indikator, serta kerangka penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Semulasi penilaian yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran meberikan gambaran awal mengenai tingkat kesiapan pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan antara kondisi pengelolaan yang terdokumentasi dengan implementasi di lapangan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tahun 2025 telah dilakukan pengukuran. Selanjutnya, terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025 sehingga terdapat perbedaan antara metode perhitungan antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Hal itu menyebabkan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2025 tidak dapat dibandingkan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 1 (satu) daerah yang dilakukan pendampingan

pengusulan Kawasan Konservasi, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) Provinsi yang dilakukan pendampingan penilaian EVIKA.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembandingan tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian indikator Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah pada wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah sebanyak 1 provinsi. Sementara itu, pada BPSPL Denpasar, capaian untuk indikator yang sama juga terealisasi sebesar 1 provinsi. Dengan demikian, apabila dilakukan perbandingan, capaian kinerja BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar menunjukkan hasil yang setara, yaitu masing-masing berhasil memfasilitasi penilaian pada 1 provinsi..

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan dari BPSPL Pontianak dengan DKP Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada 11 Agustus 2025.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan pertemuan secara daring. Langkah tersebut mampu menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya, tanpa mengurangi kualitas koordinasi dan capaian output kegiatan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Target Capaian Kinerja BPPSL Pontianak dalam IKU Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) dengan capaian 1 Provinsi. Sedangkan target dalam Renstra DJPK adalah Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di tahun 2029 adalah 10. Sehingga Target Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025 – 2029.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini diantaranya pendampingan dan fasilitasi penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU 2 adalah Pertemuan pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Samarinda. Kegiatan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan perwakilan dari mitra kerja terdiri dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, WWF Indonesia serta UPTD KDPS. Pada kesempatan tersebut dilakukan penyampaian materi terkait penilaian EVIKA menggunakan matriks perbantuan yang memuat indikator-indikator penilaian kawasan konservasi selain itu dilakukan proses pra penilaian, disajikan tabel yang bisa dipakai sebagai alat evaluasi kinerja SUOP (Satuan Unit Operasi Pengelola) kawasan konservasi perairan, baik dari aspek administratif (anggaran, SOP, izin), teknis (monitoring biofisik, pengawasan), maupun sosial-ekonomi (dampak ekonomi & partisipasi masyarakat). Struktur tabel ini membagi indikator ke

dalam Input, Proses, Output, dan Outcome, sehingga bisa digunakan sebagai kerangka Monitoring dan Evaluasi (Monev).



Gambar 3.1.3-1. Pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pertemuan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) membutuhkan data yang lengkap dan valid, termasuk aspek anggaran, sarpras, SOP, dan kemitraan.
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki beberapa komponen yang perlu diperkuat, terutama SOP perizinan dan infrastruktur.
- Kemitraan dengan NGO dan masyarakat (seperti Pokdarwis) menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai EVIKA.
- Materi penyadartahuan dan data populasi target harus dikelola dengan baik agar dapat menjawab indikator sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem dengan total anggaran sebesar Rp32.708.000. berdasarkan Komponen/Subkomponen. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053]	Rp32.708.000	Rp32.708.000 (100%)	-

	Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K			
TOTAL		Rp32.708.000	Rp32.708.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. 32.708.000 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp 32.708.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan berupa Seminar Kit, Spanduk, Perengkapan kegiatan dan konsumsi.



Gambar 3.1.3-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 dapat dilihat dari keterlibatan laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi dan/atau pendampingan dan simulasi penilaian EVIKA pada Kawasan Konservasi Daerah.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang dilakukan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik perhitungan Indikator Kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jumlah masyarakat (orang) yang ikut serta dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-3	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-3	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Target 2024	Target 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Realisasi thd Target 2025
-	24	-	-	24	100	42	57.14

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) sebanyak 24 orang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi bagi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 7/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang).

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi yaitu melalui kegiatan “Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone” untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi, pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 secara daring melalui media Zoom Meeting. Peserta kegiatan berasal dari pemerintah daerah, pemerintah desa, universitas, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan warga setempat dengan total peserta 130 orang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tahun 2025 dilakukan pengukuran pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 70 orang masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru. Sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 24 orang masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya. Capaian pada tahun 2025 dengan 2024 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan obyek indikator kinerja. Selanjutnya terdapat penurunan target peserta (masyarakat dalam dan/atau sekitar kawasan konservasi) yang disertakan dalam pelatihan karena adanya penurunan anggaran yang signifikan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian Kinerja Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) adalah sebanyak 24 orang. Sementara itu, pada BPSPL Denpasar, tidak memiliki indikator Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi. Dengan demikian, capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi yang dilaksanakan secara daring pada 28 Agustus 2025. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara lebih efektif.

Pada Indikator Kegiatan ini terdapat perbedaan antara capaian (24 orang) dengan realisasi kegiatan (130 orang). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan kinerja dengan satuan biaya per orang (masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan pada Rincian Output 2362.SCC.002 Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Target Capaian Kinerja BPPSL Pontianak dalam IKU Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) dengan capaian 24 orang, sementara di Renstra DJPK 2029 target indikator masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih adalah sebesar 42 orang. Jika dibandingkan dengan BPSPL Pontianak dengan Renstra DJPK tahun 2025 – 2029 terealisasi tahun sebesar 57.14%.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi secara daring pada Tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Narasumber menyampaikan materi ialah pak Ihsan Ramli, S.T., M.Si selaku perwakilan dari Dir. KSG yang menyampaikan materi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sedangkan Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P. menyampaikan materi Tentang Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi. Bapak Anton Chandra selaku wakil Ketua Umum APDI. Beliau menyampaikan materi tentang Videografi Drone untuk Pengembangan Potensi dan Promosi Ekowisata Desa di Kawasan Konservasi. Kegiatan dihadiri sebanyak 130 Peserta yang berasal dari berbagai institusi pemangku kepentingan dalam dan luar kawasan konservasi.



Gambar 3.1.4-1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi

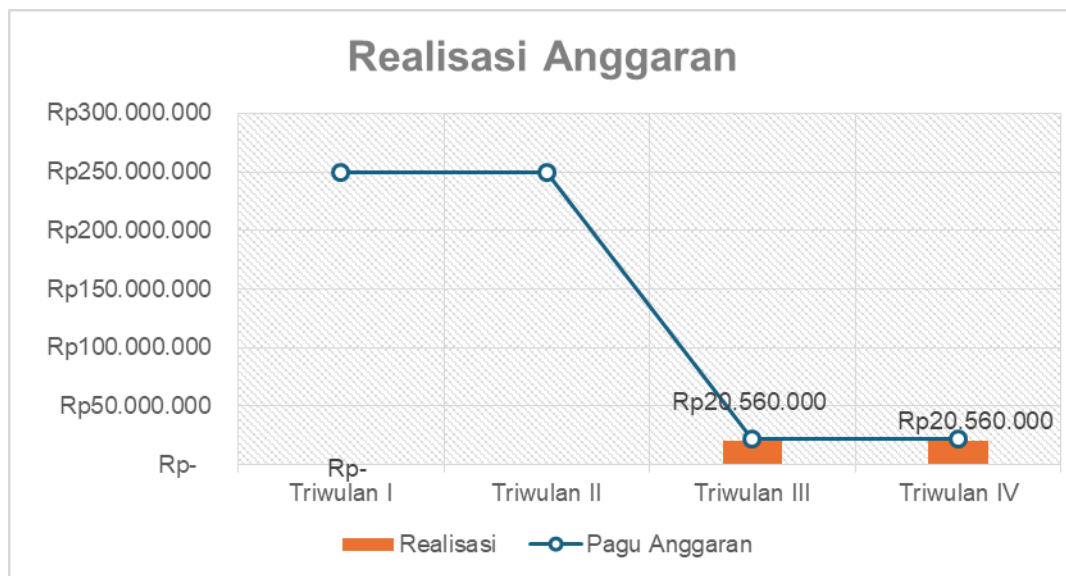
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi sebesar Rp22.480.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp22.480.000	Rp 22.480.000 (100%)	-
TOTAL		Rp22.480.000	Rp 22.480.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. **22.480.000** atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp22.480.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.



Gambar 3.1.4-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 telah diimplementasikan pada setiap kegiatan dengan adanya keikutsertaan masyarakat laki-laki dan perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 dalam peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan konservasi diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pemanfaatan teknologi pendukung, serta pengembangan usaha berbasis konservasi. Kegiatan akan dilaksanakan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra terkait serta memanfaatkan metode daring dan luring secara efektif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi nasional.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasithd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
1	1	4	3	1	120	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 dengan target 1 Kesepakatan dan tercapai 4 kesepakatan (berupa Perjanjian Kerja Sama) berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 8/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan), meliputi:

- BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (No. B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan No. 1157/UN22.3/PM.01.01/2025) tanggal 10 Februari 2025.
- BPSPL Pontianak dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) (No. B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan No. 001/PK-KTG/II/2025) tanggal 10 Februari 2025
- BPSPL Pontianak dengan Yayasan WEBE Konservasi Ketapang (No. B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan No. 14.008/WEBE.KTG/II/2025) tanggal 10 Februari 2025.
- BPSPL Pontianak dengan Politeknik Negeri Pontianak (No. B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025 dan No. 4172/PL16/KS.00.00/2025) tanggal 28 April 2025.

Inisiasi tersebut telah melalui serangkaian peninjauan dan pembahasan judul, ruang lingkup, dan rencana aksi kerja sama yang telah disepakati dengan Mitra Konservasi. Berdasarkan draft final dokumen PKS yang telah disepakati oleh BPSPL Pontianak dengan masing-masing Mitra Konservasi, dilakukan finalisasi kerjasama melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kerjan Sama (PKS). Penandatanganan dokumen PKS antara BPSPL Pontianak dengan Mitra Konservasi menjadi tonggak

penting dalam perjalanan konservasi terhadap ekosistem dan biota perairan yang dilindungi khususnya di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebanyak 4 kesepakatan, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai sebanyak 1 kesepakatan. Capaian yang relatif rendah pada Tahun 2024 disebabkan karena indikator tersebut masih merupakan IKU pengembangan dari IKU Kerja Sama, Jejaring, dan/atau Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, sehingga pelaksanaannya masih berada pada tahap awal. Pada Tahun 2025, capaian IKU tersebut mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan semakin matangnya perencanaan, penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatnya komitmen mitra dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Kesepakatan Tahun 2024	Nomor	Kesepakatan Tahun 2025	Nomor
1.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman	B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan B583/UN17.6/KS/2024	Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura	B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 1157/UN22.3/P.M.01.01/2025
2			Yayasan Webe Konservasi Ketapang	B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 14.008/WBE.KTG/II/2025
3			Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia	B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 001/PK-KTG/II/2025
4			Politeknik Negeri Pontianak	B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025 dan 4172/PL16/KS.00.00/2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator ini dengan target nasional, BPSPL Pontianak membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Capaian Kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar 4 kesepakatan, sedangkan pada capaian BPSPL Denpasar tidak ada indikator Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap mampu mendorong pencapaian target kinerja pada akhir tahun. Keberhasilan tersebut didukung oleh terjalannya kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, yang ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, dan Politeknik Negeri Pontianak. Kolaborasi ini berperan dalam memperkuat sinergi pelaksanaan program, memperluas jejaring kemitraan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan konservasi.

Sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan capaian, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerja sama terus dilakukan secara berkala guna memastikan kesepakatan yang telah ditandatangani dapat diimplementasikan secara optimal.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta penguatan koordinasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan pemanfaatan pertemuan daring menjadi upaya strategis dalam menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sinergi dengan mitra kerja memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Capaian IKU Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 dengan target 1 Kesepakatan dan tercapai 4 kesepakatan. BPSPL Pontianak melaksanakan inisiasi kerjasama dengan 4 Mitra Konservasi, sementara itu, Renstra DJPK 2029 tidak memiliki indikator yang sama, sehingga tidak dapat dibandingkan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu:

a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Nomor B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 1157/UN22.3/PM.01.01/2025 Tentang Penguatan Pengelolaan Konservasi ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Webe Konservasi Ketapang Nomor B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 14.008/WBE.KTG/II/2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Nomor B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 001/PK-KTG/II/2025 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah di Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Politeknik Negeri Pontianak Nomor B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025 dan 4172/PL16/KS.00.00/2025 Tentang Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

b. Pembahasan Rencana Kerja Tahunan pada Perjanjian Kerja Sama.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dengan Periode Semesteran.

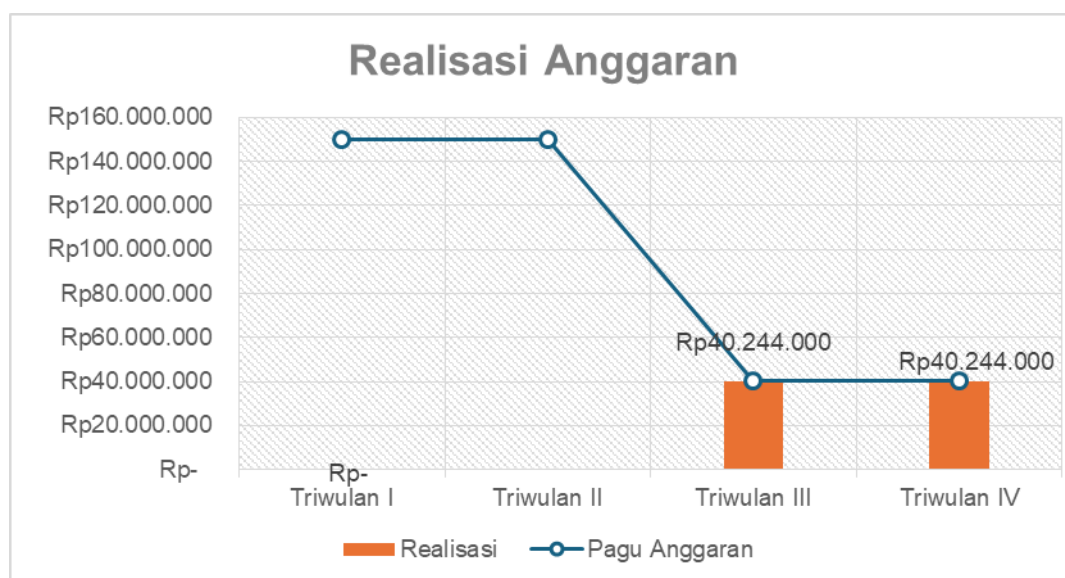
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan dengan pagu anggaran sebesar Rp40.224.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp40.224.000	Rp40.224.000 (1000%)	-
TOTAL		Rp40.224.000	Rp40.224.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp. **40.224.000** atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp40.224.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.



Gambar. 3.1.4-1. Grafik Realisasi Anggaran IKU 4 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dapat dilihat pada keikutsertaan semua gender pada pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penandatanganan kesepakatan kerja sama.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam menunjang IKU diatas adalah penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kerja Sama yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak, YIARI, Yayasan WeBe, Politeknik Negeri Pontianak dan Universitas Tanjungpura.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah **7 (tujuh) jenis** yaitu *Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut*. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Pesut, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Tahun 2025

SK-5	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
8	7	10	-	7	120	8	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Target capaian sebanyak 7 (tujuh) jenis, yaitu Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, capaian yang berhasil direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) jenis, yang meliputi Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, Mamalia Laut, Buaya, Penyu, dan Pari Manta. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 9/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis). Dengan demikian, target penanganan biota dilindungi telah tercapai dan terlampaui, yang menunjukkan peningkatan kinerja dalam upaya perlindungan dan pengelolaan jenis ikan terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, capaian kinerja IKU tercatat sebanyak 8 jenis dari target 7 jenis, sehingga target telah terlampaui. Jika dibandingkan dengan Tahun 2025, capaian IKU menunjukkan peningkatan menjadi 10 jenis biota dilindungi yang berhasil ditangani. Peningkatan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya penanganan Buaya yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menambah jenis biota dilindungi yang dikelola oleh KKP. Hal ini mencerminkan adanya perluasan ruang lingkup penanganan biota dilindungi serta peningkatan kinerja pengelolaan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit perbandingan tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10 Jenis. Sementara itu, BPSPL Denpasar tidak memiliki IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian ini didukung oleh penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, mitra konservasi, serta masyarakat, meningkatnya intensitas kegiatan pendataan dan penyadartahuan, serta respon cepat terhadap penanganan biota dilindungi di lapangan. Selain itu, integrasi berbagai pendekatan kegiatan konservasi memungkinkan perluasan jenis biota yang ditangani, sehingga target IKU tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampak menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses. Melalui jejaring ini, koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra terkait dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga meminimalkan kebutuhan mobilisasi sumber daya, waktu, dan biaya penanganan, tanpa mengurangi kualitas respons terhadap kejadian biota terdampak.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Target capaian kinerja dalam penanganan Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan melalui kegiatan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) jenis. Sedangkan pada Renstra DJPK 2029 target yang harus dicapai sebesar 8 (delapan) jenis, sehingga realisasi yang dicapai sebesar 125%

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Tahun 2025 yaitu:

a. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat;

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 2-6 Juli 2025 di Kabupaten Kubu Raya. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah dimulai dari proses pengambilan data secara purposive

sampling terhadap responden. Responden diantaranya pengepul ikan hias di Pontianak, Pengepul ikan Kubu Raya dan beberapa warga yang berada di sekitar Rasau ,Bintang mas dan Sungai Kakap, selain itu juga dilakukan proses FGD pada tanggal 5 Juli 2025. Proses pengambilan data melalui proses wawancara meliputi habitat, waktu penangkapan dan ukuran yang biasa tertangkap.

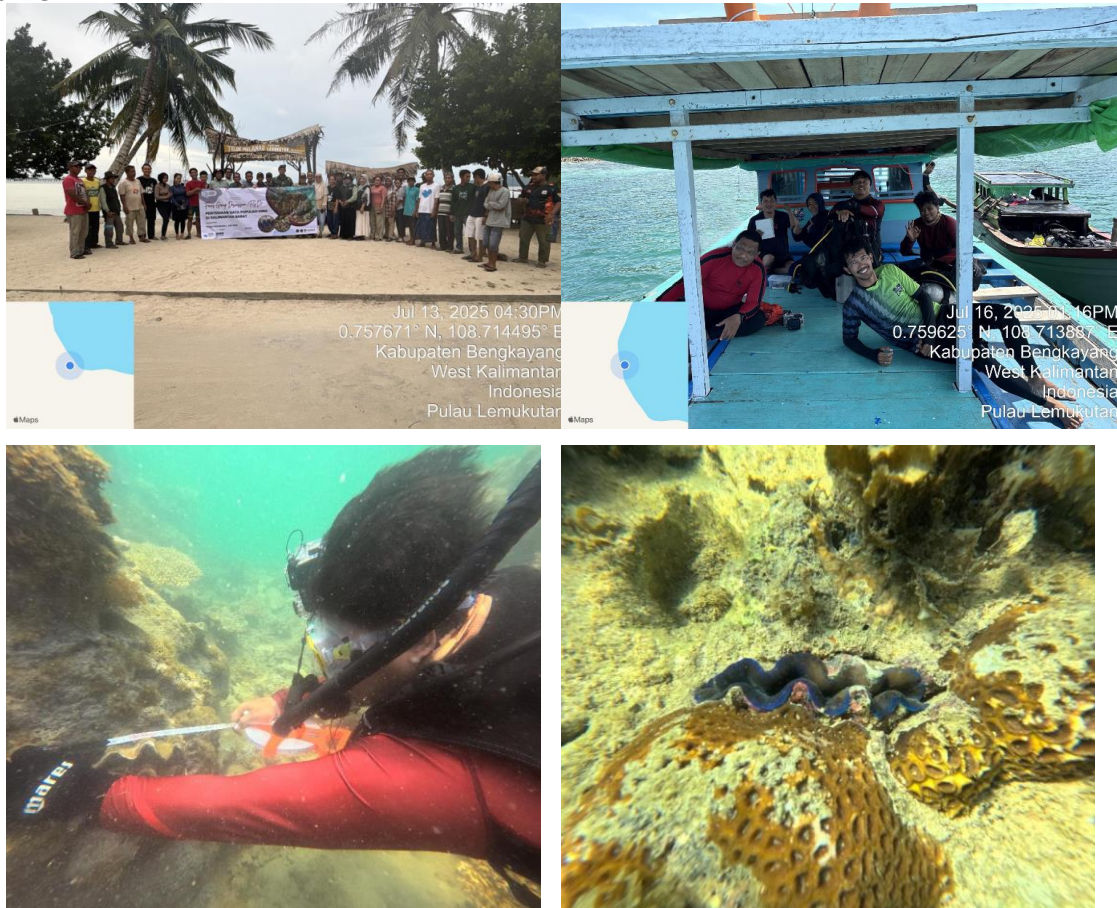
Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara tersebut didapatkan daerah habitat dari Pari Air Tawar di Lokasi Kab. Kubu Raya, lalu dilakukan proses survei dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing dan rawai, berdasarkan hasil survey melalui penangkapan tersebut didapatkan sebanyak 2 ekor Pari Air Tawar dengan jenis spesies



Gambar 3.1.6-1. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat

b. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat dilaksanakan pada Tanggal 16-20 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt transect pada 4 stasiun. Stasiun pengamatan Teluk Surau, Teluk Maknon, Pulau Randayan, dan Tanjung Merohom.

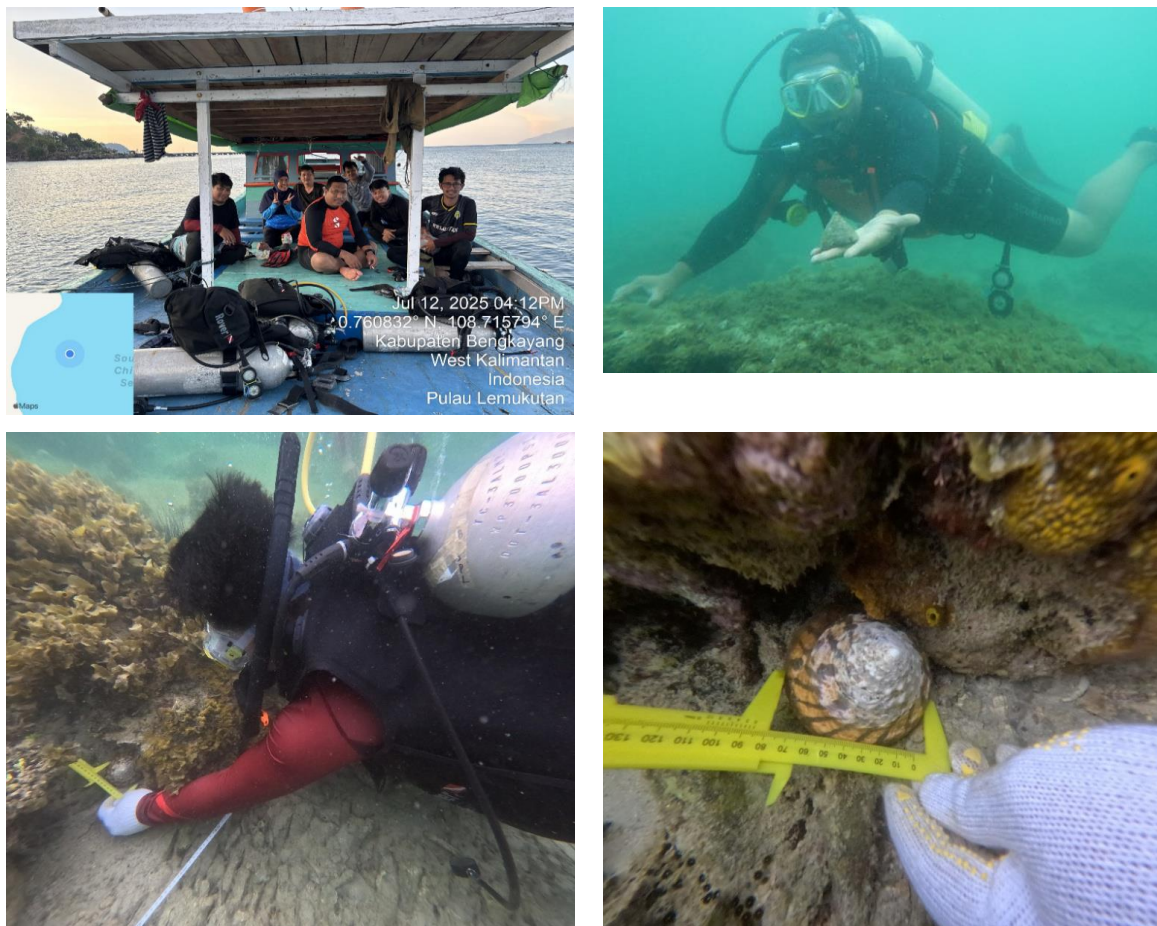


Gambar 3.1.6-2. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan pada Stasiun 1 ditemukan kima lubang (*Tridacna crocea*), sebanyak 38 ekor, Kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 30 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 123 Ekor. Stasiun 2 ditemukan kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 34 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 25 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 18 ekor. Pada Stasiun 3 didapatkan hasil kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 22 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 10 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 6 ekor; Stasiun 4 didapatkan kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 52 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 29 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 5ekor.

c. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat.

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat dilaksanakan pada Tanggal 10-15 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt transect pada 4 Stasiun. Lokasi Stasiun penelitian berada di Tanjung Jati, Penata Besar dan Tanjung Batu Bedaun dan Melanau Timur.



Gambar 3.1.6-3. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pada stasiun 1 ditemukan sebanyak Pada transek 1 didapatkan lola 5 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 4 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 3 ekor; Pada stasiun 2 ditemukan sebanyak pada transek 1 didapatkan lola 8 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 5 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 2 ekor. Pada Stasiun 3 didapatkan sebanyak 28 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 14 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 6 ekor sebanyak 28 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 14 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 6 ekor. Pada stasiun 4 didapatkan sebanyak 13 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 7 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 2 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 4 ekor.

d. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat.

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat dilaksanakan pada 28 Juli 3 Agustus 2025 di Kab. Mempawah, Kota Singkawang dan Kab. Sambas Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di sepanjang pesisir Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, diperoleh total sebanyak 46 sampel ikan terubuk, yang diantaranya sebanyak 12 sampel dari Kabupaten Mempawah, 8 sampel dari Kota Singkawang, dan 26 sampel dari Kabupaten Sambas. Selain itu, Tim juga mendapat jenis ikan yang mirip dengan ikan Terubuk, dimana masyarakat lokal menyebutnya ikan Selangat maka diperoleh total sebanyak 46 sampel ikan terubuk yang selanjutnya akan dilakukan sampling untuk analisis/uji DNA guna mengetahui keragaman spesies

- Berdasarkan hasil wawancara serta FGD dengan nelayan dan masyarakat, diketahui bahwa ikan terubuk ditangkap dengan menggunakan jaring insang dengan ukuran mata jaring 2-3 inch. Ikan terubuk bukan merupakan target utama nelayan, namun pada musimnya hasil tangkapan ikan terubuk bisa mendominasi jumlah tangkapan nelayan, hingga 70% dari hasil tangkapan. Adapun musim puncak ikan terubuk berkisar antara bulan Juni hingga September yaitu pada saat musim angin Selatan. Harga ikan terubuk berbeda-beda pada setiap ukuran, dan rentang harga tersebut juga berbeda-beda di tiap daerah. Ikan terubuk hasil tangkapan dari Perairan Mempawah dan Sambas pada umumnya diperdagangkan ke Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Lebih lanjut perlu dilakukan analisis terhadap hasil wawancara yang akan dituangkan dalam laporan final kegiatan.

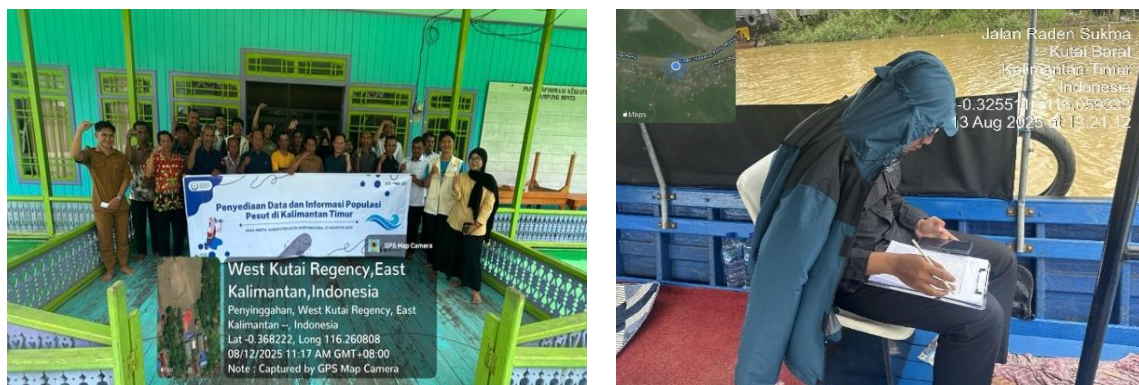


Gambar 3.1.6-4. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat

e. Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur dilaksanakan pada 12-15 Agustus 2025 di luar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2025 tidak ditemukan keberadaan Pesut Mahakam selama dilakukan kegiatan survei di luar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu adapun hasil dari *Observation Effort Form*.



Gambar 3.1.6-5. Dokumentasi Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur

- Kegiatan dilanjutkan pada hari kedua tanggal 13 Agustus 2025, tim melakukan pemantauan di wilayah Penyinggahan - Muhur - Ngudupan - Tepiang Ulaq - Teluk Tempudau - Sebelang - Muara Pahu - Sungai Kedang Pahu – Muara Belolan - Gunung Bayan - Sungai Kedang Pahu. Kami tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam. Pada kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan di Sungai Mahakam, yang menangkap ikan menggunakan alat setrum.
- Pada survei tanggal 14 Agustus 2025 kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penelusuran di Sungai Kedang Pahu-Belolan-Sungai kedang Pahu- Sebelang- Teluk Tempudau-Tepiang Ulaq- Ngudupan- Muhur- Penyinggahan.Kami tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam. Pada kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan khususnya di anak Sungai Kedang Pahu seperti menangkap ikan dengan cara memancing.Selain itu pada survei hari ini juga kami bertanya kepada dua nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan rengge dari bahan nilon sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi dari nelayan tersebut terakhir dia melihat Pesut sekitar 1 tahun yang lalu.
- Pada tanggal 15 September 2025 kegiatan survey dilakukan di Penyinggahan-Minta-Bakung-Loa Deras. Pada survei hari ini tim tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam di sepanjang jalan survei. Selain itu pada survei hari ini juga kami bertanya kepada satu nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan rengge dari bahan nilon sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi dari nelayan tersebut terakhir dia melihat Pesut sekitar 3 bulan yang lalu.

f. Penanganan Biota Perairan Dilindungi

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Biota Perairan Dilindungi pada Tahun 2025 ini yang dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Selama tahun 2025 tercatat 136 (seratus tiga puluh enam) informasi kejadian terkait penanganan biota dilindungi dan/atau terancam punah baik yang terdampar maupun perlu penanganan respon cepat
- Terdapat 10 (sepuluh) jenis/kategori biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu Buaya, Lumba-Lumba, Dugong, Penyu Sisik, Penyu Hijau, Hiu Paus, Pari Manta, Pesut, Pari Air Tawar;
- Sebanyak 117 (seratus tujuh belas) laporan kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1) dan 19 (sembilan belas) laporan/kejadian merupakan biota dengan kondisi mati kode 2, 3, dan 4; dan
- Penanganan biota dalam kondisi hidup jenis buaya yang masih banyak menemukan kendala di lapangan. Pelibatan Instansi lain seperti BKSDA, BPBD, Damkar serta Masyarakat dapat mempermudah dalam proses penanganan di lapang. Sedangkan pada kejadian paus pilot,

serta penyu terdampar dikarenakan lokasi yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendataan lebih lanjut, juga beberapa laporan tidak dapat dilakukan penguburan terhadap biota yang mati dikarenakan kondisi alam yang kurang mendukung sehingga tidak dapat ditangani sebagaimana mestinya. Untuk penyu yang terdampar oleh pelapor kemudian dilakukan pendataan serta penguburan di sekitar lokasi penemuan bangkai dengan mempertimbangkan pasang tertinggi. Terdapat 2 laporan terkait pari air tawar di Kabupaten Kutai Barat, di mana satu laporan menginformasikan bahwa biota pari yang ditemukan sudah dikonsumsi oleh warga sehingga tidak dapat dilakukan pendataan lebih lanjut. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait biota dilindungi. Untuk 1 laporan lainnya sampel biota berhasil diamankan dan kemudian dilakukan pendataan oleh tim wilker Mahakam ulu. Sedangkan 2 laporan lainnya terkait kemunculan pari manta menjadi informasi untuk basis data keberadaan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak



Gambar 3.1.6-6. Dokumentasi Penanganan Biota Perairan Dilindungi

g. Pembuatan Stock Center Karang.

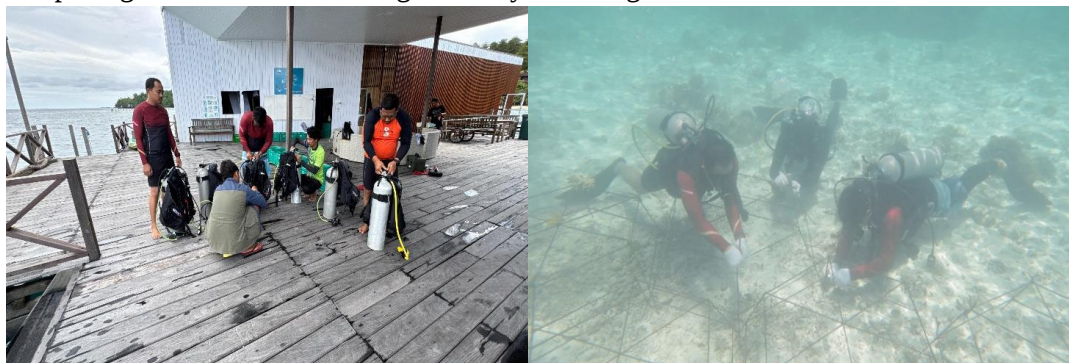
Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Stock Center Karang dilakukan pada 2 Lokasi yaitu lokasi di Pulau Lemukutan Kalimantan Barat dan Pulau Maratua Kalimantan Timur.

- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Lemukutan dilakukan pada tanggal 22-26 Agustus 2025. Kegiatan melibatkan BPSPL Pontianak, Orca Diving Club dan perwakilan masyarakat Pulau Lemukutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Pantai Barat Pulau Lemukutan, media transpalntasi yang digunakan adalah rak spider web sebnyak 20 unit. Bibit yang digunakan yaitu dari genus *Acropora* sp dan *Porites* sp. Pengambilan bibit untuk fragmen karang dilakukan dengan memotong fragmen pada koloni karang *Acropora* kemudian diletakkan di dalam keranjang dan disusun dengan baik sehingga tidak menumpuk satu dengan yang lainnya untuk menghindari bibit karang patah (rusak). Fragmen karang kemudian diangkut ke daerah pantai menggunakan speed boat untuk diikat pada rangka spider. Pengikatan dilakukan pada daerah yang masih tergenang air laut untuk menghindari fragmen karang mengalami stres yang berlebihan selanjutnya dilakukan penanaman bibit karang pada media tanam tersebut.



Gambar 3.1.6-7. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Barat

- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Maratua Kalimantan Timur dilakukan pada tanggal 12-18 Agustus 2025. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Desa Payung-Payung, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada koordinat 02°12'10.1" LU; 118°35'25.2" BT. Jumlah media transplantasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inisiasi coral stock center di Pulau Maratua ini adalah 50 rak dengan jumlah bibit yang ditanam per media adalah 16 pcs sehingga total jumlah bibit yang ditanam sebanyak 800 fragmen bibit karang. Media transplantasi karang rak besi Spider adalah sebuah kerangka besi yang dibuat menyerupai jaring laba-laba (spider web) untuk menampung dan menumbuhkan fragmen karang di dasar laut. Rangka ini dibuat dari besi berukuran 12 mm yang dipotong dan dilas sebagai perekat substrat agar fragmen karang yang diikatkan tidak mudah bergeser dan bisa tumbuh dengan baik. etode atau teknik transplantasi Mars Accelerated Coral Reefs Rehabilitation System (MARRS) atau hexaframe (kerangka jaring laba-laba) ini adalah dengan menggunakan struktur besi jaring laba-laba tempat karang menempel. Desain ini dirancang untuk menstabilkan terumbu karang, membatasi reruntuhan karang dan menyediakan substrat untuk habitat pemulihan, serta peningkatan alami keanekaragaman hayati karang.





Gambar 3.1.6-8. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Timur

- Indukan karang yang digunakan dalam transplantasi dapat didasarkan oleh penentuan jenis dari beberapa aspek yaitu salah satunya keberhasilan aspek, jenis-jenis karang yang dapat transplantasi diantaranya yaitu *Acropora* spp, *Pocillopora* spp, *Montipora* spp, *Porites* spp, *Echinopora* spp, *Turbinaria* spp. Bibit karang yang digunakan untuk transplantasi adalah karang yang telah dipotong menjadi beberapa bagian (fragmen karang).

8. Realisasi Anggaran

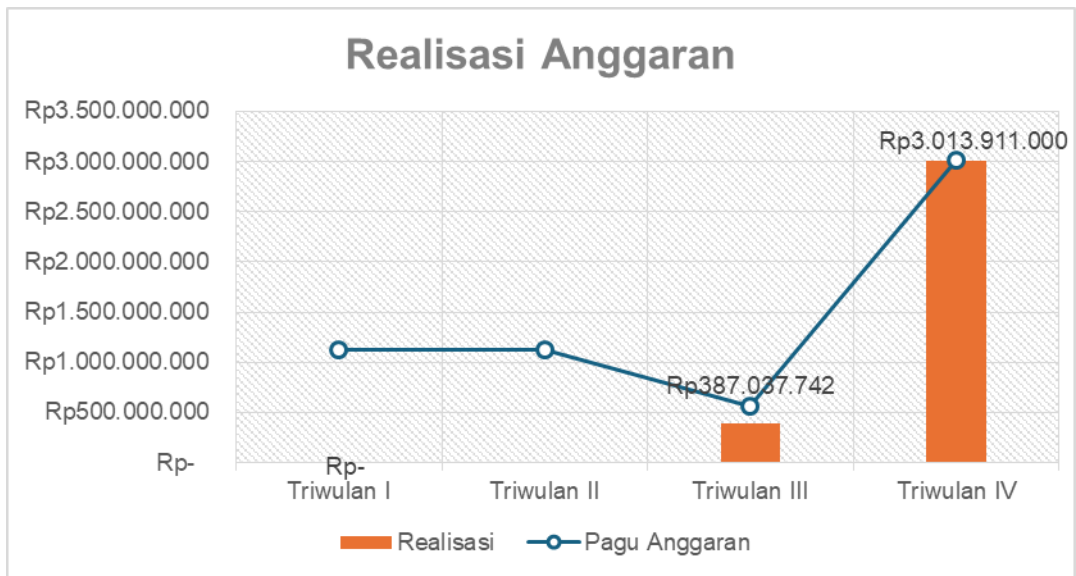
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan dan [2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan total anggaran sebesar Rp1.122.690.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	Rp183.026.000	Rp183.026.000 (100%)	-
2	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp1.180.885.000	Rp1.180.885.000 (100%)	-
TOTAL		Rp3.013.911.000	Rp3.013.911.000 (100%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp. 3.013.911.000** atau 69,00% dari pagu anggaran sebesar **Rp 3.013.911.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.6-9. Grafik Realisasi Anggaran IKU 5 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Seluruh kegiatan yang menunjang IKU 5 telah dilaksanakan, selanjutnya melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Pengelolaan Kelautan (DJPK) terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Selain itu juga melakukan penanganan jenis ikan dilindungi yang terdampak apabila ada kasus.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Dasar hukum kegiatan ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah *Hiu Appendiks*, *Pari Appendiks*, *Teripang* dan *Arwana* di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
8	4	9	-	4	120	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, 30 Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 meliputi pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES, dan *look alike species* melalui verifikasi SIPJI, SAJI, serta pemberian rekomendasi yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pada Tahun 2025, kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan telah dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) jenis, yaitu Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, Arwana Formosus, Napoleon, Pari Air Tawar, Buaya, Belida, dan Arwana Brazil. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 12/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Laporan Kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan. Selain itu, kegiatan pendukung lainnya yang turut dilaksanakan meliputi survei pemanfaatan Buaya di Kalimantan

Utara, evaluasi layanan perizinan, pemeriksaan pemanenan dan stok jenis ikan, pemeriksaan penandaan ikan arwana, serta pemeriksaan keberangkatan ikan..

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Pada Tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebanyak 9 (sembilan) jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 8 (delapan) jenis, maka progres kegiatan mengalami peningkatan sebanyak 1 (delapan) jenis. Peningkatan capaian tersebut disebabkan oleh adanya penambahan penanganan terhadap Buaya dan Pari Air Tawar, yang sebelumnya belum termasuk dalam capaian kinerja pada Tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) sebanyak 9 jenis dengan target 4 (empat) jenis. Sementara itu, BPSPL Denpasar capaian kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (jenis) sebesar 7 (tujuh) jenis dengan target 5 (lima) jenis. Sehingga jika dibandingkan capaian kinerjanya BPSPL Pontianak lebih tinggi dari BPSPL Denpasar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan perizinan jenis ikan pada Tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi perizinan dilakukan secara selektif dan terjadwal, sehingga mampu menekan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu, pemanfaatan komunikasi dan koordinasi daring dengan pemohon serta instansi terkait turut mendukung percepatan proses perizinan, meningkatkan kepastian layanan, dan memastikan pelayanan perizinan jenis ikan berjalan secara efektif dan efisien.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Target Capaian Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) jenis. Sementara pada Renstra DJPK ada perbedaan satuan pada indikator kinerja tersebut, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Tahun 2025 diantaranya:

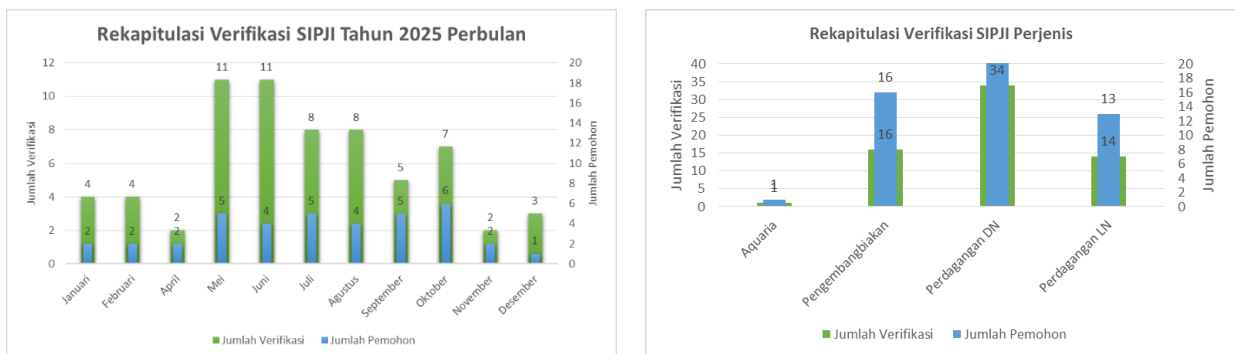
a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2025 (Januari – Desember) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ **Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)**

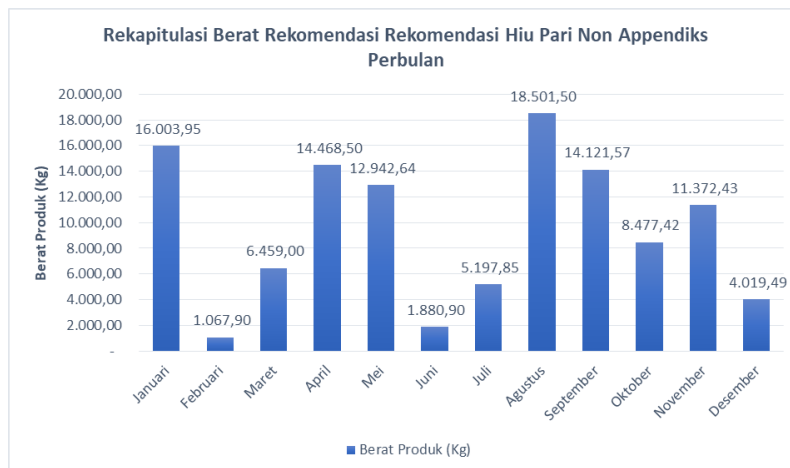
Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 65 BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan pelaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Mei dan Juni dengan jumlah masing-masing sebanyak 11 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri.



Gambar 3.1.6-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025

➤ **Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi**

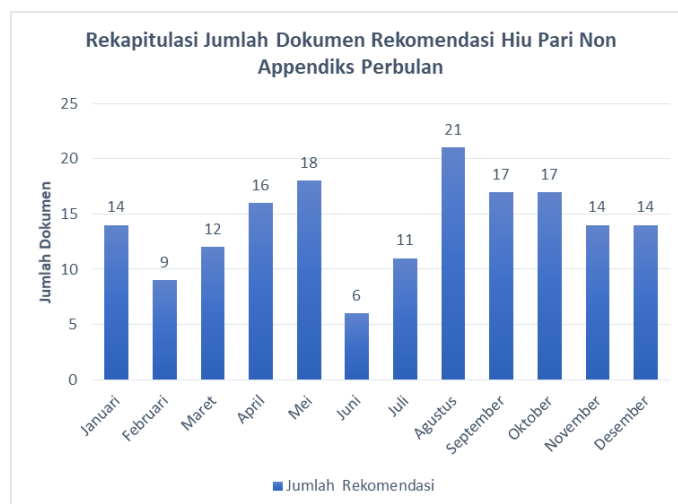
Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.



Gambar 3.1.6-2. Berat Total Hiu Pari Look Alike Species

Selama Tahun 2025 terdapat total 169 Surat Rekomendasi hiu dan pari *look like species*. Surat rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Tahun 2025 berada pada bulan agustus sebanyak 22 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau berdasarkan data rekapitulasi perdagangan periode januari sampai desember 2025 total lalu lintas produk hidup untuk komoditas hiu dan pari non-ependiks mencapai 134 ekor. Puncak pengiriman produk hidup terjadi pada bulan agustus sebanyak 22 ekor, diikuti bulan juni sebanyak 19 ekor serta bulan februari dan juli masing-masing mencatat pengiriman sebanyak 16 ekor. Sebaliknya volume pengiriman produk hidup terendah tercatat pada bulan april hanya 1 ekor produk yang dilalu lintaskan.

Berdasarkan data rekapitulasi perdagangan rekomendasi dalam negeri (DN) untuk komoditas hiu dan pari non-appendiks selama tahun 2025 didistribusikan aktivitas pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak menunjukkan karakteristik yang berbeda di setiap provinsi. Kalimantan Selatan merupakan kontributor utaman volume berat produk dengan total mencapai 38.449,00 kg yang dikelola oleh 8 pengusaha melalui 41 dokumen SAJI. Sementara itu, Kalimantan Utara mendominasi pengiriman specimen dalam kondisi hidup dengan total 55 unit, sekaligus menempati posisi kedua untuk volume berat produk sebesar 29,784,85 kg. provinsi Kalimantan barat mencatat volume berat produk sebesar 24,218,48 kg dari 5 pengusaha tanpa adanya lalu lintas hidup, sedangkan Kalimantan tengah melalulintaskan 15,948,82 kg produk melalui 27 dokumen saji. Adapun Kalimantan timur mencatat volume berat produk terkecil yaitu 6,112,00 kg, namun tetap aktif dalam pengiriman produk hidup sebanyak 49 unit dengan frekuensi penerbitan dokumen yang cukup tinggi sebanyak 42 SAJI. Secara kumulatif, seluruh wilayah kerja telah melayani 30 pengusaha dengan total volume perdagangan mencapai 114,513,15 kg dan 134 unit produk hidup nyang seluruhnya terdokumentasi dalam 169 dokumen saji.



Gambar 3.1.6-3. Jumlah Surat Rekomendasi Hiu dan Pari

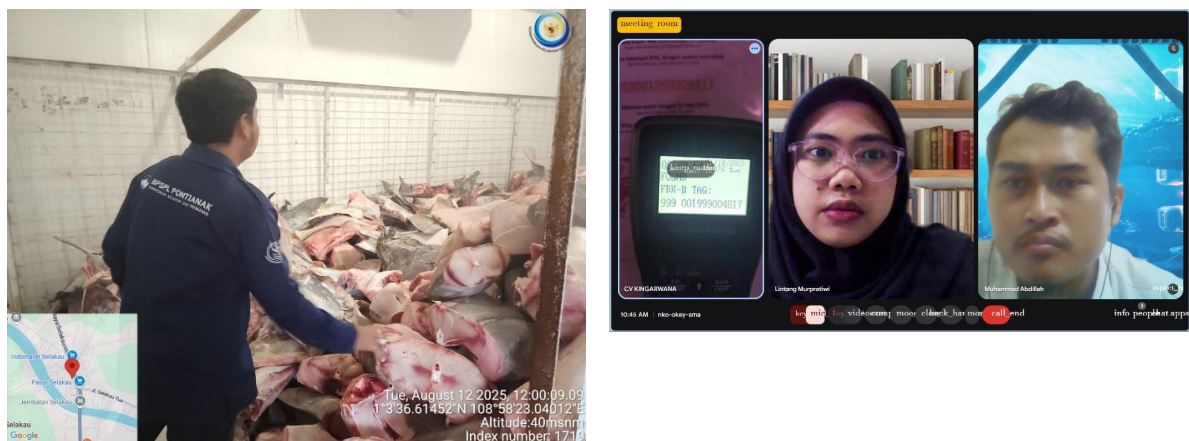
Selama tahun 2025, jumlah pelaku yang aktif sebanyak 30 orang. Dari total 30 orang tersebut, tersebar diseluruh provinsi di pulau Kalimantan dan jumlah terbanyak berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara sebanyak 8 pelaku usaha. Rekapitulasi tujuan surat rekomendasi hiu dan pari didominasi kepada pelaku usaha dalam negeri dengan 8 provinsi tujuan. Tujuan dalam negeri paling banyak yakni menuju Jawa Timur dengan total 56 surat rekomendasi, sementara paling sedikit menuju ke Bali dan Sumatera Utara sebanyak 6 surat rekomendasi.

Surat rekomendasi dalam negeri teripang, sepanjang periode januari hingga desember terdapat 79 surat rekomendasi yang telah diterbitkan. Jumlah surat rekomendasi terendah sebanyak 4 surat di bulan februari dan tertinggi pada bulan juli sebanyak 10 surat. Total produk yang diterbitkan surat rekomendasi selama satu tahun mencapai 26.720,20 kg. berat tertinggi tercatat pada bulan juni dan juli masing-masing sebesar 3.469,22 kg dan 3.285,79 kg sedangkan berat terendah terjadi pada bulan februari dan desember.

Surat rekomendasi luar negeri hiu dan pari Look A Like Species berdasarkan rekapitulasi perdagangan rekomendasi LN hiu dan pari non-Appendiks berdasarkan rekomendasi terbit per bulan, sepanjang periode pelaporan tercatat total 8 rekomendasi dengan volume perdagangan sebesar 6.319 kg yang melibatkan 4 pelaku usaha. Dari sisi berat produk, volume terbesar tercatat pada desember sebesar 259,32 kg dengan 2 rekomendasi dan 2 pelaku usaha, yang menunjukkan peningkatan aktivitas pada akhir tahun. Surat rekomendasi luar negeri teripang berdasarkan rekapitulasi rekomendasi luar negeri teripang non-Appendiks (look-alike species), sepanjang periode pelaporan hanya tercatat 1 rekomendasi dengan total berat 64.2 kg yang melibatkan 1 pelaku usaha. Disisi waktu, kegiatan perdagangan hanya terjadi pada bulan januari, yang menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan dan perdagangan teripang non-Appendiks bersifat sangat terbatas dan belum berlangsung secara rutin sepanjang tahun.

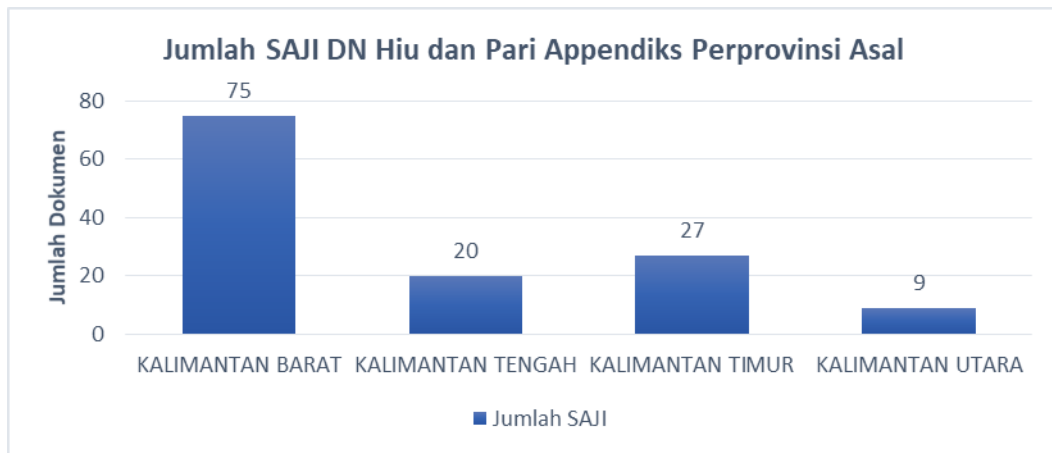
➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)*

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.6-4. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Tahun 2025 terdapat 131 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan desember dengan total sebanyak 24 surat merupakan puncak penerbitan saji yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perdagangan atau pengajuan izin menjelang akhir tahun. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari tahun 2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 75 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Timur dengan 27 surat dan Kalimantan Tengah sebanyak 20 saji, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1.6-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari Perprovinsi

Jenis produk yang dilalulintaskan menggunakan SAJI DN hiu dan pari terdapat 5 jenis yakni daging, hidup/utuh, kulit, sirip dan tulang. Jenis produk yang paling dominan adalah sirip dengan berat 19.366,29 kg dan jumlah saji paling tinggi yaitu 109 SAJI, yang menunjukkan bahwa komoditas sirip menjadi focus utama dalam perdagangan hiu dan pari Appendiks serta memiliki intensitas permohonan dokumen yang sangat tinggi.

Surat angkut jenis ikan dalam negeri jenis napoleon berdasarkan hasil rekapitulasi SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis ikan Napoleon selama periode tahun 2025 adalah sebanyak 8 SAJI. Produk ini berasal dari Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari produk ini yaitu ke Kota Bali, Makassar dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) selama tahun 2025 adalah sebanyak 1.588 dokumen untuk arwana Kalimantan, 300 dokumen untuk Arwana Silver, 110 dokumen untuk saji barang bawaan dan 9 dokumen saji manual untuk keperluan penelitian atau kontes. Selain itu, telah dilakukan verifikasi lapangan SAJI Luar negeri dengan menerbitkan 818 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Kalimantan dan 114 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Silver. Selanjutnya telah dilakukan pula verifikasi hasil pemanenan ikan arwana dengan total 587 dokumen BAP, serta diterbitkan sertifikasi hasil pemanenan ikan arwana sebanyak 232.018 sertifikat.



Gambar 3.1.6-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

➤ Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

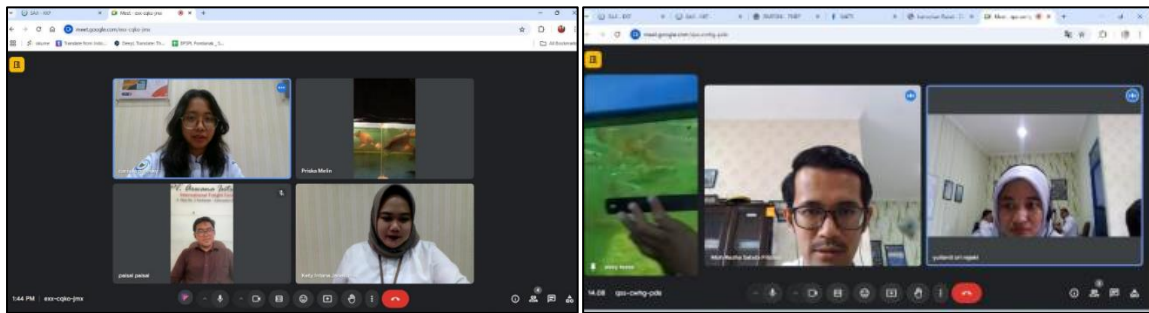
Berdasarkan rekapitulasi SAJI barang bawaan berdasarkan bulan, sepanjang periode pelaporan tercatat total 110 SAJI yang diterbitkan dengan jumlah 179 ekor ikan dan melibatkan 86 pemohon. Aktivitas penerbitan SAJI menunjukkan fluktuasi bulanan, dengan jumlah SAJI tertinggi terjadi pada Januari sebanyak 17 SAJI, diikuti Februari dan Juli masing-masing 14 SAJI, serta Maret sebanyak 11 SAJI. Sebaliknya, jumlah SAJI terendah tercatat pada September yaitu 3 SAJI, yang sejalan dengan rendahnya jumlah ikan dan pemohon pada bulan tersebut. Dari sisi jumlah ikan, volume tertinggi terjadi pada

Februari (25 ekor) dan Januari (24 ekor), sementara jumlah ikan paling sedikit tercatat pada September sebanyak 3 ekor. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas pengajuan SAJI barang bawaan cenderung lebih tinggi pada awal tahun dan pertengahan tahun, serta relative menurun pada bulan-bulan tertentu, yang mengindikasikan bahwa pergerakan barang bawaan sangat dipengaruhi oleh mobilitas pemohon dan intensitas perjalanan pada periode tertentu.

➤ Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

Peran BPSPL Pontianak dalam pelayanan publik dokumen ketelusuran tidak hanya terbatas pada penerbitan surat rekomendasi dan SAJI DN saja, BPSPL Pontianak juga melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Selama Periode tahun 2025 berdasarkan hasil rekapitulasi aplikasi E-SAJI telah terbit sebanyak 818 BAP SAJI LN Arwana Kalimantan

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEKP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.6-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Jenis produk dari SAJI LN Arwana Kalimantan merupakan jenis arwana hidup, dengan total sebanyak 146.358 ekor, yang berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jumlah pelaku usaha aktif pada Periode tahun 2025 sebanyak 20 pelaku usaha, dimana 19 pelaku usaha berasal dari Kalimantan Barat.



Gambar 3.1.6-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah ikan terbanyak berada pada bulan Desember dengan jumlah 19.917 ekor, sementara paling sedikit berada pada bulan April dengan jumlah hanya sebanyak 6.349 ekor. Strain Arwana Kalimantan

pada Periode tahun 2025 untuk SAJI LN terdiri hanya dari 4 (empat) yakni super red sebanyak 144.508 ekor, Golden sebanyak 145 ekor, Green sebanyak 20 ekor dan banjar red sebanyak 1.685 ekor (Tabel 26). Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara, dimana China merupakan negara paling banyak dengan 430 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 123 SAJI, dan Taiwan sebanyak 69 SAJI.

Berdasarkan rekapitulasi perdagangan DN arwana Brazil berdasarkan bulan terbit SAJI, sepanjang periode pelaporan diterbitkan sebanyak 114 SAJI. Penerbitan dokumen berfluktuasi antarbulan, dengan jumlah SAJI tertinggi terjadi pada November sebanyak 18 SAJI, diikuti Oktober (17 SAJI) dan Desember (13 SAJI). Sementara itu, jumlah SAJI terendah tercatat pada Agustus yaitu 4 SAJI dan Juli sebanyak 5 SAJI. Pola ini menunjukkan bahwa intensitas penerbitan SAJI cenderung meningkat pada paruh akhir tahun, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan permohonan dokumen pada periode tersebut. Dari sisi jumlah ikan, total arwana Brazil yang diperdagangkan sepanjang tahun mencapai 482.144 ekor. Volume tertinggi tercatat pada Oktober sebesar 106.800 ekor, disusul November (64.636 ekor) dan Juni (46.120 ekor), yang menunjukkan puncak distribusi pada bulan-bulan tersebut. Sebaliknya, jumlah ikan paling sedikit terjadi pada Juli yaitu 11.100 ekor, diikuti Maret (17.600 ekor) dan Mei (18.203 ekor). Variasi jumlah ikan antarbulan ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas produksi dan distribusi, serta menunjukkan bahwa peningkatan jumlah SAJI tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah ikan yang diperdagangkan pada setiap bulan.

➤ Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendix CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi internasional.



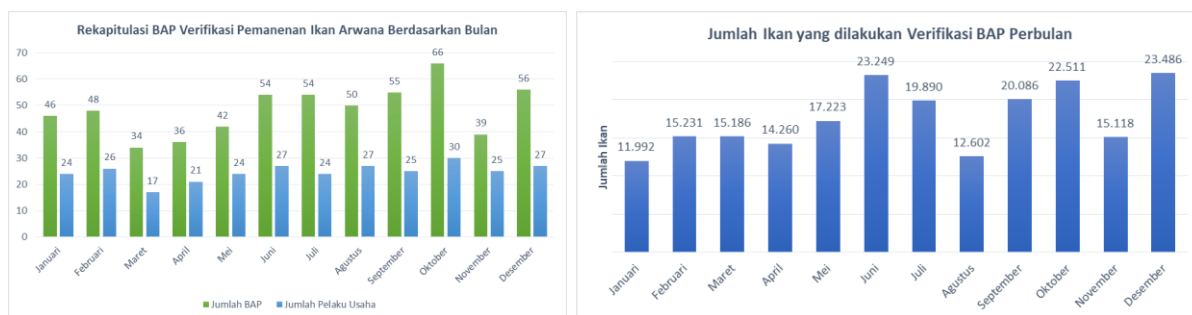
Gambar 3.1.6-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 587 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Juli sebanyak 54 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 66 BAP. Ditinjau dari lokasi pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 232.957 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan oktober

dengan 27.957 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan Januari dengan 5.629 sertifikat. Sedangkan dari Januari sampai dengan Tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 232.018 Sertifikat.

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Selama tahun 2025 total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 743 dokumen dengan 130.144 ekor arwana. Dari sisi jumlah ikan, pemeriksaan terbanyak terjadi pada Maret sebanyak 16.535 ekor, diikuti April (12.972 ekor) dan Februari (12.676 ekor), sementara jumlah ikan paling sedikit tercatat pada Januari yaitu 5.326 ekor. Dari sisi jumlah permohonan, permohonan tertinggi terjadi pada Maret sebanyak 89 permohonan, disusul Februari (77 permohonan) dan Oktober (70 permohonan), sedangkan permohonan terendah tercatat pada Januari sebanyak 34 permohonan. Adapun keterlibatan pelaku usaha relative merata, dengan jumlah tertinggi pada Mei sebanyak 18 pelaku usaha, serta terendah pada Januari sebanyak 10 pelaku usaha. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan penandaan ikan arwana cenderung meningkat pada awal hingga pertengahan tahun dan tetap konsisten hingga akhir tahun, mencerminkan kesinambungan aktivitas produksi dan pengawasan di tingkat pelaku usaha..



Gambar 3.1.6-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Proses pemeriksaan keberangkatan merupakan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dengan jenis dan jumlah ikan yang dikirim. Selama Periode tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.702 dokumen SAJI dengan total ikan terkirim sebanyak 1.186.715 ekor.

➤ *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Berdasarkan rekapitulasi nilai transaksi per bulan, baik melalui pencatatan manual maupun sistem Simponi, total nilai yang tercatat sepanjang tahun adalah Rp2.227.693.035,00, dengan nilai yang sepenuhnya konsisten dan identik antara kedua metode pencatatan pada setiap bulan. Hal ini menunjukkan kesesuaian data dan validitas pencatatan antara sistem manual dan Simponi tanpa adanya selisih. Dari sisi tren bulanan, nilai transaksi tertinggi tercatat pada Desember sebesar Rp 214.974.212,00, diikuti November (Rp208.646.210,00) dan Oktober (Rp198.245.835,00), yang mengindikasikan peningkatan aktivitas transaksi pada akhir tahun. Sementara itu, nilai transaksi terendah terjadi pada April yaitu Rp145.709.865,00, dengan kecenderungan nilai yang lebih rendah pada awal hingga pertengahan tahun.

Tabel 3.1.6-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No.	Bulan	PNBP
1	Januari	Rp173.036.070
2	Februari	Rp233.711.925

3	Maret	Rp178.479.000
4	April	Rp145.709.865
5	Mei	Rp183.199.620
6	Juni	Rp177.163.495
7	Juli	Rp170.623.150
8	Agustus	Rp179.877.763
9	September	Rp164.025.890
10	Oktober	Rp198.245.835
11	November	Rp208.646.210
12	Desember	Rp214.974.212
TOTAL		Rp2.227.693.035

b. Enumerasi dan Pendataan Hiu dan Pari

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Juli – September 2025. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap Lokasi berupa jumlah ikan hiu dan pari yang didaratkan, jenis hiu dan pari yang didaratkan, panjang dan berat ikan yang didaratkan, jenis kelamin ikan yang didaratkan dan informasi lain yang diperlukan.



Gambar 3.1.6-12. Dokumentasi Pengukuran

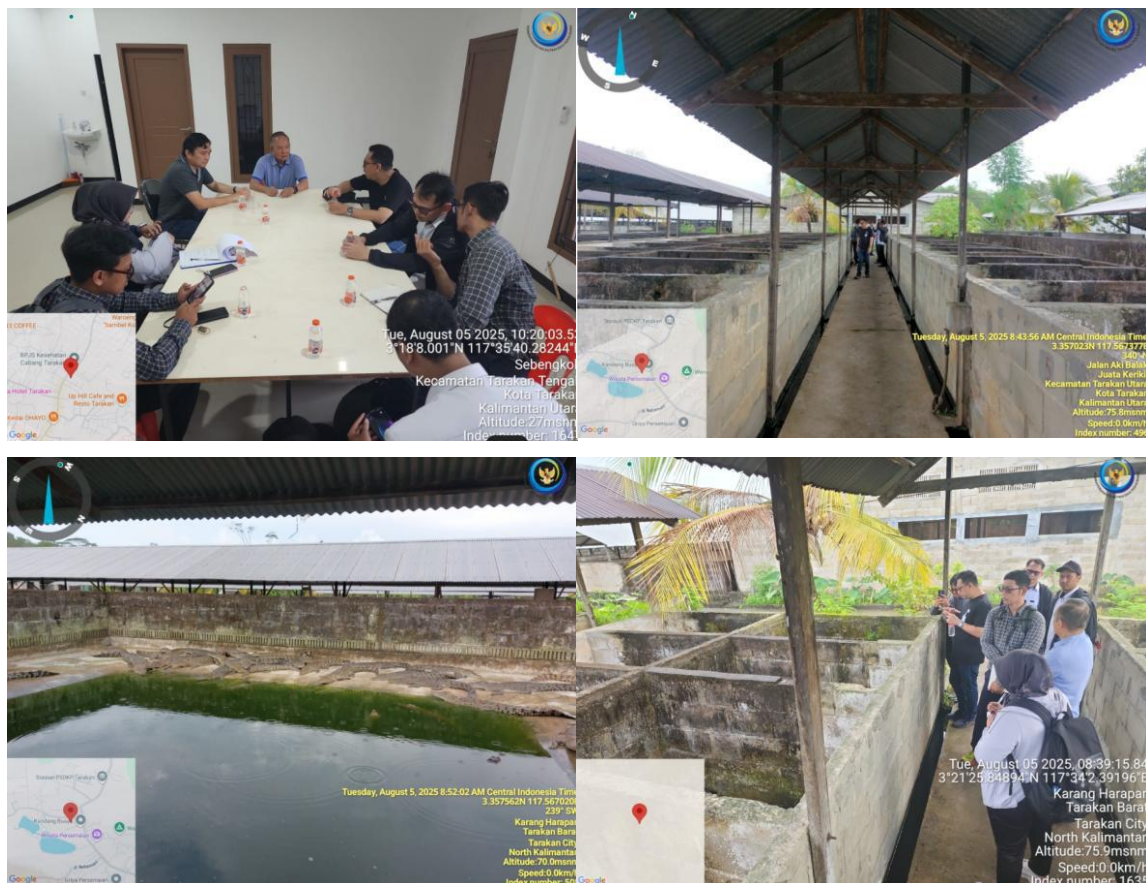
c. Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2 tahap yaitu 28-31 Juli 2025 untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan 5-6 Agustus 2025 dalam rangka pendalaman data. Kegiatan dilaksanakan Lokasi penangkaran PT. Harapan Kaltim Utama, yang terletak di Jl. Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan kegiatan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari observasi langsung, forum group discussion (FGD), wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi aktual di lapangan, baik di lokasi penangkaran maupun di kantor pelaku usaha. Wawancara dan FGD dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses kegiatan usaha yang sudah berjalan dan aspek legalitasnya, FGD juga dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi penangkaran guna melihat persepsi masyarakat terkait penangkaran buaya;
- Penangkaran buaya di Kalimantan Utara hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha, yakni PT. Harapan Kaltim Utama yang berlokasi di Kota Tarakan dengan nomor izin penangkaran 91200093326840002
- Manajemen penangkaran yang dilakukan oleh PT. Harapan Kaltim Utama yakni dengan eksitu, dikarenakan tidak tergantung pada ketersediaan buaya dialam serta diluar habitat alaminya.

Buaya dalam penangkaran dipisah berdasarkan umurnya serta fungsinya, diantaranya yakni buaya dewasa untuk indukan, anakan, serta buaya remaja hingga buaya siap jual.

- Proses pengembangbiakkan buaya dilakukan pada kolam khusus dengan perbandingan 1:1 antara jantan dan betina, telur yang telah menetas dimasukkan ke dalam ruang inkubator yang kemudian apabila telah menetas dengan waktu tunggu selama kurang lebih 3 bulan akan dimasukkan ke dalam kolam anakan dan dipelihara hingga ukuran jual;
- Jenis pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh PT. Harapan Kaltim Utama adalah kulit dan daging buaya, kulit buaya dipasarkan untuk pasar domestik dan ekspor, sementara untuk daging buaya digunakan untuk pakan buaya dan/atau konsumsi pribadi;
- Mekanisme dari perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pemanfaat buaya yakni izin tangkar untuk melakukan penangkaran dan pengembangbiakkan, serta izin edar untuk melakukan peredaran hasil produksi penangkaran, adapun beberapa tahapan juga dicatat seperti pemeriksaan kelahiran, pemeriksaan kematian, serta pemeriksaan pemotongan;



Gambar 3.1.6-13. Dokumentasi Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara

d. Evaluasi Layanan Perizinan

Rapat evaluasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas layanan perizinan yang telah berjalan, memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan layanan perizinan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendix CITES, khususnya ikan Arwana, dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Rapat BPSPL Pontianak yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Asosiasi Penangkar dan Pedagang

Siluk (APPS); dan Pelaku usaha/pemegang izin Pengembangbiakan dan Perdagangan ikan Arwana berdasarkan kegiatan diatas didapatkan hasil sebagai berikut

- Dalam proses perizinan dan sertifikasi ikan arwana, terdapat berbagai kendala yang sering ditemui di lapangan. Pada penerbitan SIPJI, permasalahan yang muncul umumnya terkait dengan legalitas lahan dan bangunan, seperti tidak adanya dokumen IMB/PBG, status kepemilikan tanah yang hanya berupa SKT, SHM yang belum terdaftar di sistem Bhumii ATR, serta perbedaan nama antara dokumen IMB/PBG dengan SHM karena masih tercatat atas nama developer. Pada penerbitan SAJI Dalam Negeri, kendala yang kerap terjadi adalah adanya tujuan pengiriman fiktif di mana penerima yang tercantum berizin, tetapi ikan sebenarnya ditujukan kepada pihak lain yang tidak memiliki izin, serta perbedaan ukuran ikan dengan sertifikat panen yang tidak sesuai ketentuan umur ikan. Untuk SAJI Luar Negeri, permasalahan meliputi adanya selisih antara jumlah ikan yang tercantum dalam dokumen dengan realisasi pengiriman, keterlambatan terbitnya import permit, batal kirim akibat ikan sakit, hingga habisnya masa berlaku SAJI sebelum ikan dikirim. Kendala juga ditemukan pada penerbitan BAP Pemanenan, antara lain ketidaksesuaian data pada SPTJM, perbedaan jumlah ikan dalam permohonan dengan hasil pemeriksaan. Dalam penerbitan sertifikat arwana, sering dijumpai ketidaksesuaian data seperti perbedaan tanggal panen atau filial dengan BAP pemanenan, serta pengajuan jumlah sertifikat yang melebihi jumlah ikan pada BAP. Pada proses penandaan ikan, ditemukan pula ikan yang telah memiliki nomor microchip lain, padahal sesuai ketentuan setiap ikan hanya boleh memiliki satu nomor tagging. Sementara itu, dalam penerbitan kartu penghobi, kendala yang sering terjadi adalah adanya permohonan dari individu berbeda dengan lokasi instalasi yang sama yang berpotensi menimbulkan duplikasi data, serta dokumen permohonan yang tidak sesuai format atau belum lengkap sehingga memperlambat proses verifikasi.
- Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerbitan izin, sertifikat, dan dokumen terkait arwana, diperlukan upaya perbaikan berupa: (1) meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar lebih memahami dan memenuhi persyaratan dokumen serta data yang benar; (2) memperkuat sistem verifikasi dan validasi dengan dukungan teknologi digital, seperti database indukan dan pelacakan microchip; (3) menstandarkan prosedur pemeriksaan dan kewajiban dokumentasi tambahan agar meminimalisir perbedaan data dan jumlah; (4) memperkuat koordinasi lintas instansi terkait untuk mempercepat proses validasi dokumen; serta (5) menerapkan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang agar tercipta kepatuhan dan ketertiban administrasi.





Gambar 3.1.6-15. Dokumentasi Evaluasi Layanan Perizinan

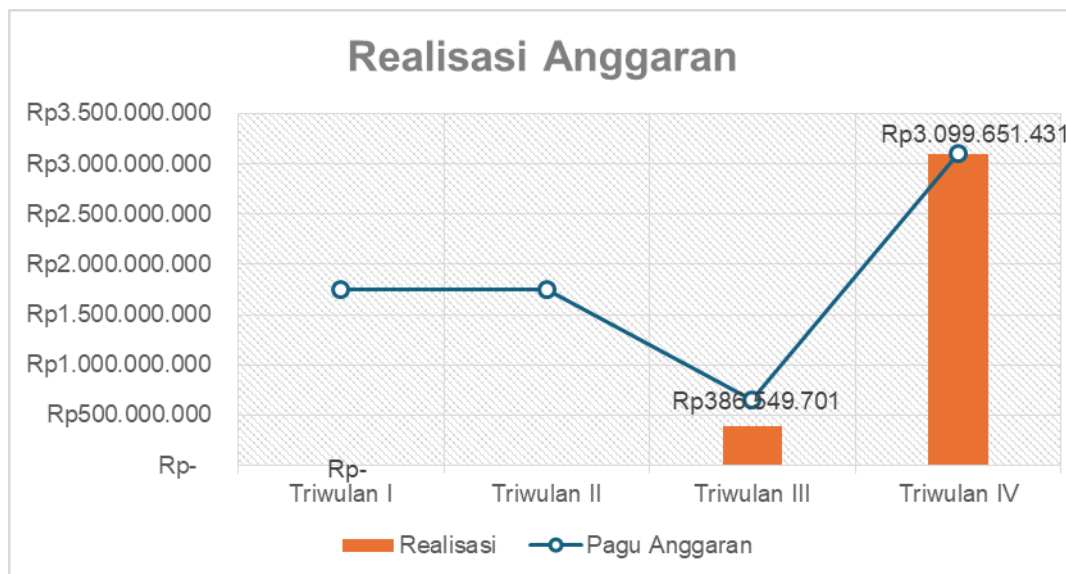
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan total anggaran sebesar Rp1.752.592.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.6-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Rp. 3.101,333,000	Rp 3.099,651,431 (99,95%)	-
TOTAL		Rp. 3.101,333,000	Rp 3.099,651,431 (99,95%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal Desember 2025)



Gambar 3.1.6-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Tahun 2025

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp. 3.099,651,431 (99,95%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3.101,333,000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan, serta mendapatkan manfaat dari program Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/I/2025.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan biota perairan merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan system71. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada bulan Juni tahun 2025.

Dasar Hukum:

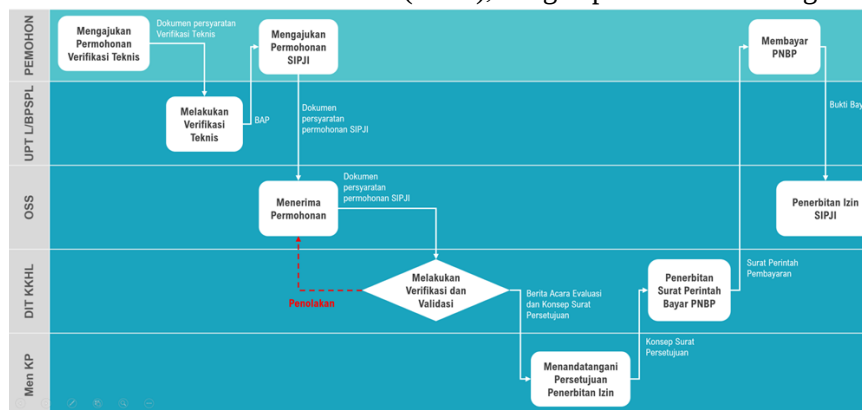
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Ruang Lingkup:

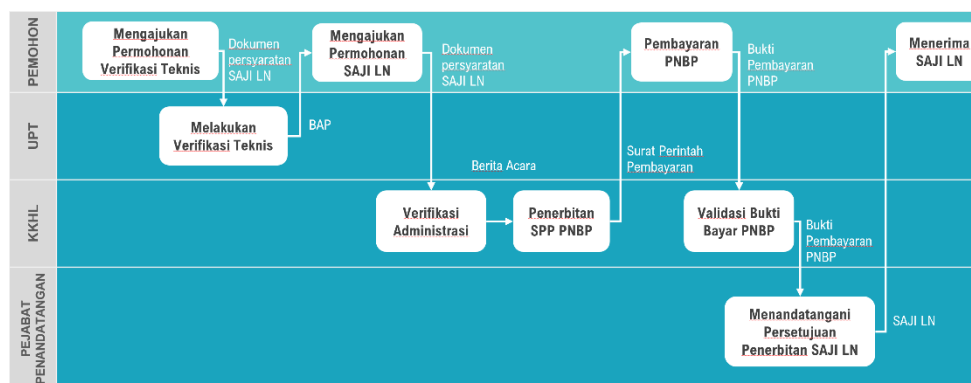
- Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI); dan
- Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan system71 meliputi:
Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), dengan proses bisnis sebagai berikut:



Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dengan proses bisnis sebagai berikut:



Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 72system72, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan komponen perhitungan

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator		
				50	75	100
Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SAJI DN	40%	Dashboad SAJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		Rekapan Penerbitan	30%	Ketelitian rendah	Ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator		
				50	75	100
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Proses Penerbitan Rekomendasi	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 – 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	80	100	-	80	120	80	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian Tahun 2025 IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) dengan target sebesar 80 dan tercapai nilai 100, dengan rincian Proses Verifikasi Lapangan untuk Penerbitan SIPJI (40); Proses Penerbitan SAJI-DN (40); Survei Kepuasan Masyarakat (10); dan Penerapan Konvensi (10). Nilai ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut No. 4/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Capaian Kinerja IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai).

Proses penilaian dilakukan secara mandiri berdasarkan aspek dalam komponen perhitungan yang meliputi Proses penerbitan SAJI-DN dengan indicator Dashboard SAJI, Rekap Penerbitan, Dokumen diarsipkan, Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Jumlah permohonan diproses dan Penggunaan Sistem Informasi. Proses penerbitan Rekomendasi dengan indicator Dashboard SAJI, Rekap Penerbitan, Dokumen diarsipkan, Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Jumlah permohonan diproses dan Penggunaan Sistem Informasi. Survei Kepuasan Masyarakat dengan Indikator dilaksanakan dengan Nilai SKM dan Penerapan Konvensi dengan indicator penerapan konvensi. Adapun Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2025 secara berturut-turut adalah 96,26; 97,45; 90,73; dan 94,97.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di lingkup BPSPL Pontianak didapatkan nilai sebesar 100.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja utama tersebut merupakan IKU baru yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada bulan Juni Tahun 2025. Dengan demikian, pada Tahun 2024 belum terdapat pengukuran capaian kinerja untuk IKU dimaksud, sehingga perbandingan kinerja antar tahun belum dapat dilakukan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit perbandingan tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian Tahun 2025 IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebesar 100. Sementara itu, BPSPL Denpasar memperoleh nilai 90. Sehingga jika dibandingkan, capaian BPSPL Pontianak lebih tinggi dari capaian BPSPL Denpasar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 mampu mendukung tercapainya target kinerja pada akhir tahun, mengingat pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan secara rutin setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Keberhasilan progres kegiatan tersebut didukung oleh pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan serta kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sistem aplikasi sehingga pada kondisi tertentu pelayanan dan pencatatan harus dilakukan secara manual. Selain itu, tingginya jumlah permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pengadaan pegawai kontrak berupa petugas pelayanan guna membantu pelaksanaan pelayanan operasional perizinan jenis ikan agar tetap berjalan efektif dan tepat waktu..

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta penguatan koordinasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan pemanfaatan pertemuan daring menjadi upaya strategis dalam menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sinergi dengan mitra kerja memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Target Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) pada Tahun 2025 ditetapkan nilai 80 dengan capaian 100. Sedangkan pada Renstra DJPK, target Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan sebesar 80, sehingga tahun 2025 realisasi yang didapatkan sebesar 125%.

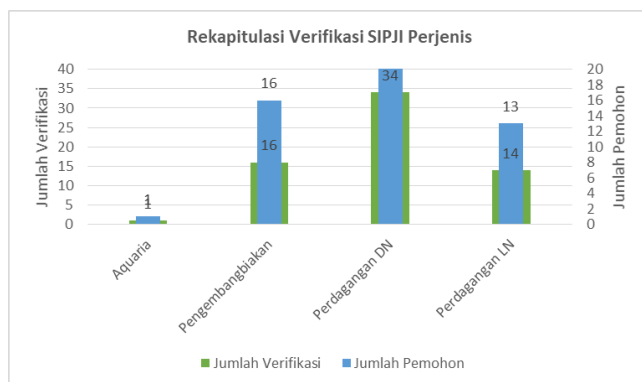
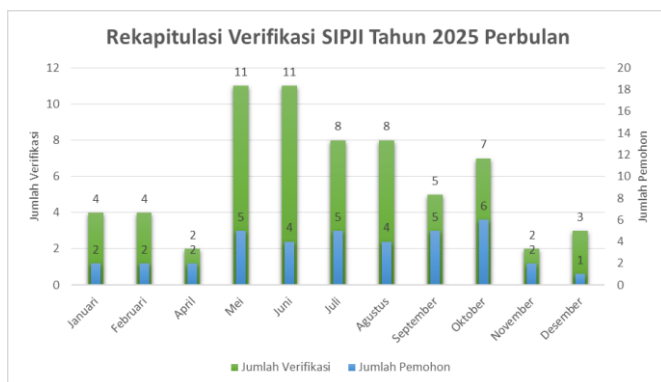
7. Kegiatan Pendukung

a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2025 (Januari – Desember) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 65 BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan pelaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri.

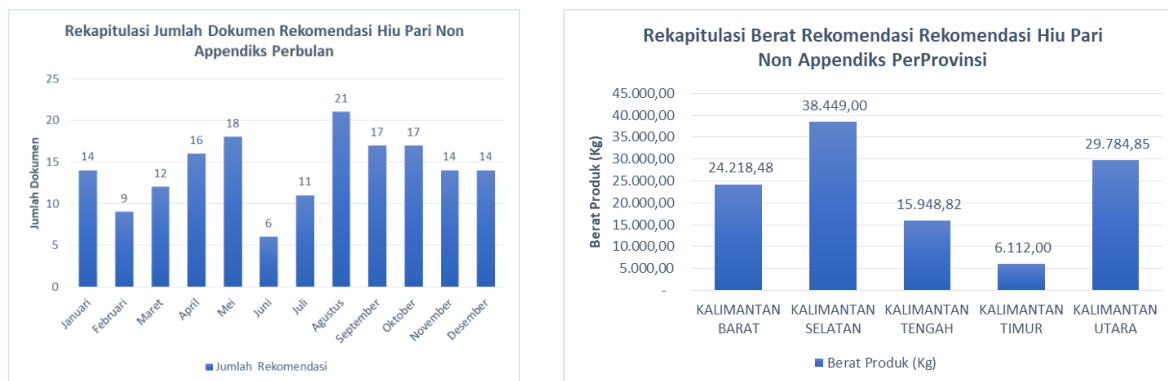


Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025

➤ Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman

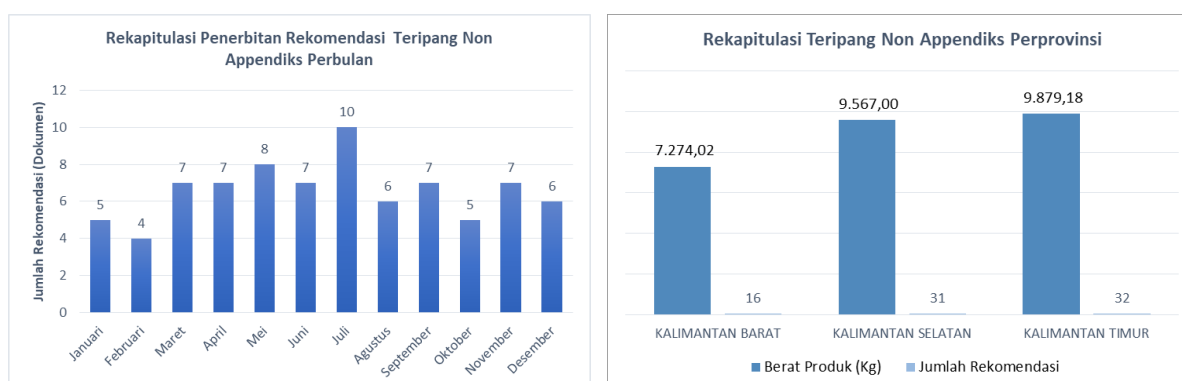
saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.



Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi

Selama Tahun 2025 terdapat total 169 Surat Rekomendasi hiu dan pari *look like species*. Surat rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Tahun 2025 berada pada bulan Agustus sebanyak 22 surat, sementara surat rekomendasi hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan februari dan juni sebanyak 9 dan 6 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi hiu dan pari, selama Tahun 2025 diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari sebanyak 41 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari adalah Kalimantan Barat dengan total hanya 16 surat rekomendasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan untuk jenis teripang selama tahun 2025 adalah sebanyak 79 surat rekomendasi. Surat rekomendasi teripang yang paling banyak terbit berada pada bulan Juli dengan total sebanyak 10 surat, sementara surat rekomendasi teripang paling sedikit berada pada bulan Februari dengan hanya sebanyak 4 (empat) surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi teripang, diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi teripang sebanyak 25 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi teripang adalah Kalimantan Barat dengan hanya 14 (satu) surat rekomendasi.

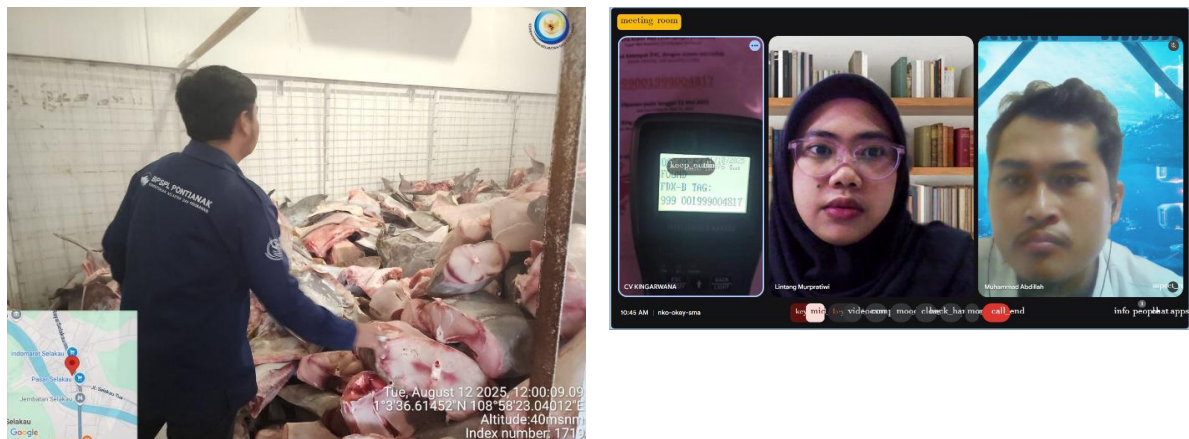


Gambar 3.1.7-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang *Look Alike Species*

➤ Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

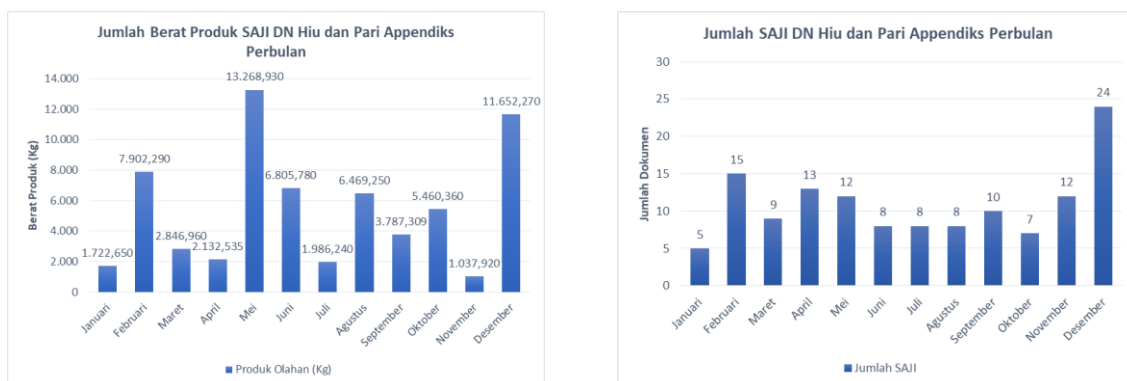
Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan

kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.7-4. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Tahun 2025 terdapat 131 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan desember dengan total sebanyak 24 surat, sementara SAJI DN hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Januari dengan hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari, sampai dengan Tahun 2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 75 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Timur dengan 27 surat, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1.7-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) selama tahun 2025 adalah sebanyak 1.588 SAJI. 300 dokumen untuk Arwana Silver, 110 dokumen untuk saji barang bawaan dan 9 dokumen saji manual untuk keperluan penelitian atau kontes. Selain itu, telah dilakukan verifikasi lapangan SAJI Luar negeri dengan menerbitkan 818 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Kalimantan dan 114 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Silver. Selanjutnya telah dilakukan pula verifikasi hasil pemanenan ikan arwana dengan total 587 dokumen BAP, serta diterbitkan sertifikasi hasil pemanenan ikan arwana sebanyak 232.018 sertifikat.



Gambar 3.1.7-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

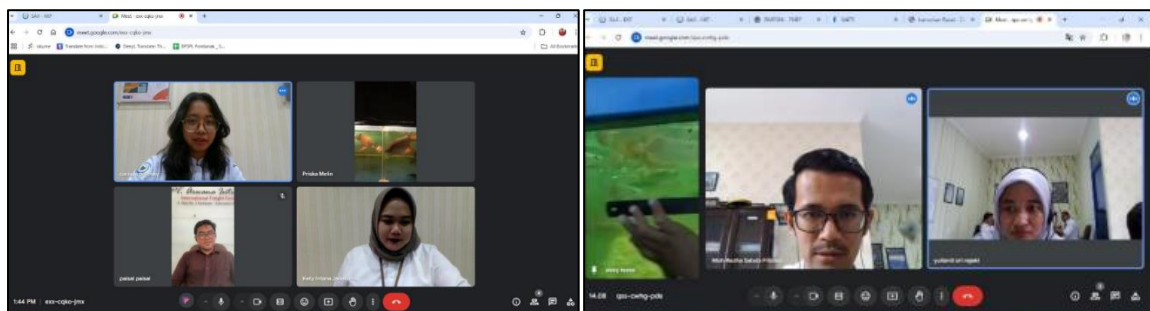
Sementara itu, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Brazil Selama tahun 2025 adalah sebanyak 63 SAJI. SAJI DN Arwana Brazil sepanjang Tahun 2025 paling banyak terbit berada pada bulan September dengan total sebanyak 28 surat, sementara SAJI DN Arwana Brazil paling sedikit berada pada bulan Agustus sebanyak 15 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Brazil, keseluruhan SAJI DN berasal dari Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Brazil hingga Triwulan III, terdapat setidaknya 7 provinsi tujuan dengan tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Brazil adalah Jawa Barat dengan total 110 surat dan DKI Jakarta dengan 59 surat.

➤ *Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan*

Pelayanan penerbitan SAJI DN Bawaan dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Hingga Triwulan IV tahun 2025, jumlah SAJI DN barang bawaan yang diterbitkan yaitu sebanyak 110 SAJI. SAJI DN barang bawaan paling banyak terbit berada pada bulan Januari dengan total sebanyak 17 surat, sementara SAJI DN barang bawaan paling sedikit berada pada bulan September dengan hanya sebanyak 3 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN barang bawaan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling dominan, dengan total SAJI DN barang bawaan sebanyak 66 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN barang bawaan adalah Kalimantan Selatan dengan total 3 SAJI DN barang bawaan saja.

➤ *Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEPP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.7-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Pada tahun 2025 terdapat 818 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) telah dilakukan dengan hasil akhir berupa Berita Acara Pemeriksaan. Hingga Tahun 2025, permohonan SAJI LN berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 573 surat dan Kalimantan Selatan sebanyak 20 surat. Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara, dimana China merupakan negara paling banyak dengan 310 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 93 SAJI, dan Taiwan sebanyak 50 SAJI.

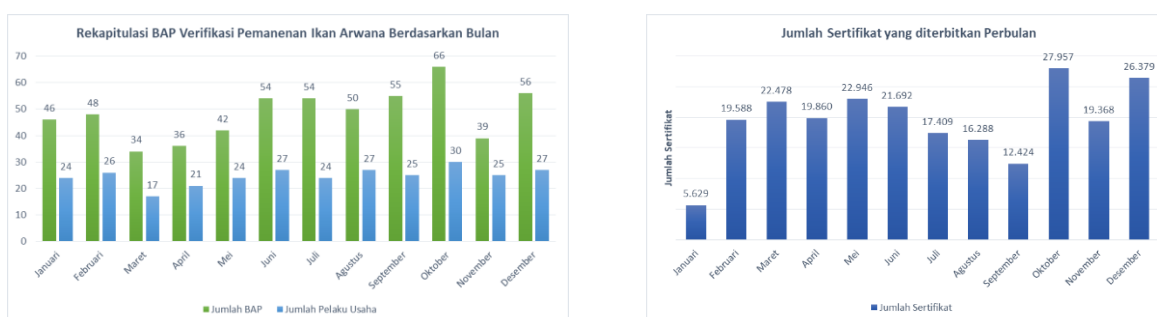


Gambar 3.1.7-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah BAP SAJI LN untuk Arwana Brazil pada Tahun 2025 adalah sebanyak 114 BAP, dimana terbanyak pada bulan November dengan 18 BAP, sedangkan paling sedikit pada bulan Agustus dengan jumlah 4 BAP. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari BAP SAJI LN Arwana Brazil hingga Triwulan IV, terdapat setidaknya 7 negara tujuan, adapun tujuan terbanyak berdasarkan jumlah BAP SAJI LN adalah China dengan total 68 SAJI, kemudian Thailand sebanyak 22 SAJI.

➤ Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi internasional.



Gambar 3.1.7-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 587 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Oktober sebanyak 66 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 36 BAP. Ditinjau dari lokasi pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang Triwulan IV tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk

Arwana Kalimantan sebanyak 232.018 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan Oktober dengan 27.957 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan September dengan 12.9424 sertifikat. Sedangkan dari Januari sampai dengan desember telah diterbitkan sebanyak 232.018 Sertifikat.

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Selama triwulan III total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 503 dokumen dengan 90.175 ekor arwana. Frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah SAJI 84 dokumen dan 15.435 ekor.



Gambar 3.1.7-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Hingga Triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 2.703 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim untuk Arwana Kalimantan sebanyak 1.187.839 Ekor dan Arwana Silver 976.508 Ekor.

➤ *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 (Kumulatif) sebesar **Rp2.227.693.035**. Pada periode Triwulan IV, PNBP terbesar pada Tahun 2025 terdapat pada bulan Februari dengan total Rp.233.711.925, sementara PNBP terkecil terdapat pada bulan April dengan total Rp.145.709.865.

Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No.	Bulan	PNBP
1	Januari	Rp173.036.070
2	Februari	Rp233.711.925
3	Maret	Rp178.479.000
4	April	Rp145.709.865
5	Mei	Rp183.199.620
6	Juni	Rp177.163.495
7	Juli	Rp170.623.150
8	Agustus	Rp179.877.763
9	September	Rp164.025.890
10	Oktober	Rp198.245.835

11	November	Rp208.646.210
12	Desember	Rp214.974.212
TOTAL		Rp2.227.693.035

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan mengirimkan kuisioner kepada pengguna jasa layanan. Penilaian ini mencakup layanan pendampingan dan verifikasi SIPJI meliputi aspek persyaratan, survey dan mekanisme, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis/layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana., penerbitan surat rekomendasi dan penerbitan SAJI. Aspek-aspek yang dinilai dalam survey ini



Gambar 3.1.7-3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 94,92 dengan predikat A (Sangat Baik). Nilai indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan IV meningkat dari Triwulan III, jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat penurunan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Triwulan I melibatkan responden sebanyak 116 orang pengguna jasa yang terdiri dari berbagai rentang usia, Triwulan II melibatkan responden sebanyak 60 orang, Triwulan III melibatkan 83 responden dan Triwulan IV melibatkan 128 responden.

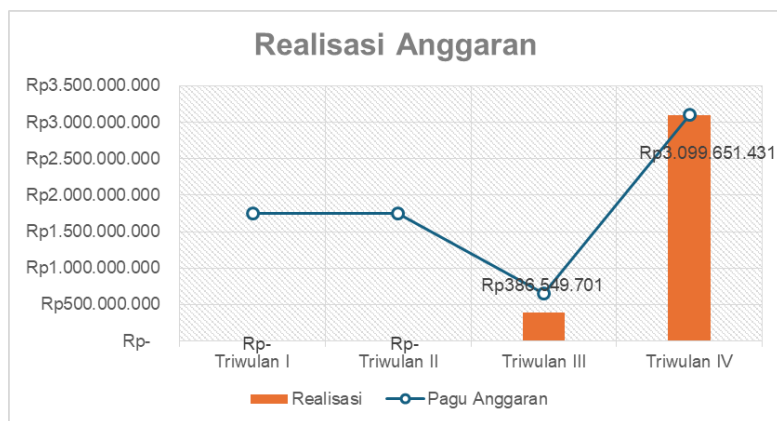
6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar 3,101,333,000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 7 Tahun 2025

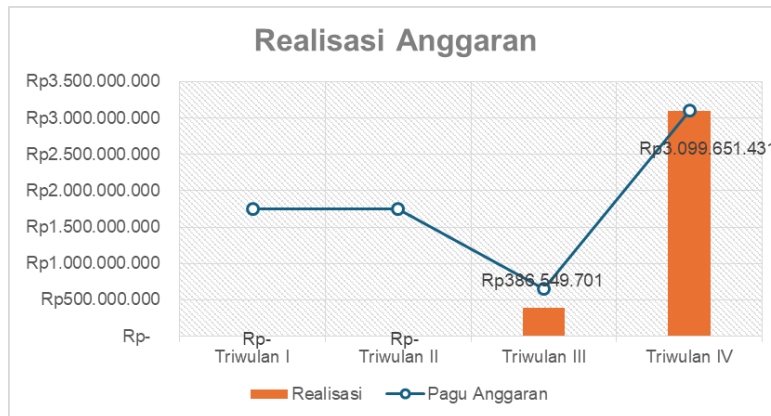
No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Rp. 3,101,333,000	Rp 3,099,651,431 (59,11%)	-
TOTAL		Rp. 3,101,333,000	Rp 3,099,651,431 (99,95%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)



Gambar 3.1.7-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Tahun 2026

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp3,099,651,431** atau **(99,95%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp3,101,333,000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan



Gambar 3.1.7-13. Grafik Realisasi Anggaran IKU 7 hingga Tahun 2026

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. **Rp3,099,651,431** atau **(99,95%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp3,101,333,000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/I/2025.

8. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 8. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-8	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
4	1	1	-	1	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK 31 Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Kegiatan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar pada Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada 10 (sepuluh) pulau di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, yaitu Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Adongabu, Pulau Pabahanan, Pulau Sialod, Pulau Bakungan Hea, Pulau Bakungan Diki, Pulau Kaniungan Besar, Pulau Lemukutan, dan Pulau Temajo. Berdasarkan hasil identifikasi ini memiliki Potensi PNBK dengan Rp 1.417.908.887,50. Capaian ini sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nomor 11/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyampaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi pemanfaatan pulau sebagai dasar pemberian rekomendasi perizinan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil identifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung proses pengambilan keputusan perizinan serta memastikan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dilakukan secara tertib, terukur, dan berkelanjutan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen. Sementara itu, pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja utama (IKU) ini, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan antar tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) sebesar 1 (satu) dokumen, sementara itu, BPSPL Denpasar capaian Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun sebesar 1 (satu) dokumen. Sehingga, capaian kinerja

BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar menunjukkan hasil yang setara, yaitu masing-masing berhasil menyusun identifikasi Pulau – Pulau Kecil sebanyak **1 (satu) dokumen**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja IKU Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan data pendukung, serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan identifikasi dilakukan secara terarah pada pulau-pulau prioritas sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi perizinan. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja ke depan, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data secara berkala, serta optimalisasi metode pengumpulan data melalui pemanfaatan teknologi dan dukungan jejaring lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil identifikasi serta efisiensi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya..

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan IKU Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan data sekunder yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan identifikasi difokuskan pada pulau-pulau prioritas dan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain yang sejenis, sehingga mampu menekan kebutuhan biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Selain itu, pemanfaatan komunikasi dan koordinasi daring dalam tahapan persiapan dan validasi data turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil dokumen yang disusun.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029

Target Capaian Kinerja Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen. Sementara itu, dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029, indikator kinerja yang digunakan adalah Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun untuk Rekomendasi Kebijakan. Perbedaan definisi dan ruang lingkup indikator kinerja tersebut menyebabkan capaian kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator kinerja pada Renstra DJPK 2025 - 2029.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan tersebut dilakukan 31 Juli 2025 hingga 10 Agustus 2025 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam bernilai ekonomis dan strategis, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun yang berfungsi untuk mendukung perikanan, pariwisata, konservasi, serta jasa lingkungan lainnya. Pulau-pulau kecil terluar juga berperan penting dalam pertahanan dan keamanan negara, serta berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Namun demikian, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti status kepemilikan tanah, keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, belum adanya rencana zonasi, serta adanya isu strategis seperti penguasaan pulau oleh pihak asing, penutupan akses bagi nelayan lokal, hingga konflik pemanfaatan lahan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024, kegiatan identifikasi perizinan ini bertujuan untuk mendukung tertib administrasi, menjaga kedaulatan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi pulau-pulau kecil melalui pendataan, sosialisasi, dan pengambilan data spasial. Berdasarkan hasil kegiatan didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

- Sosialisasi dan pengumpulan data perizinan serta data spasial pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan di 8 pulau yaitu Pulau Derawan (38 titik usaha), Pulau Maratua (39 titik usaha), Pulau Bakungan Besar (1 titik usaha), Pulau Bakungan Kecil (1 titik usaha), Pulau Pabahanan (1 titik usaha), Pulau Adongabu (1 titik usaha), Pulau Sialod (1 titik usaha) dan Pulau Kaniungan Besar (11 titik usaha).
- 93 titik usaha yang sudah diidentifikasi kegiatan usahanya, 10 diantaranya tercatat sudah tidak beroperasi lagi.
- 76 dari 83 usaha di pulau-pulau kecil yang masih aktif, modalnya bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 7 sisanya modalnya bersumber dari penanaman modal asing (PMA).



8. Realisasi Anggaran

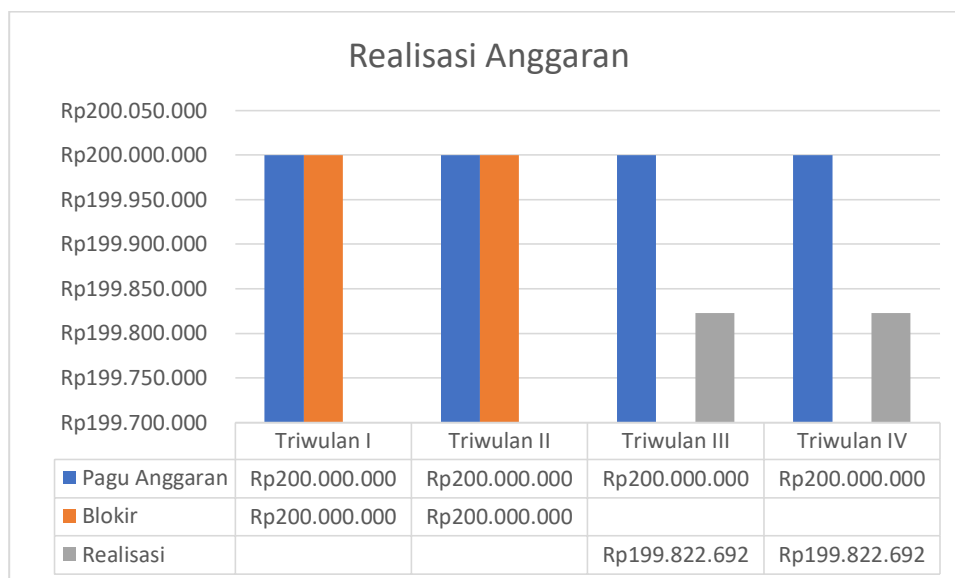
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dengan total pagu anggaran sebesar Rp200.000.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rp200.000.000	Rp199.822.692 (99.91%)	-
TOTAL		Rp200.000.000	Rp199.822.692 (99.91%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp199.822.692 atau 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp200.000.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, dan Belanja Bahan.



Grafik.3.1.9-1. Grafik Realisasi Anggaran IKU 9 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pada kegiatan ini telah dilakukan pengarusutamaan gender karena pada seluruh kegiatan pada IKU 8 ini telah mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan survei lapangan dalam rangka identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak lainnya seperti di Kalimantan Barat

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Terasilitasinya Lokasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 9. Pemanfaatan Jasa Kelautan yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)

Kegiatan penyadartahuan masyarakat tentang pemanfaatan jasa bahari yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir, pelaku usaha local dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep dan jenis jasa bahari yang dapay dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi secara legal dan berkelanjutan, mendapatkan regulasi dan prosedur perizinan pemanfaatan ruang laut, termasuk ketentuan yang mengatur kegiatan wisata bahari, reklamasi, serta pembangunan bangunan/infrastruktur di wilayah perairan. Memberikan prinsip pengelolaan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan laut dan memberikan peluang usaha berbasis jasa bahari yang dapat dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri, inovatif dan ramah lingkungan.

Tabel 3.1.90-1. Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak

SK-9	Terasilitasinya Lokasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari						
IKU-9	Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
-	3	3	-	3	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK 31 Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilaksanakan melalui kegiatan gerai jasa bahari dan penyadartahuan pemanfaatan jasa bahari di 3 (tiga) lokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16–21 November 2025, di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21–26 November 2025, serta di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6–12 Desember 2025. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan jasa bahari secara berkelanjutan. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 13/BPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Capaian Kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Lokasi).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja utama (IKU) ini, sehingga perbandingan capaian antar tahun belum dapat dilakukan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan perbandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit perbandingan tersebut didasarkan pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilaksanakan melalui kegiatan gerai jasa bahari dan penyadartahuan pemanfaatan jasa bahari di 3 (tiga) lokasi. Sementara itu, pada BPSPL Denpasar, tidak memiliki

indikator Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi . Dengan demikian, capaian kinerja tidak dapat dibandingkan

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun mampu mendorong tercapainya target kinerja pada akhir tahun. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta penyelenggaraan gerai perizinan pemanfaatan jasa bahari yang dilakukan secara langsung kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan akses masyarakat terhadap layanan perizinan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan akan terus dioptimalkan dengan perluasan jangkauan lokasi serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan dan pemanfaatan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan dilakukan secara terintegrasi, sehingga penggunaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, koordinasi secara daring pada tahap persiapan dan evaluasi turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan serta memastikan capaian kinerja dapat tercapai secara efektif..

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029

Terdapat perbedaan indikator kinerja antara Renstra DJPK Tahun 2025–2029 dan indikator kinerja yang digunakan oleh BPSPL Pontianak. Pada Renstra DJPK, indikator yang digunakan adalah Persentase Perizinan Berusaha Jasa Bahari, sedangkan pada BPSPL Pontianak indikator kinerjanya adalah Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi). Perbedaan definisi dan satuan pengukuran indikator tersebut menyebabkan capaian kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung.

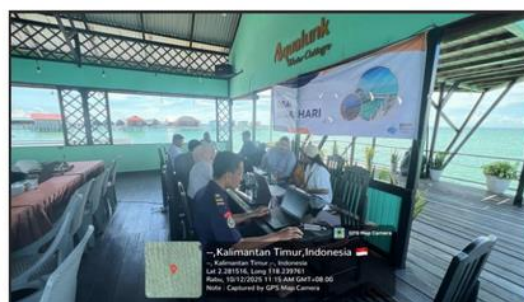
7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta yang terdiri atas pemerintah daerah serta pelaku usaha telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap perizinan usaha jasa bahari, termasuk pemahaman mengenai alur, persyaratan, serta mekanisme perizinan berusaha di sector jasa bahari. Penyampaian materi dan interaksi dalam kegiatan ini membantu peserta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses perizinan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan gerai perizinan berperan efektif dimana sebanyak 14 pelaku usaha hadir pada kegiatan tersebut sebagai sarana konsultasi dan pendampingan teknis, khususnya dalam penyusunan dokumen proposal wisata bahari serta pemenuhan administrasi perizinan, pendampingan yang diberikan meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan perizinan dan mendukung kelancaran serta percepatan proses perizinana usaha jasa bahari sesuai ketentuan yang berlaku.



Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Kalimantan Timur pelaksanaan pada tanggal 9 – 10 Desember 2025 di Ruang Petemuan Aqualunk Water Resort Pulau Derawan, Kab. Berau Kalimantan Timur. Kegiatan Pendampingan Pemanfaatan Jasa Bahari di Kalimantan Timur dilaksanakan atas 2 tahapan yaitu kegiatan penyadartahuan Pemnfaatan Jasa Bahari dan Pelaksanaan Gerai Jasa Bahari. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang dilaksanakan oleh panitia sebagai dari persiapan administrasi dan yang pendataan kehadiran peserta. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat penyampaian materi dari Hendra Nurcahyo, S.Pi, M.P, materi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai ruang lingkup jasa bahari, kewenangan pemerintah, serta alur dan pesyaratan perizinan usaha jasa bahari. Materi kedua mengenai tantangan dan upaya percepatan perizinan berusaha sektor jasa bahari di Kalimantan Timur. Materi ini membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perizinan serta upaya strategis dalam mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Gerai jasa bahari dilaksanakan dengan membuka meja-meja pelayanan dimana pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultansi kepada petugas pelayanan berusaha Jasa Bahari. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 desember 2025 di Aula Pertemuan Aqualunk Cottage. Kegiatan gerai jasa kelautan dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dengan petugas pelayanan.



8. Realisasi Anggaran

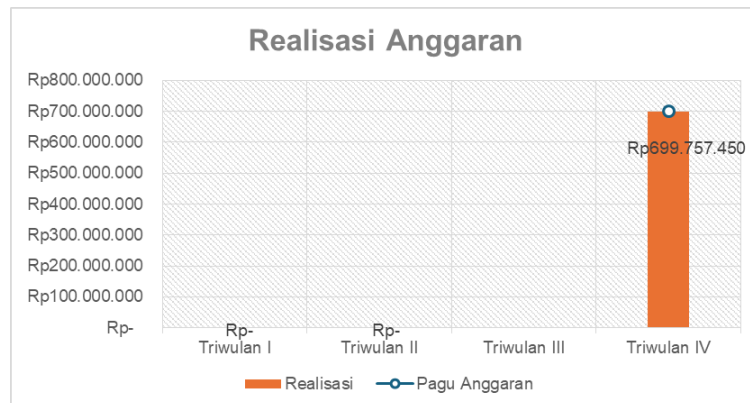
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2363.PBW.006] dalam bentuk Gerai Jasa Bahari [2363.PBW.006.52.A] dan Penyadartahuan Pemanfaatan Jsaa Bahari [2363.PBW.006.052.A] dengan total pagu anggaran sebesar Rp700.000.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-2. Realisasi Anggaran IKU 9 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2363.PBW.006.52.A] [2363.PBW.006.052.A] Gerai Jasa Bahari dan Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari	Rp700.000.000	Rp699.757.450 (99.97%)	-
TOTAL		Rp700.000.000	Rp699.757.450 (99.97%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp699.757.450 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp700.00.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, dan Belanja Bahan.



Grafik.3.1.10-3 Grafik Realisasi Anggaran IKU 9 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pada kegiatan ini telah dilakukan pengarusutamaan gender karena pada seluruh kegiatan pada IKU 9 ini telah mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dengan melibatkan serta mendorong partisipasi laki-laki dan perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 untuk IKU Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari difokuskan pada pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan gerai perizinan jasa bahari pada lokasi prioritas secara terintegrasi dan efisien guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pemanfaatan jasa bahari sesuai ketentuan.

3.1.11 Sasaran Kegiatan 10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan. Terdapat perubahan Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.11-1. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 10 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.11-2. Capaian IKM 10 BPSPL Pontianak

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-10	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
88,55	70	88,25		70	126.07	87.80	100.51%

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar 88,25 dengan predikat A (Memuaskan) dari target 70. Sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dengan Nomor: B.3742/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal prihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Pontianak.

Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada aplikasi Kinerja KKP, dengan rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.11-3 Rincian Hasil Penilaian PM SAKIP BPSPL Pontianak Tahun 2025

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.10
2	Pengukuran Kinerja	30	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15	13.05
4	Evaluasi Internal	25	23.00
Nilai		100	88.25
Predikat			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 mencapai **88,25**, melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar **70**. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar **85,55**. Terdapat peningkatan capaian 4,38% dan Nilai 2,7 pada tahun 2025. Peningkatan kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan dan pengelolaan SAKIP di lingkungan BPSPL Pontianak.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025, BPSPL Pontianak membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya

tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 88,25, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai PM SAKIP Tahun 2025 sebesar 86.90. Sehingga jika dibandingkan Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih tinggi dari BPSPL Denpasar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan manajemen kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta konsistensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai PM SAKIP pada tahun berjalan. Aspek pengukuran kinerja BPSPL Pontianak juga diperkuat dengan adanya inovasi **Montan (Monitoring Kegiatan)** yang menjadi sarana pengumpulan data dukung dan pelaporan kegiatan setiap bulan. Inovasi ini memudahkan proses pemantauan realisasi kinerja, meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyediaan data, serta membantu memastikan bahwa setiap capaian dapat terdokumentasi dengan baik dan terukur. Dengan demikian, kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Evaluasi AKIP Tahun 2024 terdapat 2 (dua) rekomendasi yaitu:

- a. Memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat memenuhi target, termasuk IK nilai IKPA, yang perlu melakukan pemantauan IKPA secara rutin setiap bulan hingga akhir Tahun; dan
- b. Menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja pada dokumen laporan kinerja tahun 2024. Perbandingan dilakukan per Indikator Kinerja yang dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPSPL Pontianak melalui surat B.355/BPSPL.2/TU.140/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 tidak ditemukan kelemahan pada pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 pada unit pelaksana teknis BPSPL Pontianak. Tetapi adanya penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan penggunaan PNBPN dari 10% menjadi 23%) melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Perubahan signifikan ini berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNBPN lingkup Ditjen PKRL, yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. Namun, hingga saat evaluasi, BPSPL Pontianak belum mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut.

Rekomendasi di atas telah ditindaklanjuti melalui penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.3331/BPSPL.2/HP.440/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Pontianak, pada tautan <http://tiny.cc/TLAKIP2025>.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis *google form* untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat

membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Renstra DJPK 2025 – 2029

Capaian kinerja Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 88.25, sementara itu, pada Renstra DJPK target tahun 2029 ada sebesar 87.80, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100.51%.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target IKU ini yaitu:

- a. Melakukan rapat bulanan pada 3 Januari 2025 sesuai Meorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 1/BPSPL.2/TU.330/I/2025 tanggal 2 Januari 205 hal Rapat Bulanan Awal Tahun 2025.
- b. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal PKRL tanggal 7 Januari 2024 nomor B.42/DJPKRL.1/TU.110/I/2025 perihal Permohonan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL Tahun 2025 melalui surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Penyampaian Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di BPSPL Pontianak Tahun 2025.
- c. Melakukan penyusunan laporan kinerja Triwulan IV/Tahunan 2024 BPSPL Pontianak. Laporan kinerja BPSPL Pontianak telah disampaikan kepada Direktur Jenderal PKRL melalui surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.176/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
- d. Melakukan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 BPSPL Pontianak kepada internal kantor sesuai memorandum Kepala BPSPL Pontianak 9/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- e. Melakukan rapat evaluasi dan perencanaan kinerja bulan Februari 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 3 Februari 2025 sesuai dengan memorandum Kepala BPSPL Pontianak nomor 10/BPSPL.2/TU.210/I/2025.
- f. Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 melalui perbaikan laporan kinerja sesuai dengan Berita Acara Reviu Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024.
- g. Melakukan dialog kinerja dan rapat kinerja bulan Maret 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada tanggal 4 Maret 2025 sesuai dengan surat undangan Kepala BPSPL Pontianak nomor B.548/BPSPL.2/TU.339/II/2025.
- h. Menyusun dokumen perencanaan kinerja lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi Rincian Target, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan, Manual IKU dan Matriks Peran Hasil.
- i. Melakukan monitoring kegiatan BPSPL Pontianak yang telah dilaksanakan tiap bulannya menggunakan formulir elektronik “Montan” pada laman bit.ly/MontanPNK2025
- j. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi kali revisi DJA pada 22 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.865/BPSPL.2/HP.320/IV/2025 tanggal 21 April 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat hal Usulan Revisi Anggaran.
- k. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.124/DJPK.1/TU.210/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Triwulan II 2025
- l. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.439/DJPK.1/TU.210/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Penyampaian Indikator Halaman III DIPA Bulan Mei 2025 dengan melakukan pemantauan terhadap target output (keluaran) kegiatan dari mulai Perencanaan, Penyerapan dan Deviasi.
- m. Melakukan pengusulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.882/BPSPL.2/KU.440/IV/2025.

- n. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke-13 sesuai surat Kepala KPPN Pontianak nomor S-754/KPN.1701/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji-13.
- o. Menghadiri Undangan Rilis APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode April 2025, Asistensi dan Evaluasi SAKTI serta Digitalisasi Pembayaran.
- p. Menindaklanjuti surat Kepala KPPN Pontianak nomor S-785/KPN.1701/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian Informasi Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Tahun Anggaran 2025.
- q. Melakukan pengusulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.882/BPSPL.2/KU.440/IV/2025.
- r. Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup BPSPL Pontianak melalui Aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).
- s. Menyusun Perubahan Dokumen Kinerja Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi: perjanjian kinerja, capaian target, manual IKU dan rencana aksi.
- t. Mengumpulkan Dokumen Pendukung untuk Penilaian Mandiri SAKIP dan Menghadiri Undangan Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL 2025 tanggal 10 – 11 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1114/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- u. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II 2025 sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1625/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.
- v. Melakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>
- w. Melakukan Pemantauan Kinerja Lingkup BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025 melalui formulir online Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak (Montan) pada laman <https://bit.ly/MontanPNK2025>.
- x. Melakukan Pengisian Pelaporan Online bulan Juli s.d. September Tahun 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>).

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan total pagu anggaran sebesar Rp40.500.000. Tidak terdapat blokir anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai Rp40.499.317. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-3. Realisasi Anggaran IKM 10 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1	[2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 40.500.000	Rp 40.499.317 (0%)	-
TOTAL		Rp40.500.000	Rp40.499.317 (100%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim

Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Selain itu komitmen pengarusutamaan gender melalui penetapan Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BPSPL Pontianak dengan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.260/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan dokumen perencanaan kinerja pasca pemisahan organisasi eselon I.

IKM 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi SPM – Pengurang Nilai IKPA
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Perhitungan Nilai IKPA didapatkan dari rumus berikut ini:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) + \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.11-4. Capaian IKM 11 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
94,98	85	95,79	+0,81	89	107,63	91	105,26

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 ini adalah sebesar 95,79 dengan target 85, sebagaimana pemantauan pada aplikasi OM-Span terhadap nilai IKPA BPSPL Pontianak pada periode Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 111/SJ.2/RC.610/1/2026 Tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.11.-5 Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA BPSPL Pontianak Tahun 2025

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10	100.00
		Deviasi Hal. III DIPA	15	82.26
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20	100.00
		Belanja Kontraktual	10	93.33
		Penyelesaian Tagihan	10	100.00
		Pengelolaan UP dan TUP	10	91.14
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25	100.00
Nilai Akhir			100.00	95.79

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

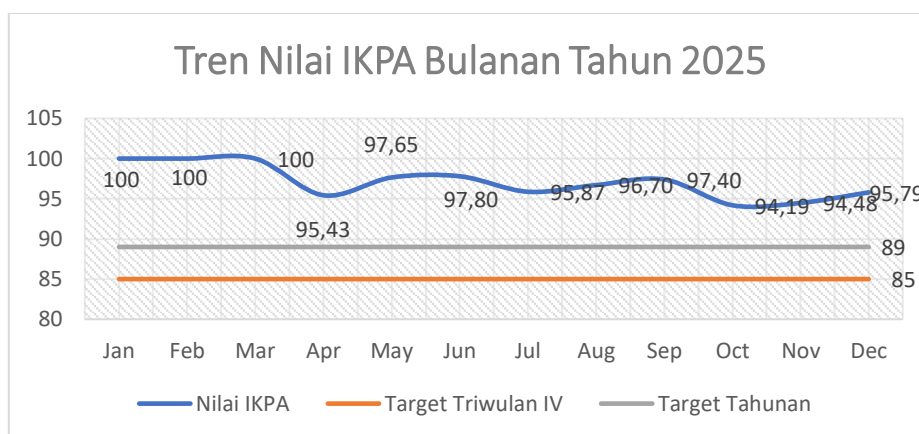
Capaian Tahun 2025 adalah 95,79 (107,63%) dari target semester 89. Capaian Tahun 2024 adalah 94,98 (105,55%) dari target semester 90. Terdapat peningkatan capaian 2,08% dan Nilai 0,81 pada tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 sebesar 95.79, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebesar 94.11. Sehingga jika dibandingkan Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih tinggi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pemantauan nilai IKPA tahun 2025, tren nilai IKPA hingga Tahun 2025 mengalami fluktuasi. Terdapat penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan pada bulan April 2025 dan perlahan meningkat pada bulan Mei dan Juni. Penurunan ini disebabkan karena pada Triwulan I terdapat dispensasi nilai IKPA menjadi 100 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu penurunan nilai IKPA juga disebabkan penurunan nilai penyerapan anggaran, dimana pada awal Triwulan II belum dapat dimaksimalkan untuk menghindari tingginya nilai deviasi penyerapan anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada Triwulan III mengalami penurunan kembali disebabkan dari nilai penyerapan anggaran dan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan antara lain keterlambatan realisasi anggaran, ketidaksesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi aktual, serta keterlambatan penyampaian dokumen pendukung pembayaran. Triwulan IV terdapat penambahan PNPB yang mempengaruhi nilai IKPA. Masuknya penambahan PNPB menyebabkan terjadi perubahan pada perencanaan dan target dana penarikan dana, sehingga realisasi anggaran pada bulan berjalan belum sepenuhnya dapat mengimbangi peningkatan pagu yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada beberapa indikator IKPA, khususnya yang berkaitan dengan deviasi perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga nilai IKPA mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.



Gambar 3.1.11-1. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian IKM ini ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Kendala yang muncul yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi capaian nilai IKPA. Selain itu, proses pengembangan aplikasi SAKTI juga berdampak kepada layanan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran berkoordinasi secara aktif dengan Kantor KPPN Pontianak dan melakukan monitoring secara berkala sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya. Sebagai upaya perbaikan, satuan kerja telah melakukan penyesuaian rencana penarikan dana pasca TOP Up PNPB, percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNPB, serta peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan. Selain itu, dilakukan monitoring secara lebih intensif terhadap realisasi anggaran dan indikator IKPA agar dampak penurunan dapat diminimalisir dan capaian kinerja tetap terjaga pada periode berikutnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 95.79, sementara itu, Nilai IKPA pada Renstra Tahun 2029 sebesar 91. Sehingga jika dibandingkan capaian kinerja BPSPL Pontianak dan Renstra DJPK Tahun 2029 realisasi yang diperoleh sebesar 105.26%.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu : Revisi anggaran meliputi

Periode	Pagu (s.d. Akhir Triwulan)	Jenis	Tanggal
Triwulan I	Rp16.846.280.000	Revisi POK	3 Januari 2025 21 Januari 2025 6 Februari 4 Maret 2025
		Revisi DJA	25 Februari 2025

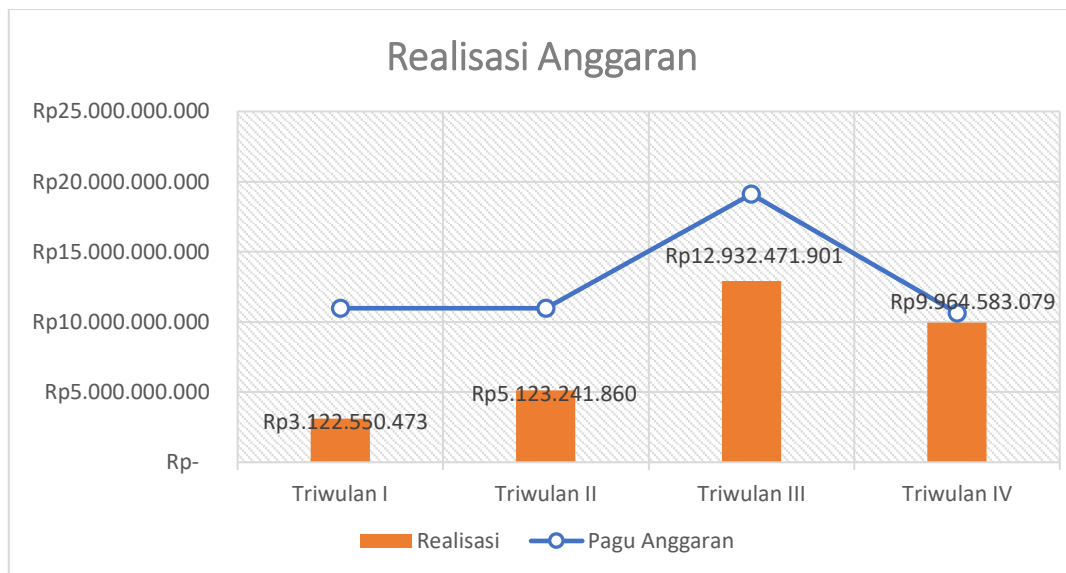
Triwulan II	Rp16.846.280.000	Revisi DJA	22 April 2025
Triwulan III	Rp16.846.280.000	Revisi DJA	2 Juli 2025
		Revisi Kanwil	20 Juli 2025
			8 September 2025 29 September 2025
Triwulan IV	Rp30.545.579.000	Revisi Kanwil	13 Oktober 2025
		Revisi POK	15 Oktober 2025
		Revisi DIPA DJA	31 Oktober 2025
		Revisi POK	12 November 2025 12 Desember 2025 22 Desember 2025 23 Desember 2025 25 Desember 2025 26 Desember 2025

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.956.051] Layanan BMN; [2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan; [2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor; dan [2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.980.080.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp89.200.000. Realisasi anggaran pada Triwulan Tahun 2025 sebesar Rp5.123.241.860, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Triwulan I. Realisasi anggaran ini digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-5. Realisasi Anggaran IKM 11 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp20.140.000	Rp 20,135,928 (99,98%)	-
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 7,872,395,000	Rp 7,196,133,637 (91,41%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp2.719.000.000	Rp2.718.413.514 (99,98%)	-
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp29.900.000	Rp29.900.000 (100%)	-
TOTAL		Rp10.641.435.000	Rp9.964.583.079	-



Gambar 3.1.11-2. Tren Realisasi Anggaran per Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IKM 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 – 80 ;
- Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker
Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks $RA\ SBK_i$: Indeks Realisasi RO i SBK
n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker
CRO : Capaian RO
Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK
NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

Capaian IKM 12 NKPA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.11-6 Capaian IKM 12 Tahun 2025

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target 2025	Realisasi 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
98,11	71,5	98,57	+0,46	71,5	120	72.5	103.03%

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 ini sebesar 98,57 dengan target 71,5, sebagaimana pemantauan pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan terhadap nilai NKPA BPSPL Pontianak pada periode Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Adapun rincian nilai pada NKPA meliputi Capaian RO (100); Penggunaan SBK (85,71); dan Efisiensi SBK (100).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,57 dengan target 71,5. Sementara itu, pada Tahun 2024 capaian yang diperoleh juga sebesar 98,14 dengan target 71. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya dorongan perbaikan standar kinerja dalam perencanaan anggaran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Targey Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta

indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 98,57. Sementara itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Tahun 2025 sebesar 97,86. Sehingga jika dibandingkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak lebih tinggi dari BPSPL Denpasar.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya..

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKPA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Renstra DJPK 2025 – 2029

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 98.57, sementara itu, target pada Renstra DJPK tahun 2029 sebesar 72.5. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 136.03%.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

- a. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi kali revisi DJA pada 22 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.865/BPSPL.2/HP.320/IV/2025 tanggal 21 April 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat hal Usulan Revisi Anggaran.
- b. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.124/DJPK.1/TU.210/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Triwulan II 2025.
- c. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.439/DJPK.1/TU.210/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Penyampaian Indikator Halaman III DIPA Bulan Mei 2025 dengan melakukan pemantauan terhadap target output (keluaran) kegiatan dari mulai Perencanaan, Penyerapan dan Deviasi.
- d. Melakukan tindak lanjut atas Memorandum Sekretaris Ditjen PK Nomor B.650/DJPK.1/TU.210/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Usulan Tim Program Prioritas Ditjen PK TA. 2026.
- e. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi kali revisi DJA pada 2 Juli 2025 dan 1 (satu) kali Revisi Kanwil Halaman III DIPA tanggal 10 Juli 2025.
- f. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.565/DJPRL.1/TU.210/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Usulan Persetujuan Penggunaan PNPB TA. 2025.

- g. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1190/DJPK.1/KU.520/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB Izin Penggunaan PNBPA TA. 2025 dan Usulan Izin Penggunaan PNBPA TA. 2026 s.d. 2028.
- h. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1426/DJPK.1/TU.210/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB untuk Usulan Tambahan Izin Penggunaan Dana PNBPA TA. 2025.
- i. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1436/DJPK.1/TU.210/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Rencana Kerja Kegiatan, Prognosa dan Realisasi Anggaran TA. 2025.
- j. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.2163/DJPK.1/TU.210/IX/2025 tanggal 22 September 2025 hal Penyampaian KAK dan RAB untuk Penyesuaian Usulan Izin Penggunaan Dana PNBPA TA 2026 https://bit.ly/Usulan_PNBPA_2026-2028.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.951.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp60.000.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp59.400.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-7. Realisasi Anggaran IKM 12 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1	[2367.EBD.951.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 54,844,000	Rp 54,765,862 (99.86%)	-
TOTAL		Rp 54,844,000	Rp 54,765,862	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari RM/PNBPA/PHLN. Selain itu juga melakukan revisi anggaran jika diperlukan.

IKM 13. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun TW II 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.11-8. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-13	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
4	4	4	-	4	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 4 (dua) dokumen dari target Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen. Adapun capaian indikator kinerja Dokumen laporan SPIP yang disusun yaitu:

- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/I/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024.
- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025.
- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1527/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025.
- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.2449/BPSPL.2/TU.140/IX/2025 Tanggal 6 Oktober 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III dan Pemantauan MR Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 tidak terdapat perbedaan dengan capaian 4 (empat) laporan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam penyusunan Laporan SPIP MR setiap tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 sebanyak 4 Laporan, sementara itu, BPSPL Denpasar Laporan SPIP yang disusun Tahun 2025 sebanyak 4 Laporan. Sehingga jika dibandingkan Laporan SPIP yang disusun BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar masing-masing menyusun laporan SPIP sebanyak 4 Laporan,

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 4 (empat) laporan. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan Trwulan I, Triwulan II dan Triwulan III telah disampaikan ke Sekretariat DJPK tepat waktu.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian Kinerja Laporan SPIP lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebanyak 4 dokumen, sementara itu, Renstra DJPK Tahun 2029 tidak memiliki indikator yang sama. Sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/I/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024.
- b. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Januari Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.370/BPSPL.2/TU.140/II/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Januari Tahun 2025.
- c. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Februari Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.616/BPSPL.2/TU.140/III/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Februari Tahun 2025.
- d. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan I 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025
- e. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1021/BPSPL.2/TU.140/V/2025 tanggal 10 Mei 2025
- f. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Mei 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1296/BPSPL.2/TU.140/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.
- g. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1527/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025.
- h. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan Juli Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1880/BPSPL.2/TU.140/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Juli Tahun 2025.
- i. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan Agustus Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2160/BPSPL.2/TU.140/IX/2025 tanggal 10 September 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus 2025.
- j. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2449/BPSPL.2/TU.140/IX/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2025.
- k. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Bulan Oktober Tahun 2025 Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2749/BPSPL.2/TU.140/XI/2025 tanggal 10 November 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Oktober Tahun 2025.
- l. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Bulan November Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3129/BPSPL.2/TU.140/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan November Tahun 2025
- m. Menghadiri Sosialisasi Penerapan Pengendalian dengan Pendataan Manajemen Risiko Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025
- n. Melakukan pemantauan pengendalian internal Periode Januari s.d. Desember 2025 secara berkala.
- o. Pengisian kegiatan pengendalian internal Periode Januari s.d. Desember 2025 pada tautan https://linktr.ee/lapbul_spipsatkerkkp.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13.500.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp13.200.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-9. Realisasi Anggaran IKM 13 pada Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp40.500.000	Rp40.499.317 (100%)	-
TOTAL		Rp40.500.000	Rp40.499.317 (100%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.262/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2025.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Tahun 2026.

IKM 14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Perhitungan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dengan,

$$IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3lj} \times R_{3lj}$$

$$IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Disiplin

$W_{1j} \times R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
 $W_{2k} \times R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k
 $W_{3l} \times R_{3l}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l
 $W_{4m} \times R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Tabel 3.1.11-10. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
93,65	80	86,43	-7,22	80	108,03	85	101,68

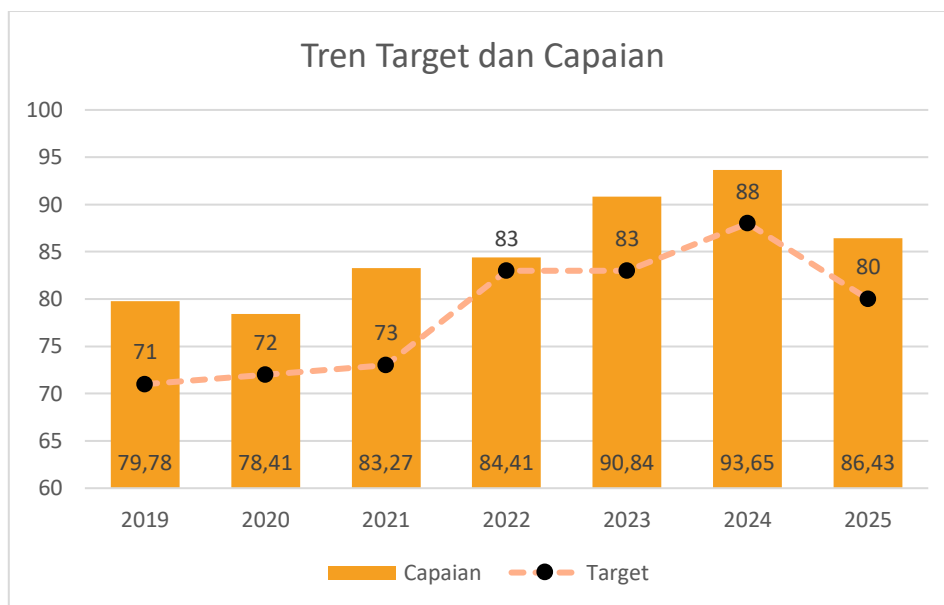
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 ini adalah sebesar 86,43 atau tercapai 107,82% dari target sebesar 80, sebagaimana Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan berdasarkan pemantauan pada aplikasi IP ASN KKP periode Desember 2025 yang dapat diakses pada tautan <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn>. Adapun rincian penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak meliputi Kualifikasi (21,93); Kompetensi (34,73); Kinerja (24,77); dan Disiplin (5).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 telah adalah 86,43 (108,03%) dari target tahunan 80. Capaian Tahun 2024 adalah 93,65 (106,42%) dari target semester 88). Terdapat peningkatan capaian 1,61% pada tahun 2025, tetapi nilai akhir mengalami penurunan nilai 7,22 pada tahun 2025.



Gambar 3.1.11-3. Tren IP ASN Tahun 2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Indeks Profesional ASN lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian Indeks Profesional ASN lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 sebesar 86,43. Sementara itu, BPSPL Denpasar capaian Indeks Profesional ASN Tahun 2025 sebesar 86,85. Sehingga jika dibandingkan Indeks Profesional ASN BPSPL Denpasar lebih tinggi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Pemantauan pengembangan kompetensi pegawai setiap triwulan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan oleh pegawai BPSPL Pontianak. Selain itu, adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal juga pegawai menjadi faktor pendukung.

Selanjutnya penurunan capaian IKM ini dimungkinkan karena Predikat Kinerja Pegawai didominasi oleh Predikat Baik, serta adanya Predikat Kinerja Cukup. Selain itu, kualifikasi pendidikan dari pegawai masih didominasi tingkat pendidikan S-1/D- IV.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPK 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra / Matrik Pendanaan 2025-2029 KKP adalah sebesar 85 pada tahun 2025, sedangkan capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak di tahun 2025 adalah sebesar 86,43. Sehingga capaian pada tahun 2025 telah berhasil melampaui target pada renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada Juli – September 2025
- Menyelenggarakan Kegiatan AYO PINTAR III (Tema: Membangun Budaya Tanggap Pertolongan Pertama) pada 23 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.849/BPSPL.2/TU.330/IV/2025.
- Penyampaian usulan Calon Penerima Beasiswa Program Master dan Doktoral dari Pemerintah RRT Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025.
- Penyampaian usulan Calon Peserta Pelatihan Singapore Cooperation Programme Tahun 2025/2026 tanggal 15 s.d. 21 Mei 2025.
- Penyampaian usulan Layanan Pencantuman Gelar diluar Tugas Belajar dan Izin Belajar tanggal 15 s.d. 21 Mei 2025.
- Menghadiri acara Sosialisasi Permen KP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan KKP tanggal 23 Mei 2025.
- Penyampaian Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar a.n. Aprizal Junaidi sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1206/BPSPL.2/KP.930/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.
- Penyampaian Usulan Nama Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level I sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1309/BPSPL.2/KP.510/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.
- Monitoring Capaian Indeks Profesionalitas ASN Seluruh Pegawai BPSPL Pontianak periode April s.d. Juni 2025.
- Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Internal meliputi Permohonan Penyampaian Laporan Triwulan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Diri Pegawai sesuai Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 13/BPSPL.2/TU.210/III/2025 tanggal 4 Maret 2025
- Pelaksanaan Layanan Kepegawaian yang ditujukan ke Pihak Eksternal BPSPL Pontianak meliputi (a) Usulan Calon Peserta Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Peningkatan Pendidikan; (b) Usulan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan; (c) Usulan Kenaikan Gaji Berkala; (d) Usulan Pencantuman Gelar Pegawai; (e) Surat Keterangan Lainnya; (f) Permohonan Izin Belajar; (g) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan (f) Lain-lain.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBC] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp47.600.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp47.567.952 atau sebesar 99,93% dari pagu bersih. Terdapat peningkatan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.11-11. Realisasi Anggaran IKM 13

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp 47.600.000	Rp 47.567.952 (99,93%)	-
TOTAL		Rp47.600.000	Rp47.567.952 (99,93%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2026, serta mekanisme pemberian izin belajar dan tugas belajar pegawai.

IKM 15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPSPL Pontianak}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan kepada BPSPL Pontianak}} \times 100$$

Keterangan:

- Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.
- Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Tabel 3.1.11-12. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
100	95	100	-	95	105,26	89	112.36

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2025 sebesar 100% dari target 95%, sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.233/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan IV Tahun 2025, tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah 100% (105,26% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80). Sehingga Capaian Tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 sebesar 100%, sementara itu, BPSPL Denpasar Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2025 sebesar 87%. Sehingga jika dibandingkan Capaian pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPSPL Pontianak lebih tinggi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh oleh rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 -2029, target indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Pengelolaan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra adalah sebesar 89 pada tahun 2025, sedangkan capaian persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak di tahun 2025 sebesar 100 atau tercapai dari target Renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 tidak ada audit dari Inspektorat Jenderal sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Tahun 2025.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK pada BPSPL Pontianak yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Temuan dalam LHP BPK pada BPSPL Pontianak}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target.**

Tabel 3.1.11-13. Capaian IKM 16 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-16	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
100	100	100		100	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Pontianak pada tahun 2025 adalah sebesar 100% atau tercapai dari target 100%, sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan Nomor 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025,

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Persentase Penyelesaian Temuan lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Pontianak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Tahun 2025 sebesar 100%. Sehingga jika dibandingkan Nilai Persentase Penyelesaian Temuan BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar sama-sama memperoleh nilai 100%..

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada Tahun 2025 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKM ini.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100%, sedangkan target pada Renstra DJPK Tahun 2029 tidak ada, sehingga indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dengan renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Tahun 2025.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2026.

IKM 17. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun standar penilaian antara lain:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48.
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit.
- Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 19,50, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 3,75.
- Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81.

Tabel 3.1.11-14. Capaian IKM 17 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	
IKM-17	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)	
Realisasi	Tahun 2025	Renstra DJPK 2025-2029

Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029		% Capaian thd Target 2025	
90,81	85	90,81		85	90,81	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 90,81 dari target 85, sesuai dengan Nota Dinas nomor 127/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian nilai **WBK BPSPL Pontianak** pada Tahun 2024 sebesar **90,81** dengan target **75**. Sementara itu, pada Tahun 2025 target yang ditetapkan meningkat menjadi **85**, dengan capaian tetap sebesar **90,81**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai capaian relatif sama dengan tahun sebelumnya, peningkatan target pada Tahun 2025 mencerminkan adanya standar kinerja yang lebih tinggi dan tetap mampu dipertahankan oleh BPSPL Pontianak.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 90,81, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2025 sebesar 87,57.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal serta menuju WBBM, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPK 2025 -2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana pada Renstra DJPK indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas DJPK (nilai) sedangkan pada Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak merupakan indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025 – 2029.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- Melakukan Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan I Bulan Maret Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.791/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025.

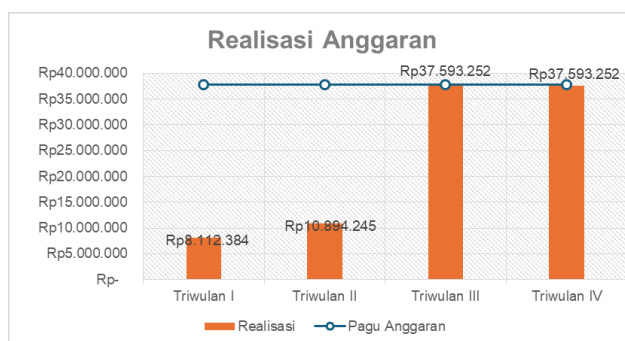
- b. Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan I Tahun 2025 pada 30 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.934/BPSPL.2/KP.750/IV/2025.
- c. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan II Bulan April tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.984/BPSPL.2/TU.140/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- d. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan II Bulan Mei tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1198/BPSPL.2/TU.140/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.
- e. Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 pada 2 Juni 2025.
- f. Melakukan penjaringan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan melalui tautan <https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7>.
- g. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan II pada tautan <https://shorturl.at/NnHhR>.
- h. Mengumpulkan dan menyusun data dukung setiap Pokja secara berkala.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP dengan pagu anggaran sebesar Rp37.600.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp26.400.000 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp10.894.245. Terdapat peningkatan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025. Besaran realisasi berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.11-15. Realisasi Anggaran IKM 17 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.051.B] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp37.600.000	Rp37.593.252	-
TOTAL		Rp37.600.000	Rp37.593.252	-



Gambar 3.1.11-4. Tren Realisasi Anggaran

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak sesuai Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 7/BPSPL.2/KP.750/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi pada tahun 2026 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas Tahun 2026. Diharapkan pada tahun 2026 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKM 18. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.11-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.11-17. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-18	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target2029	% Capaian thd Target 2025
81,35	80	99,40		80	100	80	80,5

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPSPL Pontianak pada Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 sebesar 99,40 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dari target yang ditetapkan sebesar 80, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025. Berdasarkan hasil verifikasi, unit organisasi BPSPL Pontianak menempati peringkat ke-2 tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peringkat pertama pada lingkup eselon I masing-masing.

Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam tata kelola kearsipan serta konsistensi dalam pemenuhan standar pengelolaan arsip yang akuntabel dan berkualitas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 81,35. Sementara itu, pada Tahun 2025 target nilai yang ditetapkan sebesar 80 dan berhasil direalisasikan sebesar 99,40. Dengan demikian, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan capaian yang signifikan sebesar +18,05 poin, sekaligus menunjukkan bahwa target kinerja pada Tahun 2025 tidak hanya tercapai namun juga terlampaui..

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 sebesar 99,40 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 86,11. Sehingga jika dibandingkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak lebih tinggi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak keikutsertaan kegiatan secara daring.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut adalah melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis kearsipan. Melalui kegiatan ini, kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip meningkat sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, meminimalkan kesalahan, serta mengurangi kebutuhan perbaikan berulang yang berpotensi menambah penggunaan waktu dan biaya..

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029. Target indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan sebesar 80 pada tahun 2025, sedangkan capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPSPL Pontianak di tahun 2025 sebesar 99,40. Sehingga capaian pada tahun 2025 telah berhasil melampaui target renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- a. Pembinaan Arsip Usul Musnah BPSPL Pontianak
- b. Penyusunan Arsip Usul Musnah dan Persiapan Penilaian Arsip pengisian ASKI
- c. Menyelenggarakan Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas pada tanggal 27 Mei 2025
- d. Pendampingan pengawasan kearsipan & asistensi arsip lingkup BPSPL Pontianak



Gambar 3.1.11-5. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.950.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp12.949.615. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari - Desember 2025) yaitu.

Tabel 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp12.950.000	Rp12.949.615 (100%)
TOTAL		Rp12.950.000	Rp12.949.615 (100%)

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini didukung dengan adanya Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.301/BPSPL.2/KP.440/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk proses penyeleksian arsip terhadap arsip yang akan diusulmusnahkan di lingkungan BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2025.

IKM 19. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

$$\text{Persentase RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IKM 19 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.11-19. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-19	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)						
Realisasi TW II 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan	Renstra DJPKRL 2025-2029
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
-	76	100	-	76	120	76	131.58

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 75%, sesuai dengan Nota Dinas 41/SJ.7/PL.410/I/2026 dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa tanggal 13 Januari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja yang sama. Tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024 karena tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100%, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Indikator Kinerja perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025 sebesar 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen pimpinan dalam memastikan seluruh paket pengadaan barang/jasa diumumkan melalui platform SIRUP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut mendorong peningkatan transparansi, ketertiban administrasi, serta akurasi perencanaan pengadaan. Selain itu, koordinasi yang baik antarunit kerja turut memastikan proses penginputan dan pemutakhiran data berjalan optimal. Untuk menjaga keberlanjutan capaian, dilakukan pemantauan secara berkala serta penguatan disiplin pelaporan agar seluruh paket pengadaan dapat terpublikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan .

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini tercermin dari pengelolaan serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kompetensi tersebut mendukung proses

pengadaan berjalan lebih efektif, tepat waktu, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun kebutuhan penggunaan sumber daya tambahan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029. Target indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen adalah sebesar 76 pada tahun 2025, sedangkan capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Belanja Keperluan Perkantoran berupa Pengadaan Seragam Pegawai beserta Atribut sebanyak 51 pcs sesuai SP Nomor SP.32/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025.
- b. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Mobil Kendaraan Roda Empat Operasional sebanyak 2 Unit selama 6 Bulan sesuai SP Nomor SP.33/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025.
- c. Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode April s.d. Juni 2025.
- d. Pembelian Barang Persediaan Barang Konsumsi.

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 30 Juni 2025 adalah Rp962.873.487 (45,25%) dari total Rp2.127.914.000. Adapun kegiatan lain terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada Triwulan II diantaranya adalah menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KKP nomor B.22/SJ.7/PL.430/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Penggunaan Aplikasi Monev PBJ.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi SIRUP lingkup BPSPL Pontianak periode Tahun 2026.

IKM 20. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. mengumumkan informasi publik,
- b. menyediakan informasi publik,
- c. sarana dan prasarana,
- d. kelembagaan, dan
- e. digitalisasi

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT	INTERVAL SKOR
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89,9
Cukup Informatif	60 – 79,9
Kurang Informatif	40 – 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Capaian IKM 20 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.11-20. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak						
IKM-20	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target 2025
-	91	100	-	91	120	95	105,26

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKM 20 Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak adalah sebesar 100 dari target 91, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KKP Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP Tahun 2025. Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu capaian indikator kinerja ini juga didukung dari keaktifan media sosial BPSPL Pontianak dalam menyampaikan informasi secara berkala. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target 91, persentase capaian kinerja mencapai **109,89%**.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Pada tahun 2024 juga tidak terdapat indikator kinerja tersebut sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak adalah sebesar 100 dari target 91, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebesar 100.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu keaktifan dalam melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID BPSPL Pontianak.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan karena melibatkan pegawai yang kompeten serta telah mengikuti pelatihan pelayanan publik. Selain itu, penugasan Tim PPID melalui Surat Tugas dilaksanakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat wilayah kerja. Penguatan kapasitas SDM juga didukung melalui pelaksanaan bimbingan teknis mengenai keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh BPSPL Pontianak, sehingga pemahaman dan kemampuan petugas dalam memberikan layanan informasi semakin meningkat.

6. Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Renstra DJPK 2025 - 2029

Perbandingan capaian kinerja dengan target pada Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa target indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Renstra DJPK ditetapkan sebesar 95 pada tahun 2029. Sementara itu, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak pada tahun 2025 telah mencapai nilai 100. Dengan demikian, capaian tahun berjalan telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Menindaklanjuti Surat Permohonan Data Rencana Kegiatan Juli – Desember sesuai surat nomor B.779/DJPK.1/HM.330/VI/2025
- b. Menyusun Draf Siaran Pers Kementerian Kelautan Nomor SP.268/SJ.5/VI/2025 tentang Penanganan Dugong Terdampar di Kalimantan Barat pada bulan Juni 2025
- c. Menyusun agenda setting kegiatan BPSPL Pontianak bulan April s.d. Juni 2025.
- d. Tindak Lanjut atas Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor B.5033/SJ.5/HM.470/IX/2025 tanggal 20 September 2025 hal Perpanjangan Waktu Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025
- e. Melakukan publikasi kegiatan BPSPL Pontianak bulan April s.d. Juni 2025 melalui media sosial.
- f. Tindak lanjut atas Surat Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor B.5893/SJ.5/HM.470/XI/2025 tanggal 12 November 2025 hal Hasil Verifikasi SAQ Monitoring SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025



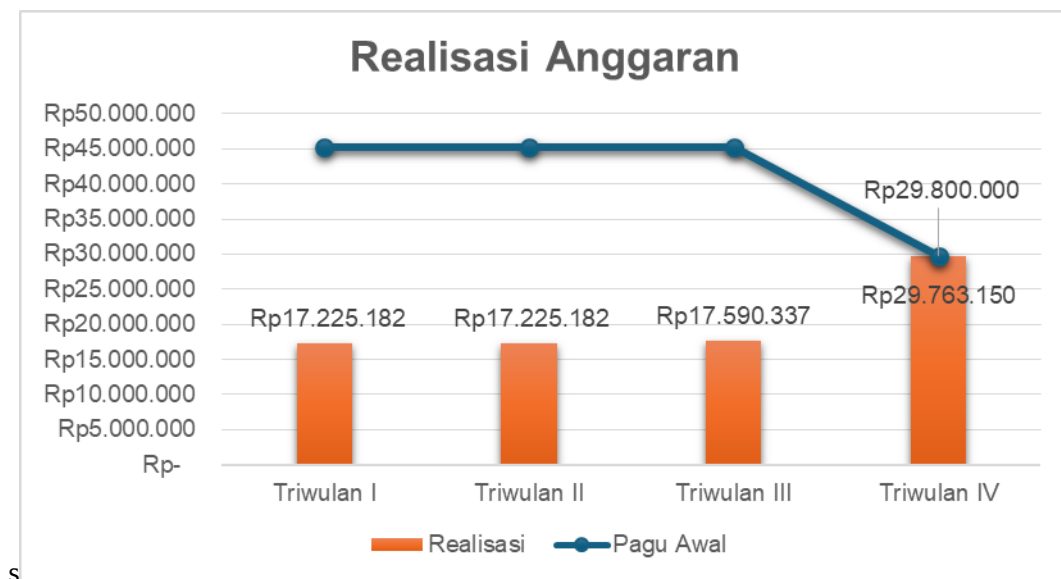
Gambar 3.1.11-6. Penghargaan Predikat INFORMATIF

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan dengan pagu anggaran sebesar Rp29.800.000. Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp29.763.150. Rincian realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.11-21. Realisasi Anggaran IKM 20 Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi
1.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp 29,800,000	Rp 29,763,150
TOTAL		Rp 29,800,000	Rp 29,763,150



Gambar 3.1.11-7. Tren Realisasi Anggaran

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada indikator kinerja ini belum terlihat.

Sasaran Kegiatan 11 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 21. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
- Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik perhitungan indikator kinerja ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 0-1. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

SK-21	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						
IKU-21	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)						
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025					Renstra DJPRL 2025-2029	
	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Kenaikan Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2029	% Capaian thd Target Renstra
	3	2	-	2	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, Desember Tahun 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak yaitu 2 Dokumen yang terdiri dari dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut dan dokumen monitoring pemanfaatan ruang laut. Verifikasi pemanfaatan ruang laut berupa penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan terhadap 94 permohonan KPPRL, dengan hasil diterbitkannya 45 persetujuan KPPRL dan 9 konfirmasi KKPRL, sementara permohonan lainnya masih dalam proses perbaikan dan sebagian telah ditolak. Monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 dilakukan terhadap 31 lokasi, yang tersebar di 11 kabupaten/kota di 4 provinsi.

Diantara 31 lokasi tersebut, 24 diantaranya berupa kegiatan identifikasi dan/atau monitoring pemanfaatan ruang laut. Kegiatan monitoring PKKPRIL dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 11 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 2 Kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 4 Kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 1 Kabupaten/kota. Sebanyak 7 subyek hukum/nomor KPPRL berpredikat “Taati”. Sebanyak 13 subyek hukum/nomor KPPRL berpredikat “Taati dengan Catatan” dan sebanyak 4 subyek hukum/nomor KPPRL berpredikat “Tidak Taati”.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dengan target 3 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 target 2 dokumen dengan capaian 2 dokumen. Tahun 2024 terdapat dokumen sosialisasi pemanfaatan ruang laut, verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut, sedangkan tahun 2025 terdapat verifikasi pemanfaatan dan dokumen monitoring pemanfaatan ruang laut.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dari kegiatan verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut, hal ini disebabkan karena saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring. Selain itu, penggunaan system aplikasi berbasis web *E-Sea* mendukung dalam penggunaan dan penguatan ruang laut. System aplikasi berbasis web dan mobile ini memiliki fungsi dan kelebihan untuk mendukung penggunaan dan penguatan pengelolaan pemanfaatan ruang laut, proses ini dapat mempersingkat waktu proses perizinan pemanfaatan dan pengendalian ruang laut.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 – 2029

Tidak terdapat indikator yang sama, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu:

a. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BPSPL Pontianak di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.



Gambar 0-1. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

b. Verifikasi Permohonan KKPR di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Kegiatan verifikasi permohonan KKPR berupa penugasan dari pusat ataupun pendampingan penilaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan penilaian teknis dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Jika dibutuhkan, BPSPL Pontianak juga melakukan verifikasi lapangan untuk memverifikasi kondisi lokasi dan kesesuaian dengan informasi yang diberikan dalam permohonan. Sepanjang Triwulan IV tahun 2025, BPSPL Pontianak telah melaksanakan penilaian teknis terhadap 113 Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR) yang tersebar di 5 provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak. Pelaksanaan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat terdapat 10 pelaku usaha/subyek hukum pemanfaatan ruang laut yang tersebar di 4 kab/kota. Kalimantan Selatan terdapat 11 pelaku usaha/subyek hukum pemanfaatan ruang laut yang tersebar di 2 kab/kota. Kalimantan Timur terdapat 9 pelaku usaha/subyek hukum pemanfaatan ruang laut yang tersebar di 4 kab/kota. Kalimantan Utara terdapat 1 subyek hukum yang tersebar di 1 kab/kota.

Tabel 0-2. Jumlah Penilaian Teknis di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Triwulan IV 2025

Bulan	Lokasi					Total
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	
April				2		2
Mei			2	2		4
Juni	1	1	2	6		10
Juli			5	9	2	16
Agustus			1	4	1	6
September			1	7	4	12
Total			11	30	7	50

7. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar Rp655.400.000. Dengan rincian Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp198.899.000 dengan realisasi Rp198.868.6000 dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp456.511.000 realisasi Rp455.353.673.

Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 0-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
-----	----------------------	------	-----------	--------

1	[2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut	Rp198.889.000	Rp198.868.600 (99,99%)	-
2	[2366.PBT.009] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp456.511.000	Rp455.353.673 (99,75%)	
TOTAL		Rp655.400.000	Rp654.222.273 (99,82%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Tahun 2025 yaitu Rp654.222.273 atau 99,82% dari pagu anggaran sebesar Rp655.400.000 Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.



Gambar 3.1.1-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 Tahun 2025

8. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

9. Rencana Aksi Tahun 2026

Tahun 2026 BPSPL Pontianak tidak mendapatkan tugas untuk penilaian teknis KKPRL karena ada perubahan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja yang berlaku.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki Indikator Kinerja yang serupa sebanyak 19 indikator dari 20 indikator kinerja di BPSPL Pontianak. Terdapat 5 (lima) perbedaan indikator capaian yang tidak dapat dibandingkan dan 16 indikator yang dapat dibandingkan.

Tabel 0-1. Perbandingan Capaian UPT PSPL

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Denpasar	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55	59,10	Tidak ada	Tidak ada
2	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di	1	1	1	1

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Denpasar	
		Target	Capaian	Target	Capaian
	Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)				
3	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24	24	30	30
4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1	4	Tidak ada	Tidak ada
5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7	10	Tidak ada	Tidak ada
6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4	7	7	7
7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	80	100	80	90
8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1	1	1	1
9	Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)	3	3	Tidak ada	Tidak ada
10	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	70	88,25	70	86,90
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	89	95,79	89,5	94,11
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5	98,57	71,5	97,86
13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4	4	4	4
14	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	80	86,43	80	86,51
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95	100	95	100
16	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100	100	100	100
17	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85	90,81	75	75

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Denpasar	
		Target	Capaian	Target	Capaian
18	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80	99,40	80	80
19	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76	100	76	76
20	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91	100	91	91
21	Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak	2	2	Tidak ada	Tidak ada

3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-032.07.2.477425/2025 tanggal 1 Desember 2024. Anggaran di BPSPL Pontianak mengalami beberapa perubahan berupa penambahan dan/atau pergeseran pagu anggaran sebagai berikut.

Anggaran Awal	Pergeseran Anggaran	Anggaran Revisi	Tanggal	Keterangan
16.846.280.000	-	-	1 Desember 2024	-
16.846.280.000	-	16.846.280.000	2 Juli 2025	Buka Blokir PNB
16.846.280.000	14.210.000.000	31.056.280.000	31 Oktober 2025	Penambahan Anggaran Dana PNB
31.056.280.000	510.701.000	30.545.579.000	12 Desember 2025	Pergeseran anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen

Total pagu anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar **Rp30.545.579.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp26.199.742.479** atau **85,77%** dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 0-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025

	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Revisi (Rp)	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Pagu Revisi (%)	Persentase Realisasi Pagu Efektif (%)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	PNP	16.360.000.000	2.446.260.000	13.913.740.000	13.287.941.675	81,22	95,50
2.	(2363) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	PNP	700.000.000	0	700.000.000	699.757.450	99,97	99,97
3.	(2365) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PNP	200.000.000	0	200.000.000	199.822.692	99,91	99,91
4.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	PNP	2.375.000.000	585.600.000	1.789.400.000	1.784.888.953	75,15	99,75
5.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10.910.579.000	0	10.910.579.000	10.227.331.709	93,73	93,73
Total			30.545.579.000	3.031.860.000	27.513.719.000	26.199.742.479	85,77	95,22

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 0-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu Awal (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Tahun 2025	7.872.395.000	7.191.137.406	91,35
5.	(52) Barang	Tahun 2025	15.452.684.000	11.907.139.807	77,06
9.	(53) Modal	Tahun 2025	7.220.500.000	7.101.465.266	98,35

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal Desember 2025)

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan revisi terakhir realisasi untuk belanja pegawai sebesar 91,35%, untuk belanja barang sebesar 77,06% dan untuk belanja modal 98,35%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp7.191.137.406 (91,35%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2025 sebesar Rp11.907.139.807 atau 77,06% dari Pagu anggaran Rp15.452.684.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp7.101.465.266 (98,35%) dengan pagu Rp7.220.500.000

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian IKU yang ditargetkan pada Tahun 2025 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawaasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 59,10 dari target 55 sehingga persentase capaian sebesar **107,54%**
2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan Kawasan Konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) tercapai 1 provinsi dengan target 1 provinis sehingga persentase capaian sebesar **100%**
3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai sebanyak 24 dengan target 24 orang sehingga persentase sebesar **100%**
4. Kerjasama Konservasi yanag Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 4 kesepakatan dengan target 1 Kesepakatan dengan Persentase **120%**
5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi serta Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak **10 jenis** dari target **7 jenis**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak **9 jenis** dari target **4 jenis**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**.
7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai sebesar **100** dari target **80**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
8. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dengan target 1 dokumen persentase capaian kinerja mencapai **100%**
9. Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) tercapai **3 Lokasi** dengan target **3 lokasi** persentase mencapai **100%**
10. Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL Pontianak (nilai) tercapai **88,25** dengan target **70** sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **95,79** dengan target 89 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **107,63%**.
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **98,57** dengan target 71,5 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**
13. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **4 Dokumen** dari target **4 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
14. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai **86,43** dengan target **80** sehingga persentase capaian kinerja mencapai **108,04%**.
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **100** dari target **95** sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
16. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dengan target 100% sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%**
17. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **90,81** dengan target 85 sehingga persentase capaian kinerja mencapai **106,84%**
18. Nilai Pengawasan Kearsipan internal BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **99,40** dengan target **80**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **120%**.
19. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **76%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
20. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target **91**, persentase capaian kinerja mencapai **109,89%**.

21. Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) dengan capaian 2 dokumen dengan target 2 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar **100%**

4.3. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPNP.
2. Melakukan koordinasi terkait anggaran Lautra dan mekanisme yang berlaku
3. Melakukan penyesuaian RPD dan rencana aksi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPNP.

4.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari rekomendasi laporan kinerja periode sebelumnya sebagai upaya optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.

Tabel 3.1.11-1 Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I 2025			
1.	- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan/Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPNP - Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja yang baru.	Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu telah dilakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran melalui rapat pembahasan anggaran PNBPNP secara daring. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNBPNP Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNBPNP untuk pencairan dana PNBPNP yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPNP belum dapat dilaksanakan sehingga tetap perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan anggaran yang bersumber dari PNBPNP.	https://drive.google.com/drive/folders/1tV08uRl48g5b_Uimk68U6FKnUiRWlBML?usp=drive_link
Triwulan II 2025			

2.	- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan/Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP. - Melakukan penyesuaian RPD dan rencana aksi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP	telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi http://kinerjaku.kkp.go.id. Namun, masih perlu melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana dan rencana aksi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP.	https://drive.google.com/drive/folders/13WWNvUdU4ZtlH923NXkXaR0JW_1gppXP?usp=drive_link
Triwulan III 2025			
3.	Menambahkan data dukung pada laporan SPIP	Telah ditambahkan data dukung laporan SPIP	https://drive.google.com/drive/folders/1iNYN5ppRmtO4BKwI2R_Vys5sQWwJr7ZM?usp=drive_link

Demikian laporan kinerja (LKj) tahun 2025 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.



LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak Awal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sesondirjenpr@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif Iwan Taruna Alkadrie**

Jabatan : **Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta²⁴ Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55
2.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Dinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak	7.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak (Dokumen)	2
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPPL Pontianak	9.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPPL Pontianak (Nilai)	88
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPPL Pontianak (Nilai)	92
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPPL Pontianak (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPPL Pontianak (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPPL Pontianak (Indeks)	87
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPPL Pontianak (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPPL Pontianak (%)	100
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPPL Pontianak (Nilai)	85

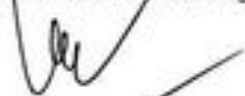
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76
		19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi dan Biota Pesisiran	4.350.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.421.280.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025		16.846.280.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Syarif Iwan Taruna Alkadrie

2. Perjanjian Kinerja Revisi I



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3510070 (SACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAI www.kkp.go.id SURTEL responstionpr@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif Iwan Taruna Alkadrie**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Syarif Iwan Taruna Alkadrie

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55
2.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Dinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Diestarkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	80
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	9.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	70
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	89
		11.	Nilai Kinerja Petencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	80
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		17.	Nilai Pengawasan Keaslian Internal BPSPK Pontianak (Nilai)	80
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Dimumkan pada SIRUP Lingkup BPSPK Pontianak (%)	76
		19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPK Pontianak (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	4.350.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11.421.280.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025		15.971.280.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Aikadrio

3. Perjanjian Kinerja Revisi II



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sesprdirjenpri@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif Iwan Taruna Alkadrie**

Jabatan : **Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025		875.000.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp585.600.000 sehingga Pagu Efektif BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar Rp289.400.000.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

4. Perjanjian Kinerja Revisi III



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTA POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3515079 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAI www.kkp.go.id SUREL ditjenpp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syarif Iwan Taruna Alkadrie**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

BASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55
2.	Terfasilitasnya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Dinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Diestarkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyedartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak (Nilai)	80
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terlaksananya Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari pada Lokasi di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak	9.	Lokasi yang dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPPL Pontianak (Lokasi)	3
10.	Tereajudhya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPPL Pontianak	10.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPPL Pontianak (Nilai)	70
		11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPPL Pontianak (Nilai)	89
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPPL Pontianak (Nilai)	71.5
		13.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPPL Pontianak (Dokumen)	4
		14.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPPL Pontianak (Indeks)	80
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPPL Pontianak (%)	95
		16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPPL Pontianak (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		17.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85
		18.	Nilai Pengawasan Keaslian Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80
		19.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	70
		20.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Pesisiran	16.360.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	700.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	10.910.579.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025		28.170.579.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

5. Sertifikat Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya





 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada MUHAMMAD NUR Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada MOH. ALI SADIKIN Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada MEDY Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada Masrul Jaya M Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada JUAIDI Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada Herdyanto Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada HANDRI Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK SERTIFIKAT NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025 Diberikan kepada ERIC SAPUTRA Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025  Ditandatangani Secara Elektronik SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Berita Acara EVIKA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3819070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjen@kkp.go.id

BERITA ACARA EVALUASI PENILAIAN EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Sabtu, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh Lima bertempat di Kuta Paradiso Hotel - Bali, telah dilakukan evaluasi terhadap Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penilaian dilakukan dengan susunan tim penilai dan sekretariat sebagai berikut:

1. Dr. Tantri Lisdiawati, M.Si, Kasubdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri
2. Wendy Fadri Arianyah, S.Pi, M.Si, M.Sc, AP/IK Ahli Madya, Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Muhamad Ikhsa Maulana, S.M., Penilik Kepelabuhanan, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
4. Riky Pramudita, PELP Ahli Pertama, Direktorat Konservasi Ekosistem, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Andrian Saputra

Jabatan : PELP Ahli Muda, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 895 dari total skor 1075 (83%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 295 dari total skor 430 (69%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria Output | : 340 dari total skor 650 (52%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria Outcome | : 50 dari total skor 625 (8%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 1580 dari total skor 2780 (56,10%) |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Timur dinyatakan pada tahun 2025 mempunyai nilai akhir sebesar **56,10%** dengan status **Perak (Dikelola Optimum)**. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM untuk fungsi pengelolaannya.
2. Perlu disusun dan ditetapkan melalui Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari masing – masing SDM pengelola sesuai dengan kriteria penilaian (biofisk, sosial ekonomi, pelayanan, pengawasan, penyadaran, dan administrasi).
3. Perlu merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan Dokumen Rencana Pengelolaan yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN/RKP).
4. Perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengukuran dan pemantauan sumber daya kawasan.
5. Perlu menyusun dan melengkapi SOP terkait pemanfaatan kawasan konservasi.
6. Perlu menambahkan elemen kawasan konservasi di dalam sistem informasi pada instansi

- pengelola.
7. Perlu menyusun mekanisme sistem pelaporan pelanggaran/ancaman yang terdokumentasi.
 8. Pemanfaatan Kawasan Konservasi agar disesuaikan dengan PERMENKOP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
 9. Perlu meningkatkan program pendampingan masyarakat disekeliling Kawasan Konservasi.
 10. Perlu menyusun kajian Daya Dukung Kawasan Konservasi.
 11. Perlu dilakukan penyusunan kriteria untuk menentukan kondisi zona inti target spesies yang membedakannya dengan selain zona inti.
 12. Perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi data kelompok masyarakat yang berada di sekitar dan/atau dalam kawasan konservasi yang disertai dengan jenis pekerjaan, pendapatan, dan hasil tangkapan.
 13. Penetapan nilai yang tercantum pada dokumen ini bukan merupakan hasil akhir (final) sebelum penetapan nilai secara resmi dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Ditjen PK.
 14. Daftar hadir merupakan satu kesatuan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Bali, 8 November 2025

Tim Penilai Kelompok V

BPSPL Pontianak



Tantri Lisdiawati



Andrian Saputra



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 101 50 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519073 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kemla.go.id SUREL ditjen@kemla.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PENILAIAN EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh Lima 2025 bertempat di Kuta Paradiso Hotel - Bali, telah dilakukan verifikasi terhadap Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Dr. Tantri Lisdawati, M.Si, Kasubdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri
2. Wendy Fadri Arianyah, S.Pi, M.Si, M.Sc, APJK Ahli Madya, Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Muhamad Ikhsa Maulana, S.M., Penilik Kepelembuan, Direktorat Kepelembuan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
4. Andrian Saputra, PELP Ahli Muda, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
5. Reky Pramudia, PELP Ahli Pertama, Direktorat Konservasi Ekosistem, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM untuk fungsi pengelolaannya.
2. Perlu disusun dan ditetapkan melalui Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari masing – masing SDM pengelola sesuai dengan kriteria penilaian (biologis, sosial ekonomi, peyeyanan, pengawasan, penyadartahuan, dan administrasi).
3. Perlu merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan Dokumen Rencana Pengelolaan yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN/RKP).
4. Perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengukuran dan pemantauan sumber daya kawasan.
5. Perlu menyusun dan melengkapi SOP terkait pemanfaatan kawasan konservasi.
6. Perlu menambahkan elemen kawasan konservasi di dalam sistem informasi pada instensi pengelola.
7. Perlu menyusun mekanisme sistem pelaporan pelanggaran/ancaman yang terdokumentasi.
8. Pemantauan Kawasan Konservasi agar disesuaikan dengan PERMENKP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemantauan Kawasan Konservasi.
9. Perlu meningkatkan program pendampingan masyarakat disekitar Kawasan Konservasi.
10. Perlu menyusun kajian Daya Dukung Kawasan Konservasi.
11. Perlu dilakukan penyusunan kriteria untuk menentukan kondisi zona inti target spesies yang membedakannya dengan selain zona inti.
12. Perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi data kelompok masyarakat yang berada di sekitar dan/atau dalam kawasan konservasi yang disertai dengan jenis pekerjaan, pendapatan, dan hasil tangkapan.
13. Penetapan nilai yang tercantum pada dokumen ini bukan merupakan hasil akhir (final) sebelum penetapan nilai secara resmi dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Ditjen PK.
14. Daftar hadir merupakan satu kesatuan dari berita acara ini

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Bali, 8 November 2025

Tim Penilai Kelompok V

BPSP, Pontianak

Tantri Lisdawati

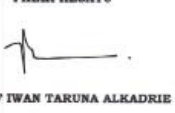
Andrian Saputra

7. Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Pertanian UNTAN

  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA NOMOR : B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 NOMOR : 1187/UN22.3/PM.01.01/2025 TENTANG PENGUATAN PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE Jabatan: Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama : DENAH SUSWATI Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura	(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.  PIHAK KEDUA DENAH SUSWATI  PIHAK KESATU SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
--	--

2. Perjanjian Kerja Sama dengan POLTEKNIK Negeri Pontianak

  PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR : B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025 NOMOR : 4172/PL16/KS.00.00/2025 TENTANG PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE Jabatan: Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama : TOPAN PRIHANTORO Jabatan : Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama, Politeknik Negeri Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78124, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	Telepon : (0561) 736180 Handphone : 081352177797 Surel Elektronik : kerjasama@polnep.ac.id ikp@polnep.ac.id (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 14 PERUBAHAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.  PIHAK KEDUA TOPAN PRIHANTORO  PIHAK KESATU SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
---	--

3. Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)

 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN YAYASAN INISIASI ALAM REHABILITASI INDONESIA (YIARI) NOMOR : B.359/BPSPL.2/KS-320/II/2025 NOMOR : 001/PR-KTG/II/2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN RIOTA PERAIRAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERANCAM FUNAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Hussein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : SILVERIUS OSCAR UNGGUL Jabatan : Ketua Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) yang berkedudukan di Jalan Curug Nangko, Kampung Sinar Wang, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16610, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Paraf 15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.  PIHAK KEDUA SILVERIUS OSCAR UNGGUL  PIHAK KESATU SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
--	---

4. Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan WEBE Konservasi Ketapang

 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN YAYASAN WEBE KONSERVASI KETAPANG NOMOR : B.360/BPSPL.2/KS-320/II/2025 NOMOR : 14.008/WEBE-KTG/II/2025 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Hussein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : SETRA KUSUMARDANA Jabatan : Ketua Yayasan WeBe Konservasi Ketapang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WeBe Konservasi Ketapang yang berkedudukan di Jalan SM Sudisno Nomor 49A, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 78111, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.  PIHAK KEDUA SETRA KUSUMARDANA  PIHAK KESATU SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
---	---

8. Rekapitan SAJI

Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi Teripang Non Appendiks Berdasarkan Bulan				
No	Bulan	Berat Produk (Kg)	Jumlah Rekomend	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	2028,356	5	5
2	Februari	1.794,41	4	3
3	Maret	1.926,62	7	5
4	April	2.092,40	7	5
5	Mei	2.645,78	8	6
6	Juni	3.469,22	7	6
7	Juli	3.285,79	10	8
8	Agustus	1.920,66	6	4
9	September	1.760,21	7	5
10	Oktober	2029,65	5	4
11	November	1995,536	7	7
12	Desember	1771,58	6	6
Grand Total		26.720,20	79	15

Rekapitulasi SAJI Barang Bawaan Berdasarkan Bulan				
No	Bulan	Jumlah Ikan	Jumlah SAJI	Jumlah Pemohon
1	Januari	24	17	16
2	Februari	25	14	14
3	Maret	19	11	11
4	April	8	5	5
5	Mei	12	8	8
6	Juni	12	8	8
7	Juli	22	14	14
8	Agustus	15	8	8
9	September	3	3	3
10	Oktober	16	10	10
11	November	10	5	4
12	Desember	13	7	7
Grand Total		179	110	86

Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi LN Hiu dan Pari Non Appendiks Berdasarkan Rekomendasi Terbit Perbulan				
No	Bulan	Berat Produk (Kg)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	800	1	1
2	Februari	1.200	1	1
3	Mei	1.500	1	1
4	Juli	800	1	1
5	Agustus	800	1	1
6	Oktober	960	1	1
7	Desember	259,32	2	2
Grand Total		6.319	8	4

REKAPITULASI PERDAGANGAN REKOMENDASI LUAR NEGERI TERIPANG NON APPENDIKS (Look Alike Species)				
Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi Teripang Non Appendiks Berdasarkan Bulan				
No	Bulan	Berat Produk (Kg)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	64,2	1	1
Grand Total		64,2	1	1
				MUHAMMAD EDY JHON

REKAPITULASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI ARWANA KALIMANTAN				
Rekapitulasi Perdagangan LN Arwana Kalimantan Berdasarkan Jenis				
No	Jenis Arwana	Jumlah Ikan	Jumlah Bt	Jumlah Pelaku Usaha
1	Scleropages formosus (Banjar Red)	1.685	26	2
2	Scleropages formosus (Golden)	145	5	3
3	Scleropages formosus (Green)	20	2	1
4	Scleropages formosus (Super red)	144.508	792	20
Grand Total		146.358	818	20
Rekapitulasi Perdagangan LN Arwana Kalimantan Berdasarkan Bulan Terbit Dokumen SAJI				
No	Bulan	Jumlah Ikan	Jumlah Bt	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	8.696	52	14
2	Februari	15.252	75	16
3	Maret	14.832	79	15
4	April	6.349	45	12
5	Mei	8.620	42	12
6	Juni	11.692	59	11
7	Juli	14.230	81	14
8	Agustus	10.606	70	14
9	September	9.881	54	14
10	Oktober	11.403	73	14
11	November	14.880	87	15
12	Desember	19.917	101	15
Grand Total		146.358	818	20

REKAPITULASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI ARWANA BRAZIL				
Rekapitulasi Perdagangan DN Arwana Brazil Berdasarkan Bulan Terbit SAJI				
No	Bulan	Jumlah Ikan	Jumlah SAJI	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	55.000	10	3
2	Februari	32.300	6	3
3	Maret	17.600	8	2
4	April	33.442	9	2
5	Mei	18.203	6	2
6	Juni	46.120	10	2
7	Juli	11.100	5	2
8	Agustus	19.341	4	2
9	September	35.000	8	3
10	Oktober	106.800	17	4
11	November	64.636	18	4
12	Desember	42.602	13	4
Grand Total		482.144	114	4

REKAPITULASI VERIFIKASI PEMANENAN IKAN ARWANA				
Rekapitulasi BAP Verifikasi Pemanenan Ikan Arwana Berdasarkan Bulan				
No	Bulan	Jumlah Ikan	Jumlah BAP	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	11.992	46	24
2	Februari	15.231	48	26
3	Maret	15.186	34	17
4	April	14.260	36	21
5	Mei	17.223	42	24
6	Juni	23.249	54	27
7	Juli	19.890	54	24
8	Agustus	12.602	50	27
9	September	20.086	55	25
10	Oktober	22.511	66	30
11	November	15.118	39	25
12	Desember	23.486	56	27
Grand Total		210.834	587	52

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT ARWANA				
Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Arwana Perbulan				
No	Bulan	Jumlah Sertifikat	Jumlah Permohonan	Jumlah Pelaku Usaha
1	Januari	5.629	42	19
2	Februari	19.588	99	24
3	Maret	22.478	101	21
4	April	19.860	86	20
5	Mei	22.946	84	23
6	Juni	21.692	75	27
7	Juli	17.409	67	24
8	Agustus	16.288	63	25
9	September	12.424	44	18
10	Oktober	27.957	89	27
11	November	19.368	65	21
12	Desember	26.379	63	18
Grand Total		232.018	878	48

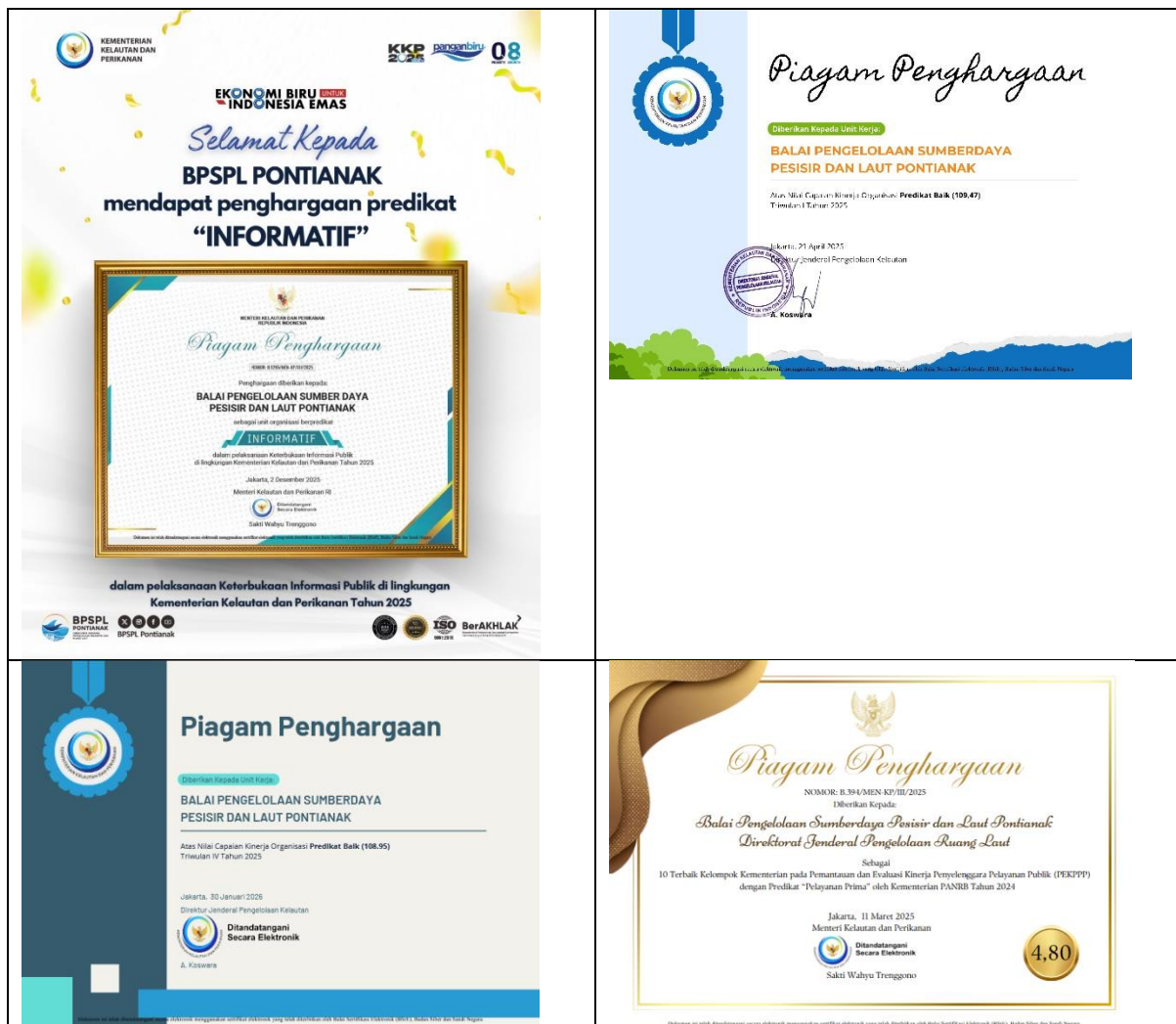
Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Keberangkatan Perjenis Dokumen					
No	Jenis Dokumen	Jenis Ikan	Jumlah Ikan	Jumlah Dokumen	Jumlah Pelaku Usaha
1	SAJI DN	Arwana Silver	558.208	282	13
2		Arwana Kalimantan	85.185	1.600	42
3		Hiu dan Pari	1.082	11	3
4	SAJI LN	Arwana Silver	418.300	97	6
5		Arwana Kalimantan	124.966	695	23
6	SAJI Kontes	Arwana Kalimantan	43	5	3
7	SAJI Pemerintah	Hiu dan Pari	30	2	1
8	Tentengan	Arwana Kalimantan	13	9	8
9	Rekomendasi	Hiu dan Pari	12	1	1
Grand Total				2.702	68

REKAPITULASI PEMERIKSAAN PENANDAAN ARWANA					
Rekapitulasi Pemeriksaan Penandaan Ikan Arwana Perbulan					
No	Bulan	Jumlah Ikan	Jumlah Permohonan	Jumlah Pelaku Usaha	
1	Januari	5.326	34	10	
2	Februari	12.676	77	17	
3	Maret	16.535	89	16	
4	April	12.972	57	14	
5	Mei	11.220	68	18	
6	Juni	9.061	52	14	
7	Juli	11.643	65	16	
8	Agustus	9.855	59	17	
9	September	9.633	52	14	
10	Oktober	10.664	70	17	
11	November	8.973	52	16	
12	Desember	11586	68	17	
Grand Total		130.144	743	30	

9. Matriks Nilai Minimum

NILAI KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN BIOTA PERAIRAN						
BP8PL PONTIANAK						
TAHUN 2025						
NO	A SPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	HABIL	NILAI INDIKATOR	KETERANGAN
1 Penerbitan SAJI DN (40%)						
	- Dashboard SAJI	10%	Diupdate, data lengkap	100	Dashboard SAJI dilakukan Update secara berkala dengan data yang ditampilkan berupa Jumlah SAJI terbit, Jumlah ikan yg dimohonkan, berat ikan, selain itu jumlah PNEP yang diterima setiap bulan dan grafik harian	Dashboard pelayanan SAJI BP8PL Pontianak https://lookerstudio.google.com/s/ix45B9XV_e4
	- Rekap Penerbitan	10%	Rekap, data lengkap	100	Seluruh dokumen yang terbit dilakukan rekap setiap harinya dan ditampilkan pada dashboard	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JN9jpxvASd1Q6DnUeRr73KX1LqAaP
	- Dokumen dipersiapkan	10%	Dipersiapkan, data lengkap	100	Seluruh dokumen yang terbit dilakukan rekap setiap harinya dan ditampilkan pada dashboard	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1poad_YhM2TyipQBZ8j35QomK32Jy
	- Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan	40%	Besuai Baku Mutu	100	SAJI DN yang diproses sesuai dengan baku mutu SOP B. 572/ BP8PL 2/OT/31/01/2022	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AeYVeo6ITFM6oLda2o6aQx7Am9_gg
	- Penanganan Pengaduan	10%	Direspon, <14 X 24 Jam	100	Sepanjang tahun 2025 didapatkan sebanyak 138 kali pengaduan kepada BP8PL Pontianak dimana 5 kali diantaranya merupakan pengaduan terhadap proses penerbitan SAJI. Sumber pengaduan tersebut berasal dari Tatap muka serta media sosial BP8PL Pontianak. Seluruh pengaduan terkait SIPU tersebut telah tuntas ditindaklanjuti dengan kurun waktu < 14 X 24 Jam. Seluruh pengaduan selanjutnya direkapitulasi dan disusun kedalam keadalam penyampalan data dukung serta laporan semesteran serta disampaikan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Penyampalan Data dukung pengaduan dilakukan setiap bulan sedangkan laporan pengaduan disampaikan setiap Semester. Data dukung meliputi Surat penyampalan data dukung / bulan dan laporan Pengaduan semesteran	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hQ4y82aac8_RLkXWfEWfJ05mZMx1Xn6
	- Jumlah permohonan diproses	10%	100%	100	Seluruh dokumen SAJI DN diproses sebanyak 100% dimana selama tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 2.207 SAJI DN yang meliputi SAJI DN dengan komoditas Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Anjasa Silver dan Napoleon	Dashboard pelayanan SAJI BP8PL Pontianak https://lookerstudio.google.com/s/ix45B9XV_e4
	- Penggunaan Sistem Informasi	10%	Digunakan seluruhnya	100	Pelayanan SAJI DN di BP8PL Pontianak menggunakan aplikasi dari Dit. K8G yakni E-SAJI dalam seluruh prosesnya dan didukung oleh aplikasi PASTIQU untuk melengkapi persyaratan SAJI DN berupa sertifikat jenis ikan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jax58oAGxYm1Om1mNvFvwwGEQDk63
2 Penerbitan Rekomendasi (40%)						
	- Dashboard Rekomendasi	10%	Diupdate, data lengkap	100	Dashboard Rekomendasi dilakukan Update secara berkala dengan data yang ditampilkan berupa Jumlah SAJI terbit, Jumlah ikan yg dimohonkan, berat ikan, selain itu jumlah PNEP yang diterima setiap bulan dan grafik harian	Dashboard pelayanan rekomendasi BP8PL Pontianak https://lookerstudio.google.com/s/ix45B9XV_e4
	- Rekap Penerbitan	10%	Rekap, data lengkap	100	Seluruh dokumen yang terbit dilakukan rekap setiap harinya dan ditampilkan pada dashboard	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bXVCRT-VQnD69RY7c12f20oQDh2eH9
	- Dokumen dipersiapkan	10%	Dipersiapkan, data lengkap	100	Seluruh dokumen yang terbit dilakukan rekap setiap harinya dan ditampilkan pada dashboard	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E9YvYn8t288XZVomvYQAcHsacQoAX
	- Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan	40%	Besuai Baku Mutu	100	Rekomendasi yang diproses sesuai dengan baku mutu SOP B. 1626/ BP8PL 2/OT/31/01/2022	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HDe2R2Dy8AkvV25ZCzudOpeAY45B1DN
	- Penanganan Pengaduan	10%	Direspon, <14 X 24 Jam	100	Sepanjang tahun 2025 didapatkan sebanyak 138 kali pengaduan kepada BP8PL Pontianak dimana 5 kali diantaranya merupakan pengaduan terhadap proses penerbitan Rekomendasi. Sumber pengaduan tersebut berasal dari Tatap muka serta media sosial BP8PL Pontianak. Seluruh pengaduan terkait SIPU tersebut telah tuntas ditindaklanjuti dengan kurun waktu < 14 X 24 Jam. Seluruh pengaduan selanjutnya direkapitulasi dan disusun kedalam keadalam penyampalan data dukung serta laporan semesteran serta disampaikan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Penyampalan Data dukung pengaduan dilakukan setiap bulan sedangkan laporan pengaduan disampaikan setiap Semester. Data dukung meliputi Surat penyampalan data dukung / bulan dan laporan Pengaduan semesteran	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hQ4y82aac8_RLkXWfEWfJ05mZMx1Xn6
	- Jumlah permohonan diproses	10%	100%	100	Seluruh dokumen Rekomendasi diproses sebanyak 100% dimana selama tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 248 Rekomendasi. Rekomendasi yang diterbitkan adalah rekomendasi atas lalu lintas komoditas Hiu, Pari dan Teripang	Dashboard pelayanan SAJI BP8PL Pontianak https://lookerstudio.google.com/s/ix45B9XV_e4
	- Penggunaan Sistem Informasi	10%	Digunakan seluruhnya	100	Pelayanan rekomendasi di BP8PL Pontianak menggunakan aplikasi dari Dit. K8G yakni E-SAJI dalam seluruh prosesnya	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GQbGqLZa8TICR6oQ1w67MQNQH02g
3 Survey Kepuasan Masyarakat (10%)						
	- Dilaksanakan	70%	Dilaksanakan Seluruhnya	100	Telah dilaksanakan penelitian Survey Kepuasan Masyarakat sepanjang tahun 2025, dimana hasil survey direkapitulasi dan disajikan dalam bentuk laporan setiap Triwulannya, berdasarkan hal tersebut didapatkan sebanyak 4 laporan SKM yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kaPnGfrc35e6QHzGZg6Xuxn59GZac5
	- Nilai SKM	30%	> 88,7	100	Nilai SKM yang didapatkan setiap Triwulan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1. SKM TW I 96,25 dari 116 Responden 2. SKM TW II 97,45 dari 60 Responden 3. SKM TW III 90,73 dari 83 Responden 4. SKM TW IV 94,52 dari 128 Responden (Proses Validasi)	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kaPnGfrc35e6QHzGZg6Xuxn59GZac5
4 Penerapan Konvensi (10%)						
	- Penerapan Konvensi	100%	Telah diterapkan	100	Seluruh pelayanan Jenis ikan yang dilakukan oleh BP8PL Pontianak telah melakukan penerapan hasil Konvensi.	
NILAI AKHIR					100	

Piagam Penghargaan BPSPL Pontianak Tahun 2025



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman <https://bit.ly/DadukLKjPNK2025>. Lampiran ini mencakup:

1. Perjanjian kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Balai PK Pontianak Tahun 2025
2. Penghargaan yang diterima oleh Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2025:
 - Piagam penghargaan BPSPL Pontianak atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik (109,47) Triwulan I Tahun 2025
 - Piagam Penghargaan BPSPL Pontianak dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
 - Piagam Penghargaan BPSPL Pontianak dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan predikat Informatif.
3. Matriks Kinerja Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2025
4. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 5/BPSPL.2/TU.140/I/2025 perihal penyampaian capaian kinerja IKU Nilai Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026
5. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 7/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Penyampaian capaian kinerja IKU Masyarakat yang Ditingkatkan Kpaasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026
6. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 8/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026
7. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 9/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026
8. Nota Dinas ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor 12/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Laporan Kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan tanggal 7 Januari 2026
9. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor 4/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Capaian Kinerja IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan tanggal 7 Januari 2026
10. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat
11. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor 13/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Capaian Kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 9 Januari 2026

12. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor 10/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 2 Januari 2026
13. Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.3742/DJPK.1/RC.610/XII/2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Pontianak.
14. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor 111/SJ.2/RC.610/VII/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025
15. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026
16. Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025
17. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.190/DJPK.1/KP.210/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
18. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.233/DJPK.1/TU.210/VII/2026 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025
19. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2026
20. Nota Dinas Ketua Tim Kerja SDMAO nomor 127/DJPK.1/TU.210/I/2026 perihal Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
21. Nota Dinas kepala Biro Umum nomor 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025 perihal Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 tanggal 28 November 2025
22. Nota Dinas Plt.Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025
23. Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025
24. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor 10/BPSPL.2/TU.140/I/2026 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 2 Januari 2026.